



DINAS
SUMBER
DAYA AIR
PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)

2021



Kata Pengantar



Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sebagai Tindak Lanjut terhadap Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat

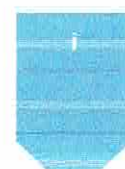
Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

Laporan ini merupakan suatu media dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis pada Dokumen Perencanaan seperti Rancangan Awal (Ranwal) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dan Ranwal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air Tahun 2017-2022. Selain itu, laporan ini juga disusun sebagai sarana peningkatan dan pengendalian kualitas kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa (*good governance*) dan upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan baik sebagai sumber informasi maupun evaluasi terhadap kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Untuk semua pihak yang telah berperan serta dalam memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan LKIP Dinas Sumber Daya Air Tahun 2021 ini, Kami ucapkan terima kasih, dan memohon kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penyusunan laporan pada tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2022
Kepala Dinas Sumber Daya Air
Provinsi DKI Jakarta,

Yusmada Faizal
NIP. 196406241989071002



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	v
Ikhtisar Eksekutif	vii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.4 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan	14
1.5 Dukungan Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana-Prasarana	21
1.6 Sistematika Penulisan	25
BAB II Perencanaan Kinerja	
2.1 Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022	27
2.2 Visi dan Misi	27
2.3 Tujuan dan Sasaran	29
2.4 Perjanjian Kinerja	30
2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)	40
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Metode Pengukuran Kinerja	43
3.2 Analisis Capaian Perjanjian Kinerja	44
3.3 Capaian Output PEN	102
3.4 Analisis terhadap Pemenuhan Target SDGs	108
BAB IV Penutup	
4.1 Kesimpulan	109
4.2 Rencana Aksi Perbaikan Kinerja	110
DAFTAR LAMPIRAN	

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	5
Gambar 1.2	KSD yang Diampu oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; (a) KSD Utama, (b) KSD Tambahan.....	18
Gambar 1.3	Skema Cascading Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan dalam bidang pembangunan dan pengelolaan sumber daya air di Provinsi DKI Jakarta	20
Gambar 1.4	Komposisi PNS Dinas Sumber Daya Air	21
Gambar 1.5	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan kualifikasi: (a) pendidikan, (b) golongan dan (c) jabatan	22
Gambar 1.6	Grafik Penganggaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 pada APBD Murni dan Perubahan; (a) Total Anggaran; (b) Rekap anggaran per Unit Dinas dan Suku Dinas; (c) Rekap per Program.....	24
Gambar 1.7	Rekap Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air	24
Gambar 1.8	Diagram Sistematika Penulisan Laporan.....	25
Gambar 2.1	Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air	28
Gambar 2.2	Gambar Skema (a) Isi Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan (b) Tahap Penyusunan Perjanjian Kinerja.....	31
Gambar 3.1	Model Pengukuran Kinerja	43
Gambar 3.2	Perencanaan Penanganan Titik Genangan pada Lokasi (a) Kel. Petogogan melalui Pembangunan Waduk Brigif dan (b) Jl. Mangga Dua Raya melalui Pembangunan Polder Mangga Dua	59
Gambar 3.3	Realisasi dan Target IKU 2 Tahun 2021.....	60
Gambar 3.4	Perbandingan capaian IKU 2 dengan Tahun Sebelumnya	60
Gambar 3.5	Realisasi dan Target IKU 3 Tahun 2021 Sesuai Target Berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022.....	64
Gambar 3.6	Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya dengan Target berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022	64
Gambar 3.7	Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya dengan Target berdasarkan RPJMD 2017-2022.....	65
Gambar 3.8	Realisasi dan Target IKU 4 Tahun 2021 Sesuai Target Berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022.....	70
Gambar 3.9	Perbandingan Capaian IKU 4 Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya dengan Target berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022.....	71
Gambar 3.10	Perbandingan Capaian IKU 4 Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya dengan Target berdasarkan RPJMD 2017-2022	71

Gambar 3.11	Realisasi dan Target IKU 5 Tahun 2021	80
Gambar 3.12	Realisasi dan Target IKU 6 Tahun 2021 Sesuai Target Berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022	101
Gambar 3.13	Realisasi dan Target IKU 6 Tahun 2020 Sesuai Target Berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022	101
Gambar 3.14	Gambaran Skema, terkait Capaian IKU 3 dan IKU 4 Dinas Sumber Daya Air terhadap Pemenuhan Target SDGs.....	108

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Keterkaitan Antara Isu Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan Program/Kegiatan Strategis yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat/ Kementerian, serta Pemenuhan Terhadap Indikator-Indikator Pembangunan Nasional/Internasional.....	15
Tabel 1.2 Arah Kebijakan Dinas Sumber Daya Air	19
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	30
Tabel 2.2 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta	32
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Kepala Dinas Sumber Daya Air sesuai Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022	40
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Kepala Dinas Sumber Daya Air sesuai Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022.....	41
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	44
Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021	44
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021	48
Tabel 3.4 Capaian Rata-Rata Program untuk Pehitungan IKU 1	52
Tabel 3.5 Kronologi Penanganan Genangan	53
Tabel 3.6 Penanganan Titik genangan Banjir Tahun 2021 (Pembangunan Crossing Saluran)	56
Tabel 3.7 Penanganan Titik genangan Banjir Tahun 2021 (Pembangunan Sumur Resapan)	56
Tabel 3.8 Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung IKU 2	61
Tabel 3.9 Jumlah penduduk yang Terlayani oleh IPA RO (bukan perpipaan) di Kepulauan Seribu.....	63
Tabel 3.10 Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dalam rangka penuntasan dengan IKU 3.....	66
Tabel 3.11 Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung IKU 3.....	68
Tabel 3.12 Rincian Realisasi IPAL Pemerintah Tahun 2021	69
Tabel 3.13 Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dalam rangka penuntasan dengan IKU 4.....	72
Tabel 3.14 Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung IKU 4.....	74
Tabel 3.15 Data Perhitungan Penurunan Permukaan Tanah.....	75
Tabel 3.16 Program/Kegiatan/Subkegiatan pendukung IKU 5	81
Tabel 3.17 Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas beserta Suku Dinas Sumber Daya Air Kota dan Kabupaten Administrasi Tahun 2021	83

Iktisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban kepada publik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diturunkan dalam bentuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

Hal yang dibahas dalam laporan ini mencakup Pendahuluan, Perencanaan, dan Akuntabilitas Kinerja yang mengacu pada Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sumber Daya Air Tahun 2021, Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022, dan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

Laporan ini menyajikan hasil evaluasi terhadap 6 (enam) Tujuan dan Sasaran Strategis yang termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi yang dilakukan mencakup penilaian capaian kinerja yang menganalisis keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan diukur.

Rincian keenam IKU beserta capaiannya diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kode
1	Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase yang handal	Tingkat layanan infrastruktur sumber daya air dan drainase	39,68%	41,11%	103,60%	
2	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Jumlah Titik Genangan Banjir	5 Titik	3 Titik	140%	

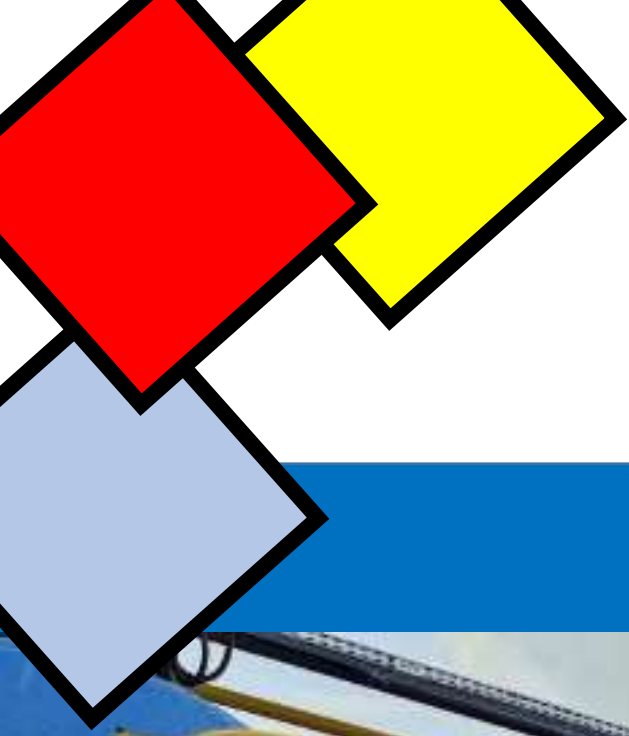
No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kode
3	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Cakupan pelayanan air bersih	63,65%	65,3%	102,59%	
		Cakupan pelayanan air limbah	19,99%	18,19%	91%	
4	Melambatnya penurunan permukaan tanah	Tingkat penurunan permukaan tanah (<i>land subsidence</i>)	3,985 cm	4 cm	99,62%	
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	91%	77,05%	84,67%	

Berdasarkan data diatas, capaian pada keenam Indikator Kinerja Utama (IKU) berada pada *range* $84,67\% \leq \text{Capaian} \leq 140\%$. Jika mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori “*Tinggi hingga Sangat Tinggi*” dengan kode warna “*Hijau hingga Hijau Tua*”. Secara umum, berdasarkan angka capaian tersebut, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan berhasil dalam mewujudkan target yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

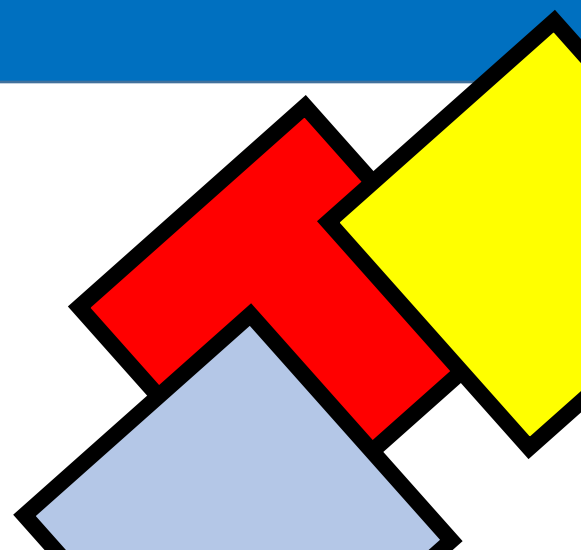
1

PENDAHULUAN





SPALD PULAU KELAPA ZONA 1





1.1 Latar Belakang

Bagi instansi pemerintahan, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Penyusunannya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang sumber daya air, sub urusan bidang air minum, sub urusan bidang air limbah, sub urusan bidang drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan bidang geologi, memiliki tanggung jawab dalam menyusun LKIP dan melaporkan capaian terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja pembangunan pada bidang pengelolaan sumber daya air.

Penyusunan LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan seperti Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, serta sebagai instrumen yang digunakan untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya LKIP Dinas Sumber Daya Air Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Maksud: Aspek Kinerja bagi Keperluan Eksternal Dinas Sumber Daya Air

LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 merupakan sarana pertanggungjawaban Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis telah dicapai selama Tahun 2021.

Tujuan: Aspek Manajemen Kinerja bagi Keperluan Internal Dinas Sumber Daya Air

LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja sebagai upaya perbaikan kinerja di masa datang. LKIP digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja dan motivasi untuk selalu berupaya merumuskan strategi dan inovasi terhadap pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dapat ditingkatkan secara simultan dan berkesinambungan.

1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta kedudukannya diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 156 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air.

Tugas pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
- h. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
- i. pelaksanaan pengendalian banjir dan abrasi;

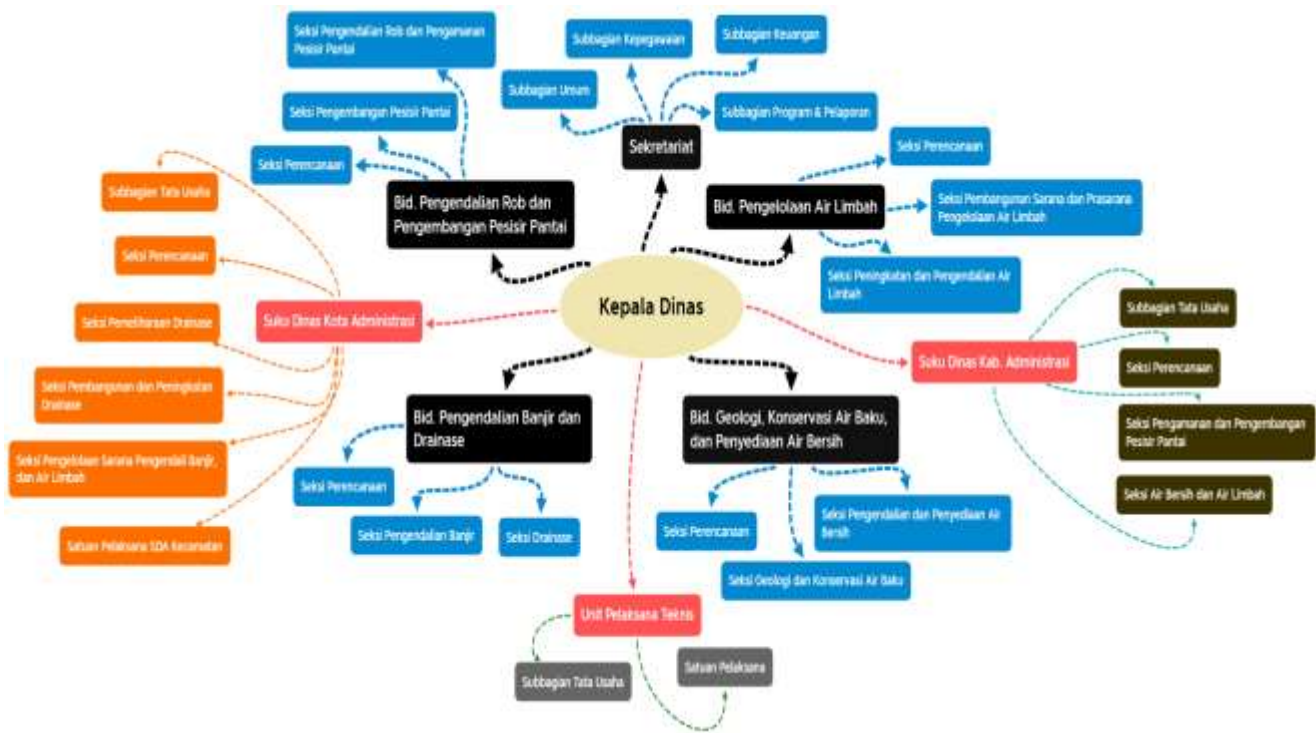
- j. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air bersih;
- k. pelaksanaan pengendalian rob dan pengembangan pesisir pantai;
- l. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air limbah;
- m. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelola sumber daya air;
- n. pelaksanaan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi;
- o. penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi;
- p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin di bidang pengelolaan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase dan geologi;
- q. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pemberian subsidi kepada badan usaha milik daerah di bidang air bersih dan air limbah;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; dan
- t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur dan/atau sekretaris daerah

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - 4. Subbagian Keuangan
- b. Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Pengendalian Banjir; dan
 - 3. Seksi Drainase
- c. Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Geologi dan Konservasi Air Baku; dan
 - 3. Seksi Pengendalian dan Penyediaan Air Bersih
- d. Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pesisir Pantai

- e. Bidang Pengelolaan Air Limbah, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah; dan
 - 3. Seksi Peningkatan dan Pengendalian Air Limbah
- f. Suku Dinas terdiri dari:
 - 1. Suku Dinas Kota, terdiri atas:
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Seksi Perencanaan;
 - Seksi Pemeliharaan Drainase;
 - Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase;
 - Seksi Pengelolaan Sarana Pengendali Banjir, Air Bersih dan Air Limbah; dan
 - Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan
 - 2. Suku Dinas Kabupaten, terdiri atas:
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Seksi Perencanaan;
 - Seksi Pengamanan dan Pengembangan Pesisir Pantai; dan
 - Seksi Air Bersih dan Air Limbah
- g. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
 - 1. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian; dan
 - Satuan Pelaksana Pengukuran
 - 2. Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Satuan Pelaksana Peralatan; dan
 - Satuan Pelaksana Perbekalan
 - 3. Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I; dan
 - Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II;
 - 4. Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Satuan Pelaksana Pengelolaan Data; dan
 - Satuan Pelaksana Sistem Informasi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Selengkapnya, Struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ditunjukkan pada **Gambar 1.1** sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

(Sumber: Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air)

Secara lebih detail struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air diuraikan sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas:

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksana tugas fungsi Dinas Sumber Daya Air;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air; dan
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air.

B. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas Sumber Daya Air. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
2. pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
3. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah Dinas;
8. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, dan kehumasan Dinas;
9. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja pada Dinas;
10. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan;
11. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
12. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

C. Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase

Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian banjir dan drainase. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
3. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
4. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
5. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem polder;
6. pelaksanaan pengendalian banjir;

7. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/ penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
9. pelaksanaan pengembangan bangunan pengendalian banjir pada wilayah sungai;
10. pelaksanaan pemberian saran/rekomendasi teknis dalam rangka pemberian izin dibidang pengendalian banjir dan drainase;
11. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin dibidang pengendalian banjir dan drainase;
12. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
13. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. Bidang Geologi, Konservasi Air Baku, dan Penyediaan Air Bersih

Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan geologi, konservasi air baku dan penyediaan air bersih. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
3. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
4. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
5. pelaksanaan penyediaan air baku yang memenuhi kualitas pada wilayah sungai;
6. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
7. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
8. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air bersih
9. pelaksanaan pengendalian pengelolaan dan pengembangan airbersih;
10. penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi;
11. penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi;
12. pemberian saran/rekomendasi teknis dalam rangka pemberian izin dibidang geologi, konservasi air baku dan penyediaan air bersih;

13. pengawasan dan pengendalian izin Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
14. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
15. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

E. Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai

Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pengendalian ROB dan pengembangan pesisir pantai. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
3. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
4. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
5. pelaksanaan pengelolaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
6. pelaksanaan pengendalian rob dan pengembangan pesisir pantai;
7. pelaksanaan pengelolaan bangunan pemantauan penurunan tanah;
8. pemberian saran/rekomendasi teknis dalam rangka pemberian izin dibidang pengendalian rob dan pengembangan pesisir pantai;
9. pengawasan dan pengendalian izin Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
10. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
11. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

F. Bidang Pengelolaan Air Limbah

Bidang Pengelolaan Air Limbah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan air limbah domestik. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Air Limbah menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
3. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
4. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
5. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
6. pelaksanaan pengendalian pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
7. pemberian saran/rekomendasi teknis dalam rangka pemberian izin dibidang pengelolaan sistem air limbah domestik;
8. pengawasan dan pengendalian izin Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
9. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
10. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

G. Suku Dinas Kota

Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas Kota dikoordinasikan oleh Walikota. Suku Dinas Kota mempunyai tugas membantu Dinas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah dan sub urusan drainase pada wilayah Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
3. perumusan kebijakan, bisnis proses, standar, dan prosedur Suku Dinas Kota;
4. pelaksanaan kebijakan, bisnis proses, standar, dan prosedur Suku Dinas Kota;
5. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Suku Dinas Kota;
6. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Suku Dinas Kota;
7. pelaksanaan pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Suku Dinas Kota;

8. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan bangunan pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Suku Dinas Kota;
9. pelaksanaan pengelolaan air bersih yang menjadi kewenangan Suku Dinas Kota;
10. pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik yang menjadi kewenangan Suku Dinas Kota;
11. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang menjadi kewenangan Suku Dinas Kota;
12. pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota;
13. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;
14. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
15. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

H. Suku Dinas Kabupaten

Suku Dinas Kabupaten dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Suku Dinas Kabupaten mempunyai tugas membantu Dinas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah dan sub urusan drainase pada wilayah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, Suku Dinas Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
3. perumusan bisnis proses, standar, dan prosedur Suku Dinas Kabupaten;
4. pelaksanaan bisnis proses, standar, dan prosedur Suku Dinas Kabupaten;
5. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan bangunan pengaman pantai yang menjadi kewenangan Suku Dinas Kabupaten;
6. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Suku Dinas Kabupaten;
7. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM yang menjadi kewenangan Suku Dinas Kabupaten;
8. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Suku Dinas Kabupaten;
9. pelaksanaan pengendalian abrasi pada wilayah Kabupaten;
10. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air bersih pada wilayah Kabupaten;

11. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada wilayah Kabupaten;
12. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase pada wilayah Kabupaten;
13. pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Kabupaten; pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kabupaten;
14. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
15. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

J. Unit Pelaksana Teknis

Dinas Sumber Daya Air mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sumber Daya Air terdiri dari:

1. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air

Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, pengujian dan pengukuran bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi. Untuk melaksanakan tugasnya, Unit Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- perumusan bisnis proses, standar, dan prosedur Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air;
- pelaksanaan bisnis proses, standar, dan prosedur Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air;
- pelaksanaan penyelidikan, pengujian dan pengukuran bidang pekerjaan umum pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi;
- pelaksanaan pemantauan penurunan tanah;

- pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air;
- pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air;
- pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air

Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan dan perbekalan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi serta fasilitasnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- perumusan bisnis proses, standar, dan prosedur Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air;
- pelaksanaan bisnis proses, standar, dan prosedur Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air;
- pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan bidang pekerjaan umum pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi;
- pelaksanaan kesekretariatan Unit Peralatan dan perbekalan Sumber Daya Air;
- pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Peralatan dan perbekalan Sumber Daya Air;
- pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air

Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengadaan tanah untuk prasarana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi. Untuk melaksanakan tugasnya, Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- perumusan bisnis proses, standar, dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;
- pelaksanaan bisnis proses, standar, dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;
- pelaksanaan pengadaan tanah untuk prasarana bidang pekerjaan umum pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi;
- pelaksanaan sertifikasi terhadap tanah yang sudah dibebaskan dan/atau sudah dibayarkan ganti rugi serta melakukan pemisahan sertifikat pada pengadaan tanah untuk prasarana bidang pekerjaan umum pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi;
- pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;
- pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;
- pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air

Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang sumber daya air, sub urusan bidang air minum, sub urusan bidang air limbah, sub urusan bidang drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber

daya mineral pada sub urusan geologi. Untuk melaksanakan tugasnya, Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- perumusan bisnis proses, standar, dan prosedur Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air;
- pelaksanaan bisnis proses, standar, dan prosedur Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air;
- pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data dan sistem informasi bidang pekerjaan umum pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi;
- pelaksanaan kesekretariatan Pusat Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air;
- pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air;
- pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan

Isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah

dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, Isu Strategis diperinci menjadi 5 Isu Utama yang dipecah menjadi 18 Isu Strategis Daerah, dan 5 Upaya Utama (Panca Upaya Utama) Pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan kedalam Kegiatan Strategis Daerah. Beberapa diantaranya diturunkan menjadi Isu Strategis yang diampu oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas:

1. pengendalian terhadap permasalahan banjir dan genangan;
2. penyediaan akses air bersih bagi masyarakat perkotaan;
3. penyediaan akses sanitasi/air limbah bagi masyarakat perkotaan; dan
4. pengendalian penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) dan banjir ROB di wilayah pesisir.

Karena sifatnya yang strategis dan penting, Isu Strategis yang diampu oleh Perangkat Daerah haruslah selaras dan mendukung pelaksanaan program/kegiatan strategis nasional, ataupun program/kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kementerian/Lembaga, dan pemenuhan terhadap Indikator-Indikator pembangunan yang ditetapkan baik secara nasional maupun internasional, serta menjawab isu-isu global yang terjadi.

Uraian keterkaitan antara Isu Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan program/kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat/ Kementerian, serta pemenuhan terhadap Indikator-Indikator pembangunan yang ditetapkan baik secara nasional maupun internasional adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keterkaitan Antara Isu Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan Program/Kegiatan Strategis yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat/ Kementerian, serta Pemenuhan Terhadap Indikator-Indikator Pembangunan Nasional/Internasional

Isu Strategis	Keterkaitan Isu dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat/Institusi Internasional
<p style="text-align: center;">ISU 1 PENGENDALIAN BANJIR DAN GENANGAN</p>	<p>Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 disebutkan terdapat <i>Major Project</i> “Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis” dengan manfaat mereduksi dampak bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta.</p>
<p style="text-align: center;">ISU 2 PENYEDIAAN AIR BERSIH BAGI</p>	<p>Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 disebutkan terdapat <i>Major Project</i> “Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)” dengan</p>

Isu Strategis	Keterkaitan Isu dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat/Institusi Internasional
<p>MASYARAKAT PERKOTAAN</p>	<p>manfaat meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%.</p> <p>Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>Tujuan 6 SDGs dengan Target Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</p>
<p>ISU 3 PENYEDIAAN AKSES SANITASI/AIR LIMBAH BAGI MASYARAKAT PERKOTAAN</p>	<p>Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 disebutkan terdapat <i>Major Project</i> “Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)” dengan manfaat meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%.</p> <p>Tujuan 6 SDGs dengan Target Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</p> <p>Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Limbah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>
<p>ISU 4 PENGENDALIAN PENURUNAN PERMUKAAN TANAH (<i>LAND SUBSIDENCE</i>) DAN BANJIR ROB DI WILAYAH PESISIR</p>	<p>Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 disebutkan terdapat <i>Major Project</i> “Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa” dengan manfaat mengatasi bencana banjir ROB di Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Isu Global: Isu perubahan iklim (<i>climate change</i>) dan kedatanganinya Nota Kesepakatan (MoU) “Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, dan Menteri Dalam Negeri sebagai respon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengendalian <i>Land Subsidence</i>.</p>

Isu Strategis	Keterkaitan Isu dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat/Institusi Internasional
	https://www.beritasatu.com/ekonomi/874743/respons-penurunan-muka-tanah-di-jakarta-pemerintah-bangun-3-spam

Strategi dalam penuntasan keempat Isu Strategis yang diampu oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tersebut dirumuskan kedalam Tujuan, Sasaran Strategis dan pelaksanaan Program, serta Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

Pada level tujuan, Dinas Sumber Daya Air menetapkan 1 Tujuan yakni Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase yang handal. Yang diturunkan kedalam 4 Sasaran Strategis (SS), yaitu:

1. Berkurangnya jumlah titik genangan banjir (SS 1)
2. Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan (SS 2)
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (SS 3); dan
4. Melambatnya penurunan permukaan tanah (SS 4)

Untuk level program, Dinas Sumber Daya Air mengampu 6 Program yang disusun mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keenam Program tersebut adalah sebagai berikut:

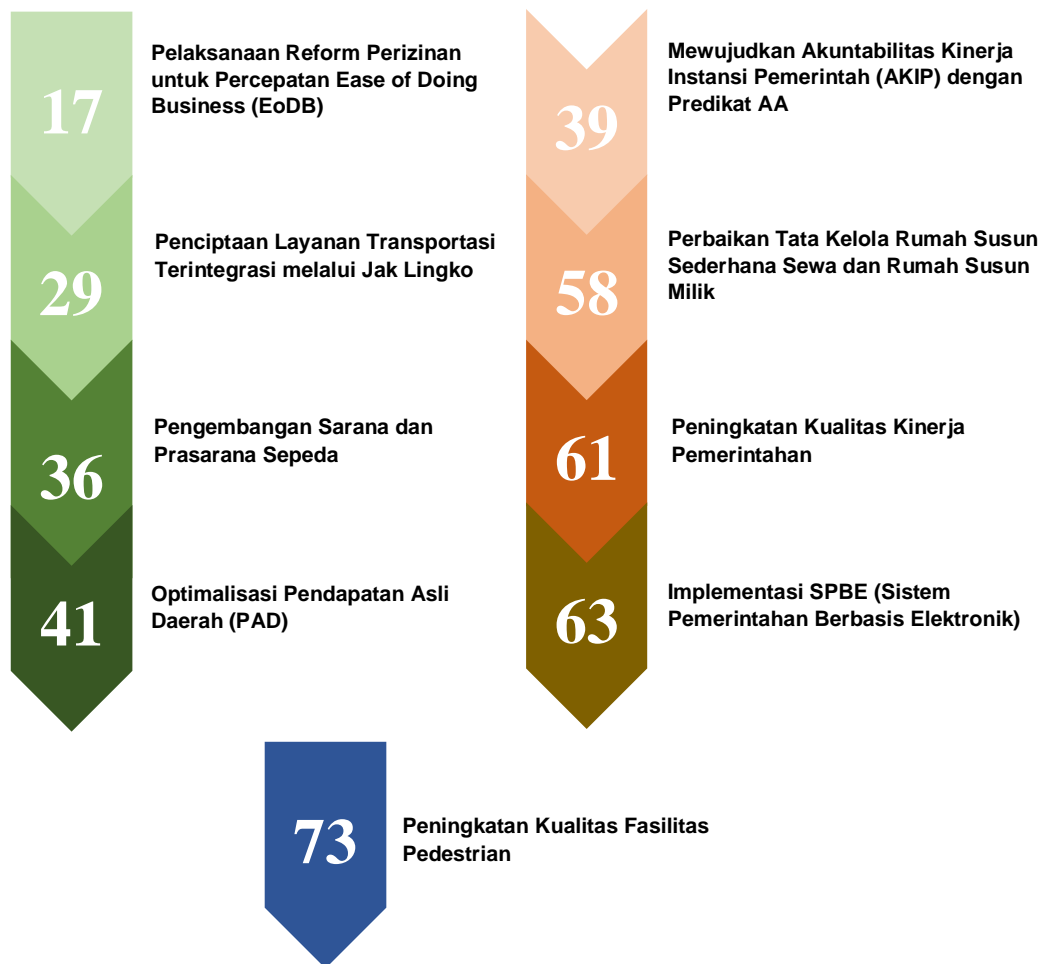
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah
5. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk pelaksanaan kegiatan strategis daerah (KSD), Dinas Sumber Daya Air mengampu 14 KSD yang terdiri dari 5 KSD Utama dan 9 KSD Tambahan. Untuk KSD Utama, Dinas Sumber Daya Air mengampu KSD nomor 21, 51, 22, 52, dan 23, serta untuk KSD Tambahan Dinas Sumber Daya Air mengampu KSD nomor 17, 29, 36, 41, 39, 58, 61, 63, dan 73.

Penjelasan terkait KSD Utama dan Tambahan yang diampu oleh Dinas Sumber Daya Air dalam rangka penuntasan Isu Strategis Daerah diuraikan pada **Gambar 1.2** sebagai berikut:



(a)



(b)

Gambar 1.2 KSD yang Diampu oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; (a) KSD Utama, (b) KSD Tambahan

(Sumber: e-Monev KSD 2021, <https://ksd.jakarta.go.id/>)

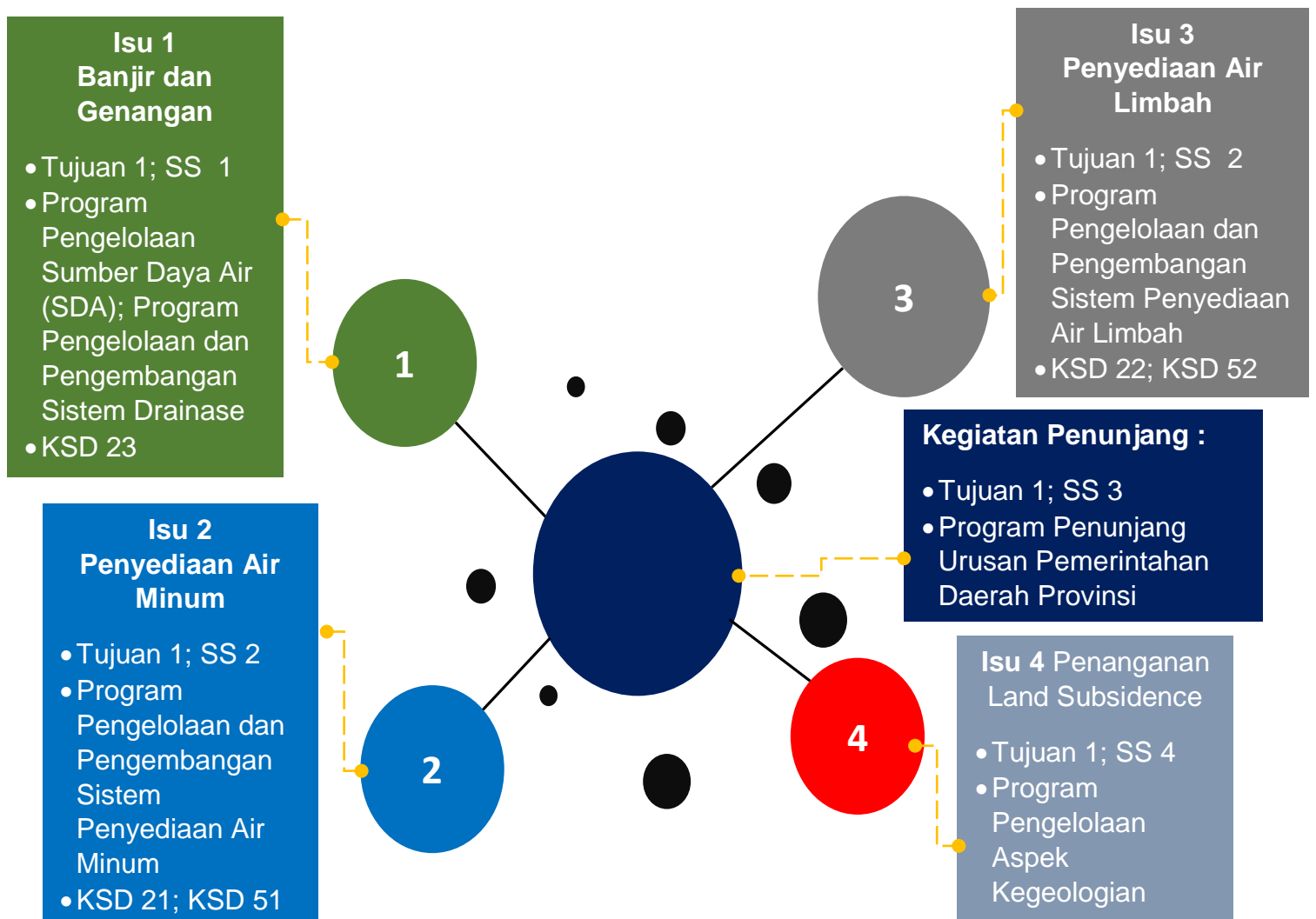
Selanjutnya untuk mengarahkan Strategi dalam penuntasan Isu Strategis tersebut agar lebih jelas dan terukur dan dapat memberikan *output* hasil pembangunan yang lebih optimal, dirumuskanlah suatu arah kebijakan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Arah Kebijakan Dinas Sumber Daya Air

Isu Strategis	Arah Kebijakan
<p>ISU 1 PENGENDALIAN BANJIR DAN GENANGAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan pendekatan naturalisasi dengan cara memperlambat kecepatan aliran serta penambahan ruang interaksi publik. 2. Pada wilayah selatan Provinsi DKI Jakarta ditampung dengan menggunakan waduk-waduk retensi. 3. Wilayah Provinsi DKI Jakarta (Kota Lama) dilindungi oleh dua banjir kanal, yaitu Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur yang akan menampung dan mengalirkan debit sungai dari hujang yang terjadi di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta. 4. Hujan yang jatuh di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada daerah yang cukup tinggi akan ditampung oleh saluran-saluran drainase yang terdiri dari saluran lingkungan dan saluran tepi jalan, dan kemudian secara bertahap akan mengalir ke saluran penghubung (PHB), kemudian ke saluran sub makro, dan selanjutnya ke saluran makro. Selanjutnya dari saluran sub makro atau saluran makro akan membuang beban debitnya ke salah satu dari dua banjir kanal di Provinsi DKI Jakarta atau langsung mengalir ke laut. Seluruh aliran mengalir dengan cara gravitasi. 5. Pada wilayah Provinsi DKI Jakarta yang daerah topografinya relatif rendah pengendalian banjirnya menggunakan sistem polder (waduk dan pompa). Masing-masing waduk mempunyai sistem drainasenya sendiri-sendiri. Dengan menggunakan pompa, air pada saluran drainase akan ditampung sementara di dalam waduk, dan selanjutnya air dari waduk akan dibuang ke laut atau ke sungai/kali terdekat. Dalam operasinya, selain dilengkapi dengan pompa, sistem polder ini juga dilengkapi dengan pintu air.
<p>ISU 2 PENYEDIAAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT PERKOTAAN</p>	<p>Arah kebijakan peningkatan akses layanan air bersih adalah dengan melakukan penambahan pasokan melalui pembangunan SPAM Jatiluhur dan SPAM Karian, revitalisasi 4 (empat) waduk/situ sebagai sumber air baku untuk air bersih dan melaksanakan</p>

Isu Strategis	Arah Kebijakan
	pembangunan instalasi pengolahan air bersih dengan total kapasitas minimal 14,5 liter/detik.
ISU 3 PENYEDIAAN AKSES SANITASI/AIR LIMBAH BAGI MASYARAKAT PERKOTAAN	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpadu Skala Perkotaan, <i>Jakarta Sewerage System (JSS)</i> pada 15 Zona dengan berfokus pada pembangunan Zona 1, Zona 6, Zona, 2, Zona 5, dan Zona 8. Selain itu, diupayakan dibangun Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat pada 30 lokasi.
ISU 4 PENGENDALIAN PENURUNAN PERMUKAAN TANAH (<i>LAND SUBSIDENCE</i>) DAN BANJIR ROB DI WILAYAH PESISIR	Pembangunan Tanggul Pantai Fase A NCICD (<i>National Capital Integrated Coastal Development</i>).

Untuk dapat memberikan penjelasan secara lebih ringkas dan mudah dipahami, formulasi *Cascading* Isu Strategis, Strategi, beserta Arah Kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air di Provinsi DKI Jakarta dirangkum dan disederhanakan melalui gambar skematisasi yang ditunjukkan pada **Gambar 1.3** sebagai berikut:

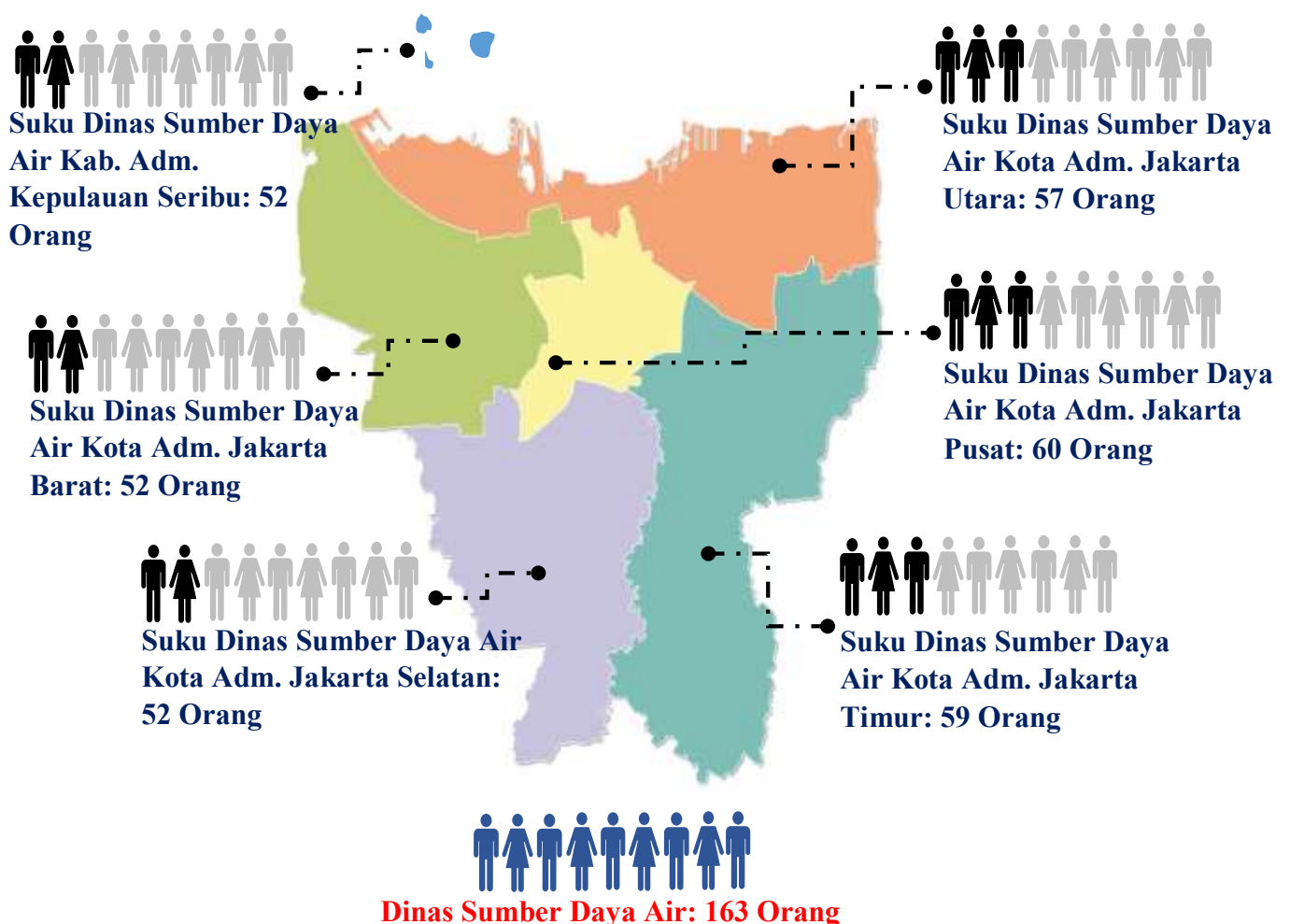


Gambar 1.3 Skema *Cascading* Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan dalam bidang pembangunan dan pengelolaan sumber daya air di Provinsi DKI Jakarta

1.5 Dukungan Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana-Prasarana

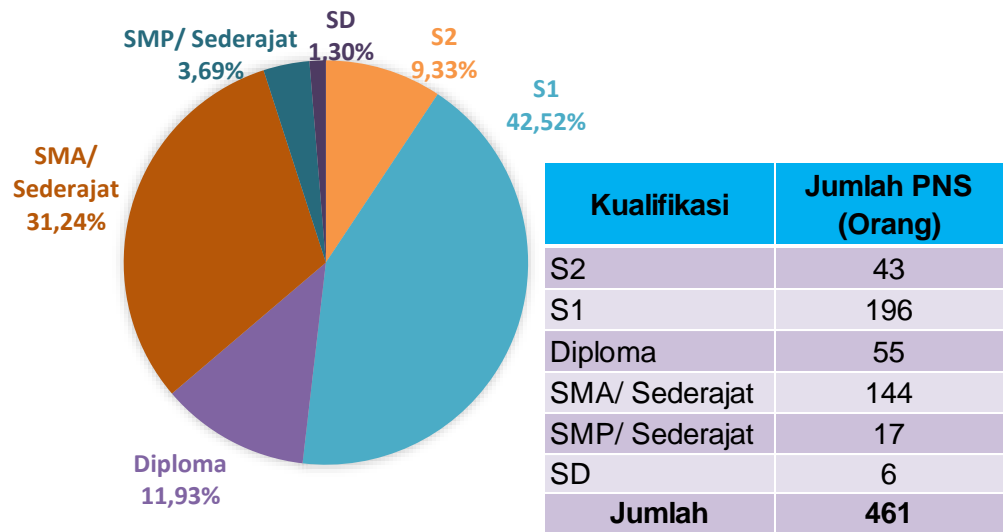
Dalam rangka penuntasan Isu Strategis Daerah, selain diperlukan kebijakan penyusunan program/kegiatan yang direncanakan dengan baik dan terperinci, juga diperlukan dukungan lain berupa tersedianya sumber daya yang berkualitas yang dapat menunjang kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dukungan sumber daya itu dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, maupun alat-alat penunjang.

Terkait dengan dukungan Sumber Daya Manusia, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta didukung oleh pegawai sebanyak 461 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar pada Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota dan Kabupaten Administrasi serta Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan. Komposisi PNS pada tiap unit ditunjukkan pada **Gambar 1.4** sebagai berikut:

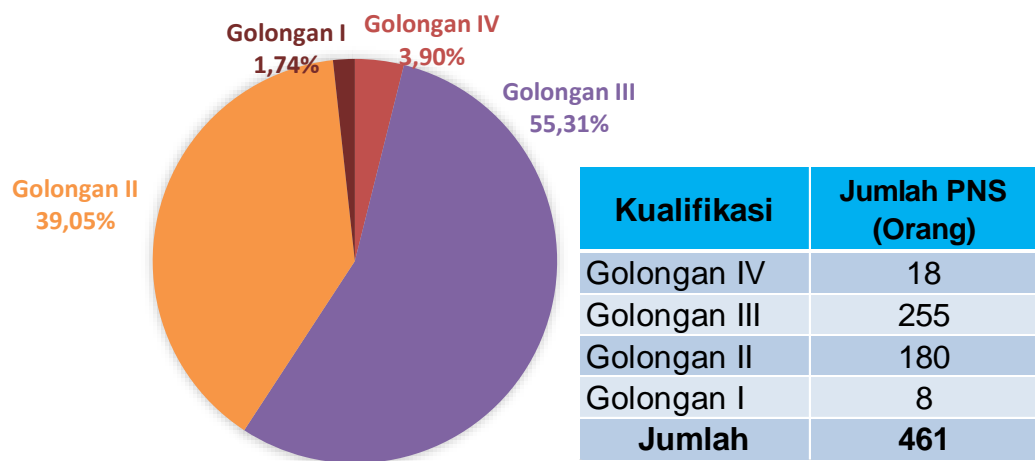


Gambar 1.4 Komposisi PNS Dinas Sumber Daya Air
(Sumber: Subbagian Kepegawaian Sekretariat, data per 31 Desember 2021)

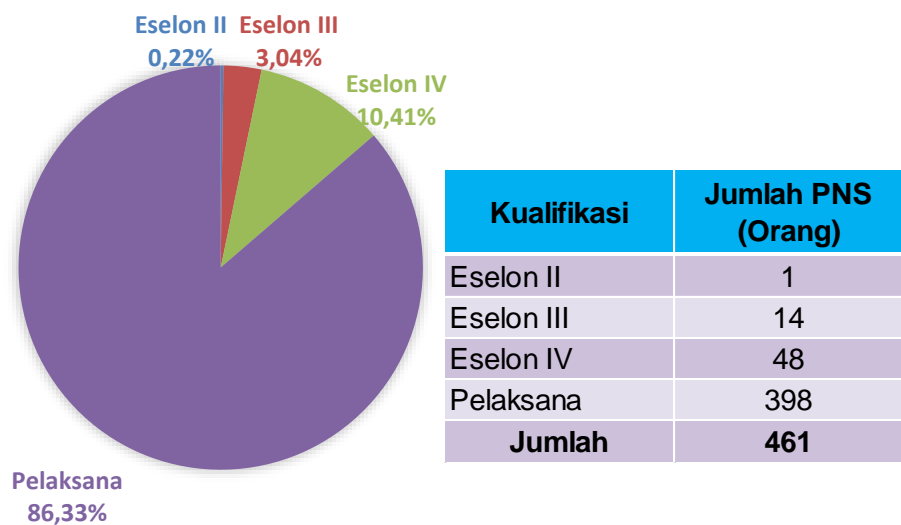
Rincian PNS Dinas Sumber Daya Air berdasarkan kualifikasi (a) pendidikan, (b) golongan, dan (c) jabatan ditunjukkan pada **Gambar 1.5** sebagai berikut:



(a)



(b)



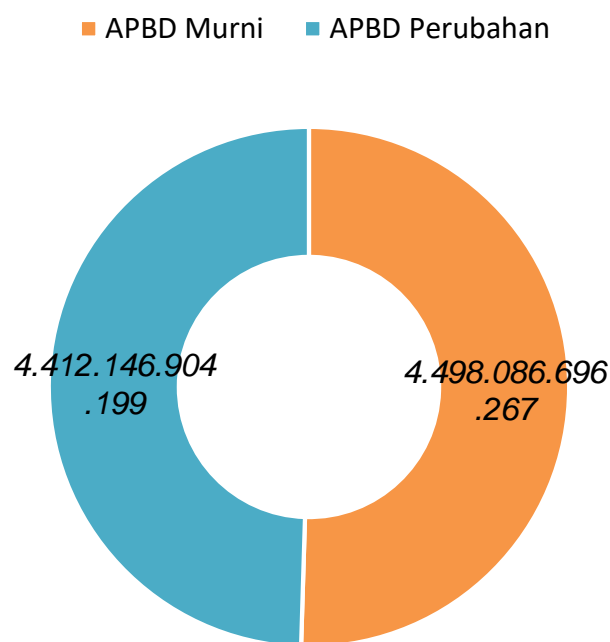
(c)

Gambar 1.5 Rekapitulasi Pegawai berdasarkan kualifikasi: (a) pendidikan, (b) golongan dan (c) jabatan

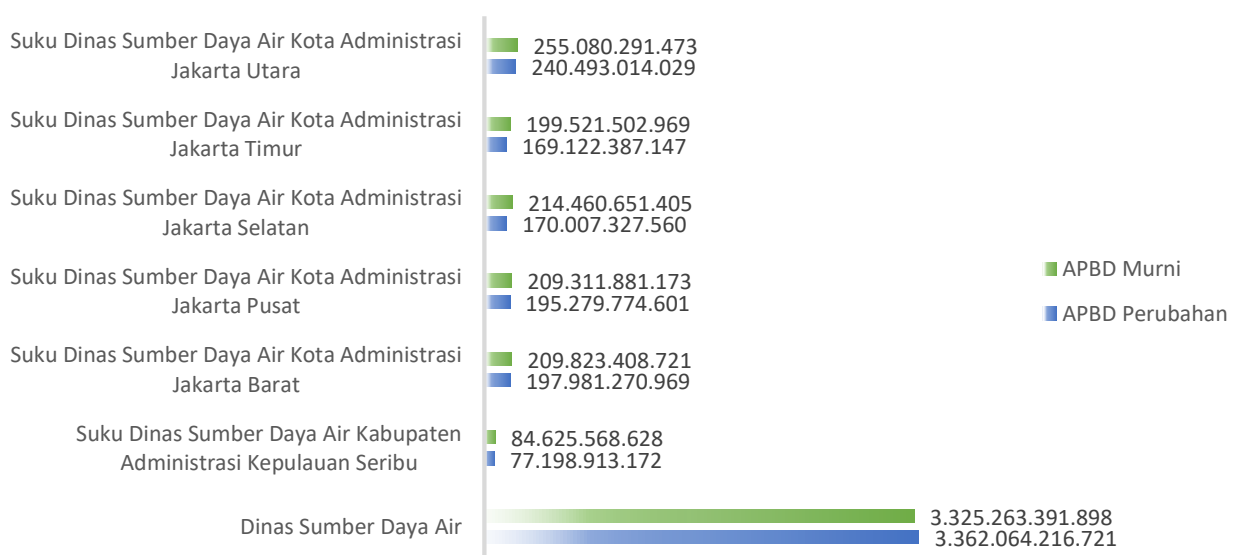
(Sumber: Subbagian Kepegawaian Sekretariat, data per 31 Desember 2021)

Berdasarkan data yang dijabarkan pada **Gambar 1.5** diatas, per 31 Desember tahun 2021, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta didukung oleh oleh Sumber Daya berupa PNS yang mayoritas memiliki kualifikasi pendidikan Strata-1 (S1) dengan persentase sebanyak 42,52%, selain itu informasi lain yang dapat diperoleh adalah mayoritas PNS pada Dinas Sumber Daya Air adalah memiliki pangkat Golongan III dengan persentase 55,31% dari total seluruh jumlah pegawai.

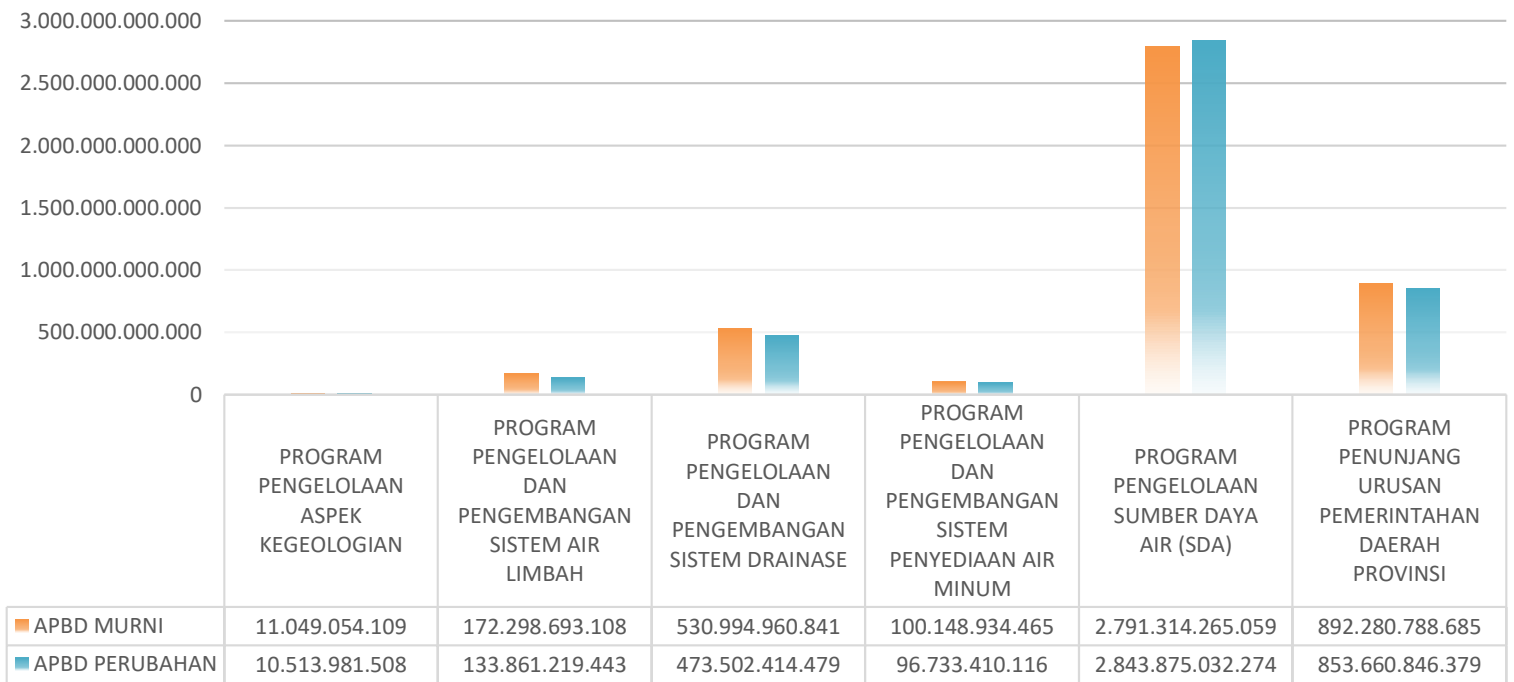
Terkait dengan dukungan anggaran, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menggunakan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Uraian penganggaran Tahun 2021 berdasarkan APBD Murni dan Perubahan dijabarkan dalam **Gambar 1.6** sebagai berikut:



(a)



(b)

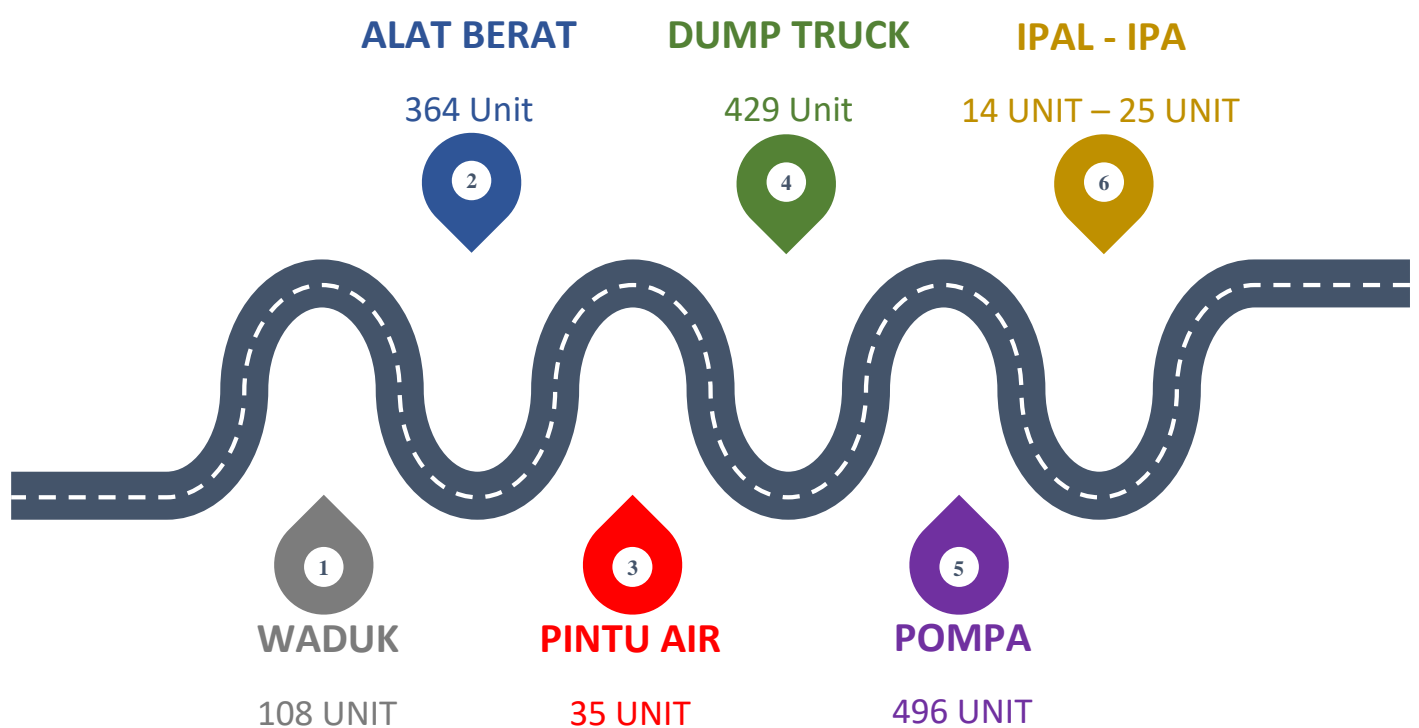


(c)

Gambar 1.6 Grafik Penganggaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 pada APBD Murni dan Perubahan; (a) Total Anggaran; (b) Rekap anggaran per Unit Dinas dan Suku Dinas; (c) Rekap per Program

(Sumber: Tarikan data berdasarkan e-Monev, <https://monev2021.bapedadki.net/>)

Untuk dukungan saran dan prasarana, Dinas Sumber Daya Air Provinsi didukung oleh aset berupa, alat berat, pompa dan pintu air, waduk IPA dan IPA, dan sebagainya Rekapitulasinya ditunjukkan pada **Gambar 1.7** sebagai berikut:

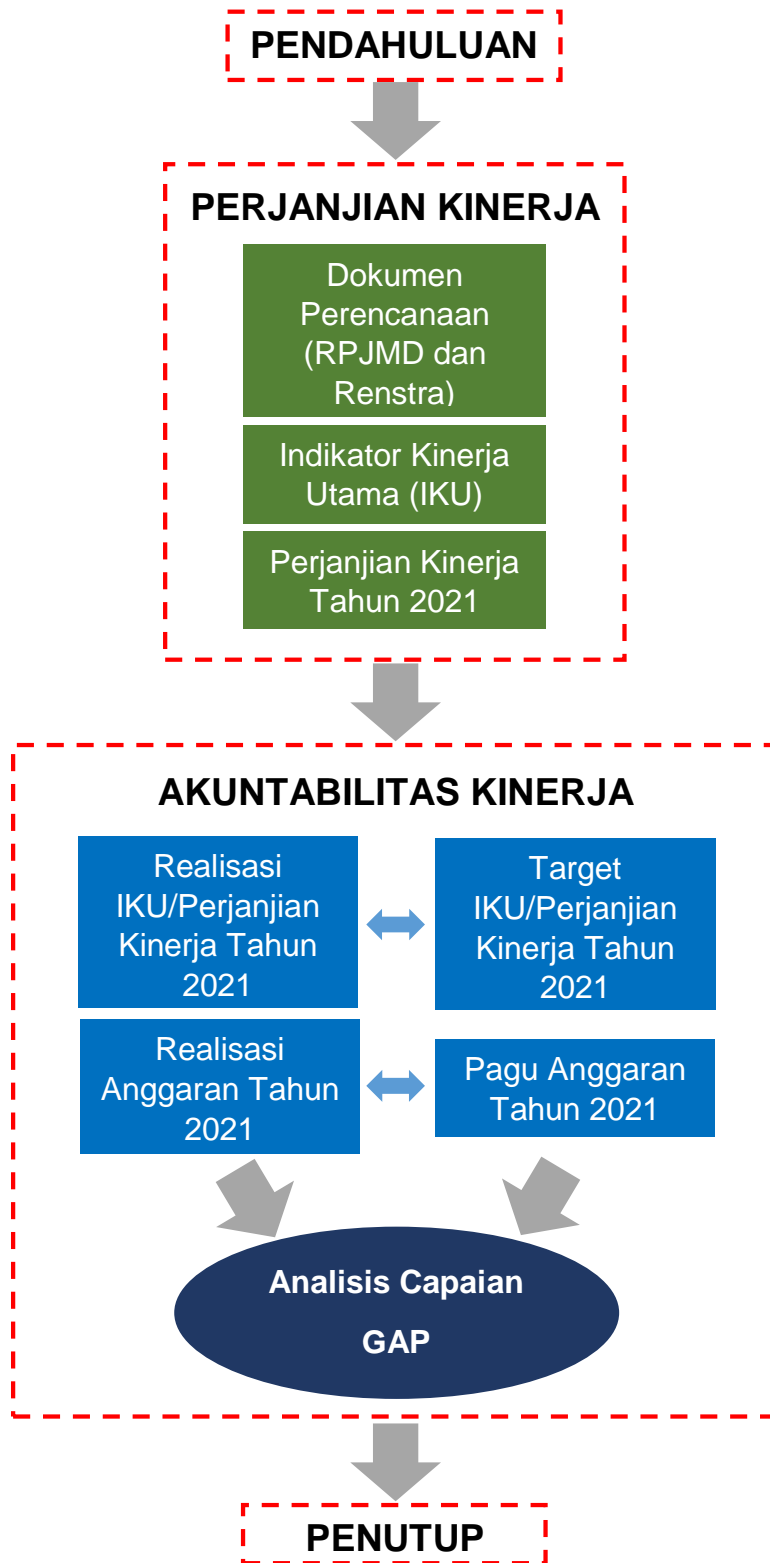


Gambar 1.7 Rekap Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air

(Sumber: <http://portaldataadsda.jakarta.go.id/>)

1.6 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2021. Realisasi kinerja (*performance results*) tersebut dibandingkan dengan target kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasinya sejumlah *gap* bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dapat diilustrasikan pada sebagai berikut:



Gambar 1.8 Diagram Sistematika Penulisan Laporan

Berdasarkan uraian diatas, sistematika penyajian LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:

Bab J – Pendahuluan

Bagian ini menyajikan Latar Belakang, Maksud, Tujuan dari penyusunan LKIP, dan penjelasan secara ringkas terkait gambaran organisasi yang meliputi Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Isu Strategis yang dihadapi, dan Sumber Daya yang digunakan dalam upaya menangani Isu Strategis tersebut, serta kerangka berpikir dalam penyajian laporan.

Bab JJ – Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan secara ringkas Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis organisasi yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD dan Renstra) serta ikhtisar Perjanjian Kinerja.

Bab JJJ – Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menjabarkan perhitungan capaian kinerja, realisasi penyerapan anggaran, dan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya disertai dengan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta hambatan/permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

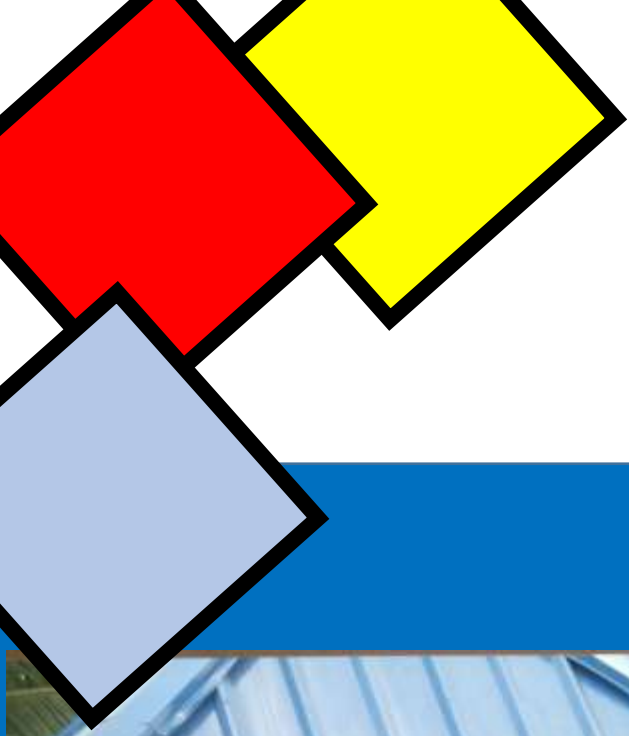
Bab JV – Penutup

Bagian ini menguraikan resume mengenai pencapaian kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 disertai dengan strategi, upaya, dan inovasi yang dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.

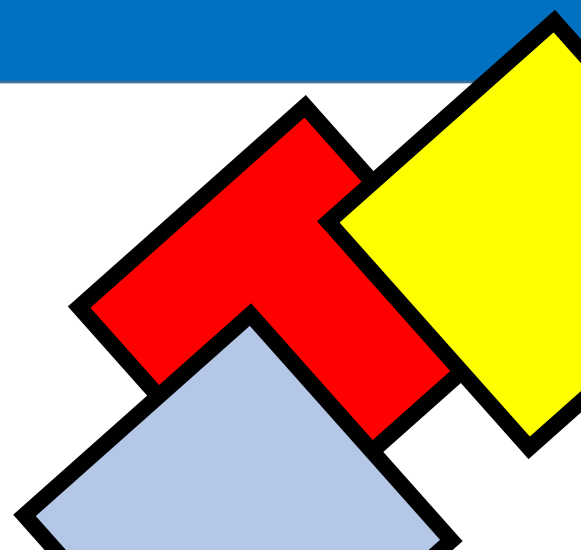
2

PERENCANAAN KINERJA





IPA SUNTER SELATAN





2.1 Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022

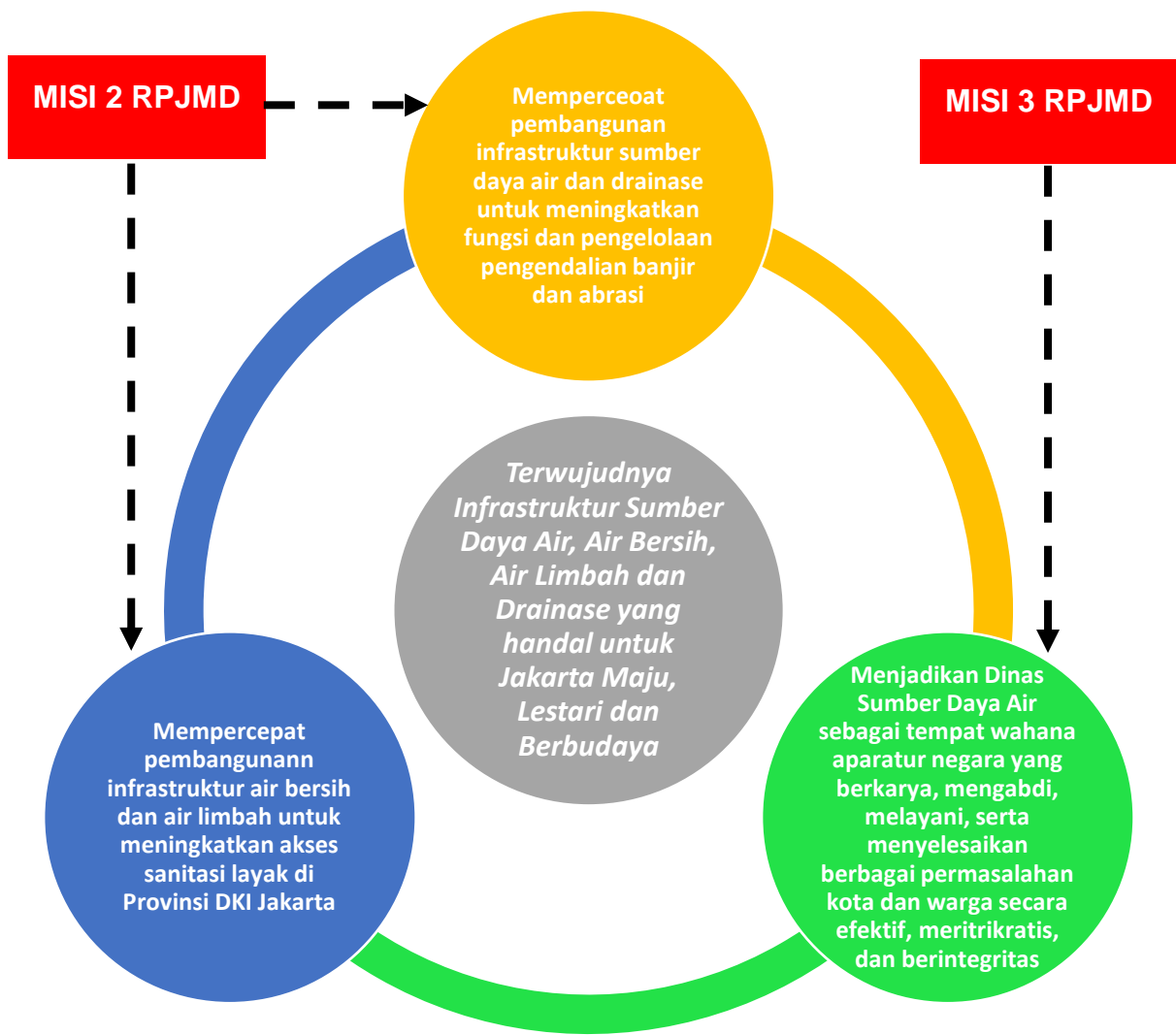
Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 yang disusun menggunakan pendekatan partisipatif dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi yang di dalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Ukuran Keberhasilan dan Kegagalan dalam setiap pelaksanaan Sasaran Strategis, Program, dan/atau Kegiatan. Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun (2017-2022) yang berfungsi sebagai pedoman bagi pimpinan maupun seluruh pegawai Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi selama periode tersebut.

Pada tahun 2019 terjadi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi keuangan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan strategis daerah yang membuat target-target yang telah disusun pada RPJMD 2017-2022 terasa agak sulit untuk diwujudkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan untuk melakukan revisi target-target pada RPJMD 2017-2022 yang prosesnya saat ini sudah memasuki Rancangan Awal dan menunggu untuk dilakukan pembahasan oleh DPRD. Dengan diusulkannya revisi terhadap RPJMD 2017-2022, maka perangkat daerah menyusun kembali Rancangan Awal Perubahan Renstra 2017-2022.

Secara formal, muatan dari Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022 hampir sama dengan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022. Pada saat pengajuannya, Dinas Sumber Daya Air melakukan menyesuaikan terhadap beberapa Indikator Tujuan dan Program beserta targetnya.

2.2 Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022, khususnya *“Misi Kedua: Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang”*, dan *“Misi Ketiga: Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meriktrokratis, dan berintegritas”*, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:



Gambar 2.1 Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air
 (Sumber: Dokumen Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022)

Penjelasan Visi Dinas Sumber Daya Air diuraikan sebagai berikut:

Infrastruktur : penggunaan kata Infrastruktur Sumber Daya Air, Air Bersih, Air Limbah dan Drainase sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air yang tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air. Infrastruktur Sumber Daya Air, Air Bersih, Air Limbah dan Drainase yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur Sumber Daya Air, Air Bersih, Air Limbah dan Drainase yang memenuhi standar dan baku mutu, memenuhi kebutuhan masyarakat, terintegrasi dan berkelanjutan.

Jakarta : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

Maju : memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata "lestari" adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari "berbudaya" adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut *World Cities Culture Report 2015* sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai definisinya, Tujuan didefinisikan sebagai hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani Isu Strategis Perangkat Daerah. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan terwujud dalam lima tahun yang akan datang. Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Sumber Daya Air dalam dokumen Rancangan Awal Perubahan Renstra 2017-2022 mendukung terwujudnya Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta khususnya Misi 2 dan Misi 3.

Hasil evaluasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan dan penerapan SAKIP Dinas Sumber Daya Air Tahun 2020 memberikan rekomendasi bagi Dinas Sumber Daya Air untuk menambahkan Indikator Tujuan yang mana hal tersebut belum tercantum dalam Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022 maupun rancangan awal perubahannya. Dinas Sumber Daya telah menindaklanjuti hal tersebut melalui penyusunan Indikator Tujuan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Rancangan Awal Perubahan Renstra 2017-2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase yang handal	Tingkat layanan infrastruktur sumber daya air dan drainase	Berkurangnya jumlah titik	Jumlah titik genangan banjir
		Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Cakupan pelayanan air bersih
			Cakupan pelayanan air limbah
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Melambatnya penurunan permukaan tanah	Tingkat penurunan permukaan tanah (Land Subsidence)*		

(Sumber: Ranwal Perubahan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022)

Pada **Tabel 2.1** diatas, Sasaran Strategis Melambatnya Penurunan Permukaan Tanah dengan Indikator Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (*Land Subsidence*) merupakan indikator yang dilimpahkan pelaksanaan kegiatannya ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dikarenakan adanya perubahan organisasi pada Tahun 2020.

2.4 Perjanjian Kinerja

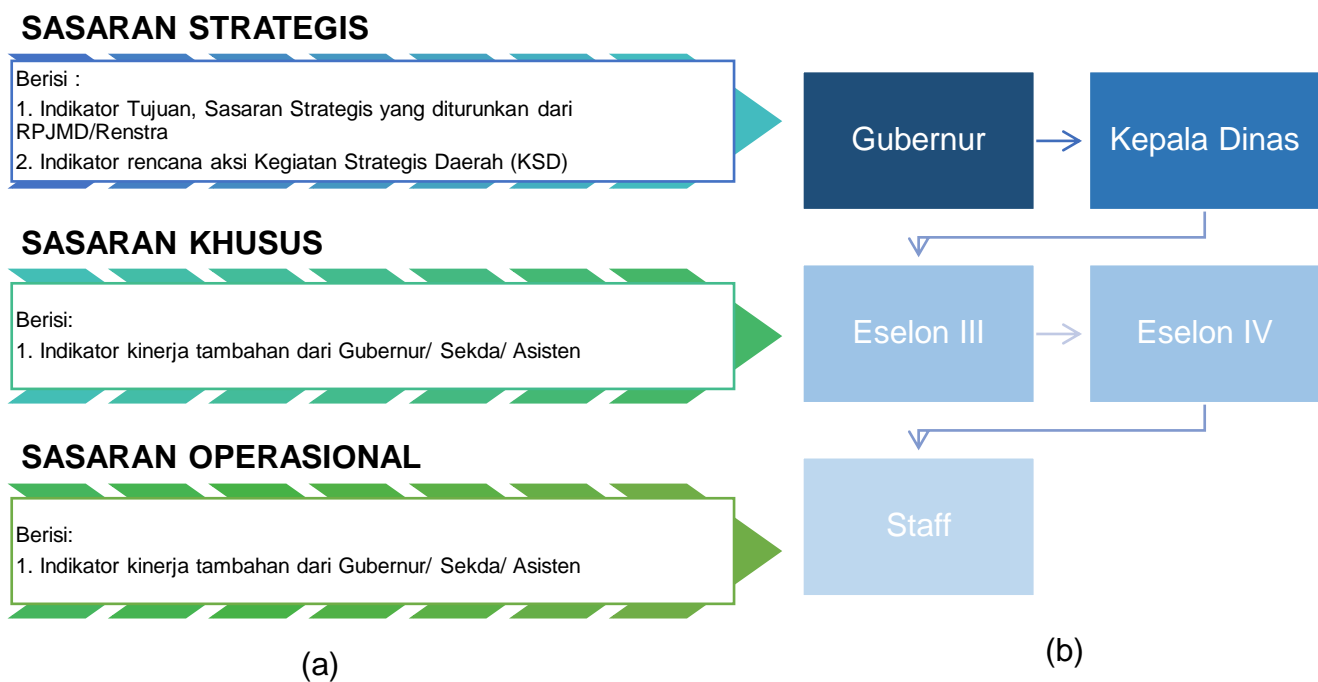
Tahap selanjutnya dari perencanaan kinerja setelah Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan berhasil disusun dalam rangka menjawab penyelesaian Isu Strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya adalah merangkum kedalam suatu bentuk perjanjian kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi ke pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan.

Adapun Tujuan penyusunan perjanjian kinerja ini adalah mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima kinerja secara terukur sesuai tugas dan fungsi, dan sumber daya yang tersedia.

Dokumen perjanjian kinerja pada Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta terdiri atas 3 struktur utama yakni Sasaran Strategis yang berisi Indikator Tujuan dan Sasaran yang diturunkan dari indikator-indikator yang tercantum pada RPJMD dan Renstra, serta berisikan indikator rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD), Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional yang berisi tugas tambahan yang diberikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta maupun para Asistennya.

Penyusunan dokumen perjanjian kinerja dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari penyusunan dokumen perjanjian kinerja antara Kepala Dinas dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta diikuti dengan penetapan dokumen kinerja para Eselon III dengan Kepala Dinas, Eselon IV dengan Eselon III, dan *Staff* dengan Eselon IV.

Gambar skema isi dokumen perjanjian kinerja beserta tahap penyusunannya dijabarkan pada **Gambar 2.2** sebagai berikut:



Gambar 2.2 Gambar Skema (a) Isi Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan (b) Tahap Penyusunan Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dalam penyusunannya menggunakan indikator dan target berdasarkan rancangan Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 maupun Rancangan Perubahan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan maupun *cascading* program dan kegiatan dari Kepala Dinas ke jajaran dibawahnya (Eselon III, Eselon IV, dan *Staff*) juga mengikuti

indikator dan target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 maupun Rancangan Perubahan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022 tersebut.

Dokumen perjanjian kinerja Kepala Dinas Sumber Daya Air Tahun 2021 dijabarkan pada **Tabel 2.2** sebagai berikut:

Tabel 2.2 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
1	Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase yang handal	1	Tingkat layanan infrastruktur sumber daya air dan drainase	e-SAKIP	Rata-rata capaian gabungan indikator: (1) Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam; (2) Persentase luas kawasan banjir yang tertangani; (3) Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi; (4) Persentase tanggul kritis di muara kali dan pantai kawasan pesisir Jakarta yang telah terbangun; (5) Persentase waduk/situ/embung yang memenuhi baku mutu untuk air baku.	39.68	Persentase
2	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Jumlah Titik Genangan Banjir	e-SAKIP	Genangan adalah peristiwa terhentinya air atau air tidak mengalir, tidak termasuk genangan yang diakibatkan oleh luapan kali. Lokasi titik genangan banjir yang berulang yaitu: (1) Perempatan ITC Fatmawati,, (2) Komplek Paspampres Kramat Jati, (3) Jl.Taman Mini 1 (Simpang Garuda), (4) Jl.D.I.Pandjaitan, (5) Jl.Patra Raya, (6) Jl.Letjen. S. Parman, (7) Jl.Industri/Industri 1, (8) Jl.Mangga Dua Raya, (9) Jl.Boulevard Barat, (10) Jl.Pahlawan Kalibata depan Kalibata City, (11) Kel.Petogogan, (12) Jl.Mayjen. Sutoyo depan UKI, (13) Jl.Balai Pustaka, (14) Jl.Arjuna Selatan, (15) Jl.Plumpang Semper Target dihitung dari banyaknya titik genangan yang tersisa dari total target 15 titik.	5	Titik
3	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	1	Cakupan pelayanan air bersih.	e-SAKIP	Cakupan pelayanan air bersih dihitung berdasarkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan PDAM dan	63.65 (1,138,179 KK)	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
					<p>penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan perpipaan PDAM. Perhitungan jumlah penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan PDAM yaitu: Volume produksi IPA selama 1 tahun x 60 liter/hari (kebutuhan air bersih per orang per hari pada perkotaan) x 365 hari Penggunaan air untuk keperluan domestik diperhitungkan dari jumlah penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan yang terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS). - penduduk perkotaan = 120L/hari/kapita - penduduk pedesaan = 60L/hari/kapita (SNI 19-6728.1-2002). Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data bappenas.</p> <p>(Jumlah penduduk yang dilayani oleh PDAM dan IPA bukan jaringan perpipaan PDAM dibagi proyeksi jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta) dikali 100%.</p>		
		2	Cakupan pelayanan air limbah	e-SAKIP	<p>Cakupan layanan pengelolaan air limbah adalah cakupan layanan pengolahan air limbah dengan sistem perpipaan ditambah cakupan layanan pengolahan air limbah dengan sistem non perpipaan. Cakupan layanan pengolahan air limbah dihitung berdasarkan jumlah orang yang dilayani dibagi dengan jumlah penduduk DKI Jakarta. (Jumlah orang yang terlayani sarana pengelolaan air limbah Pemprov DKI Jakarta dibagi proyeksi jumlah penduduk DKI Jakarta) dikali 100%</p>	19.99 (428,895 KK)	Persentase
4	Melambatnya penurunan permukaan tanah	1	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	e-SAKIP	Rata-Rata penurunan tanah berdasarkan titik pengukuran tanah yang telah ditetapkan dengan menggunakan pengukuran GPS Geodetik.	3.985	Persentase
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%.</p>	91%	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
					<p>Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPDK Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% $Realisasi = (40\%) + ((\%efisiensi \times 10\%)/20\%) + (50\%)$</p> <p>2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$ $Realisasi = (Penyerapan Anggaran \times 40\%) + (pencapaian output \times 50\%)$</p> <p>3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ $Realisasi = (40\%) + (pencapaian output \times 50\%)$</p>		
6	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	100%	Persentase
7	Meningkatnya akses sanitasi layak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih (nomor 21)	100%	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
			Air Bersih (nomor 21)				
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu (nomor 51)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu (nomor 51)	100%	Persentase
		4	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu (nomor 52)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu (nomor 52)	100%	Persentase
8	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	100%	Persentase
9	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (nomor 36)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (nomor 36)	100%	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (nomor 41)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (nomor 41)	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	100%	Persentase
		4	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	Persentase
12	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	1	Paket

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0*25%)	3	WTP
15	Terimplementasinya rencana Strategis Komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan perangkat daerah'	1	Persentase implementasi rencana strategis komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.</p> <p>Perhitungan :</p> <p>a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program</p>	100%	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
					unggulan per triwulan. d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).		
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta oleh Kementerian PAN dan RB (nilai 81)	A (81)	Predikat
17	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	e-Kinerja	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Cara penghitungan : Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut :AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30	92	Nilai
18	Terselesaikannya penanganan genangan akibat Banjir akibat luapan sungai dan Banjir ROB kurang dari 6 Jam	1	Persentase penanganan genangan akibat Banjir akibat luapan sungai dan Banjir ROB kurang dari 6 Jam	e-Kinerja	(Jumlah Penanganan Banjir Kiriman dan Banjir ROB kurang dari 6 Jam / Jumlah total kejadian Banjir akibat luapan sungai dan Banjir ROB kurang dari 6 Jam) x 100%. Dihitung pada saat air berhenti meluap. Tidak berlaku untuk kombinasi genangan/banjir yang disebabkan oleh luapan sungai, banjir ROB, dan hujan lokal secara bersamaan	100%	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
19	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 atau Ketercapaian Output sesuai KAK	1	Persentase capaian penyerapan anggaran PEN atau persentase penyelesaian output program PEN	e-Kinerja	(Jumlah realisasi anggaran PEN/total anggaran PEN atau Jumlah output program PEN yang tercapai / target capaian) x 100%	100%	Persentase
20	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	Persentase	Persentase
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	Persentase	Persentase
22	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	100%	Persentase

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis yang dapat merupakan indikator perjanjian kinerja atau beberapa indikator pada perjanjian kinerja yang merupakan kinerja utama suatu instansi. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas Program dan Kegiatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dengan target sesuai Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022 dan Rancangan Awal Perubahan Renstra Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Kepala Dinas Sumber Daya Air sesuai Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase yang handal	-	Berkurangnya jumlah titik genangan banjir	Jumlah titik genangan banjir	5
Meningkatkan dukungan akses prasarana dan sarana air bersih dan air limbah		Terwujudnya peningkatan akses air bersih	Cakupan pelayanan air bersih	73.69%
		Terwujudnya peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah	Cakupan pelayanan air limbah	23%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan		Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4 Indeks
		Terwujudnya peningkatan pelayanan	Indeks Kepuasan Pelayanan	4 Indeks

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		kendaraan operasional	Kendaraan Operasional	
Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial		Melambatnya penurunan permukaan tanah	Tingkat penurunan permukaan tanah (Land Subsidence)	3,985 cm

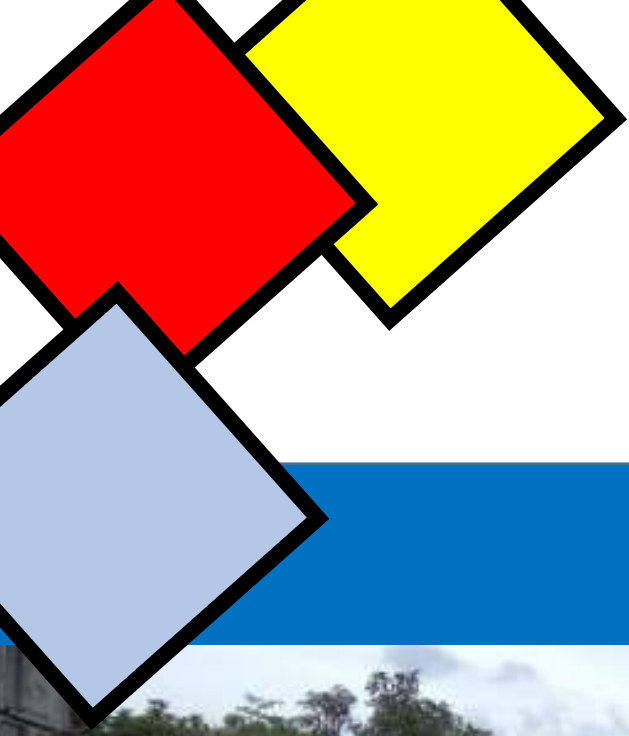
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Kepala Dinas Sumber Daya Air sesuai Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2017-2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase yang handal	Tingkat layanan infrastruktur sumber daya air dan drainase	39.68%	Berkurangnya jumlah titik genangan banjir	Jumlah titik genangan banjir	5 Titik
			Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Cakupan pelayanan air bersih	63.65%
				Cakupan pelayanan air limbah	19,99%
			Melambatnya penurunan permukaan tanah	Tingkat penurunan permukaan tanah (Land Subsidence)	3,985 cm
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%

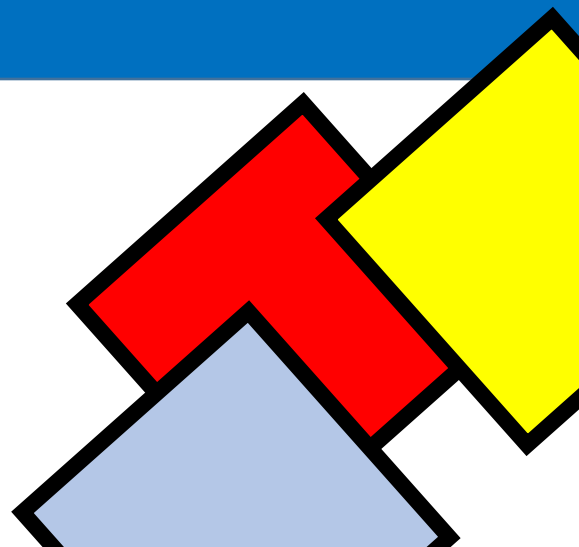
3

AKUNTABILITAS KINERJA





SPALD WADUK KAMPUNG RAMBUTAN 2

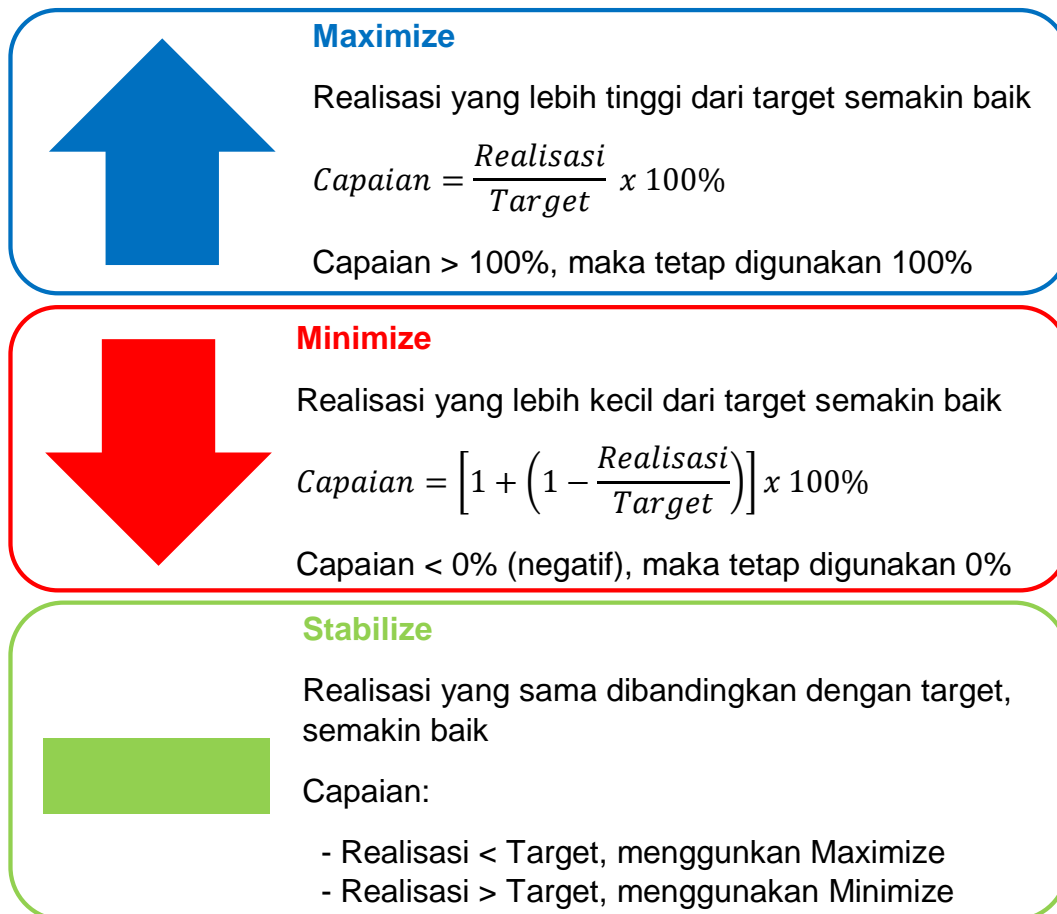




3.1 Metode Pengukuran Kinerja

Dalam AKIP, tahapan penting berikutnya dari perencanaan kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi.

Metode pengukuran kinerja didasarkan pada pengukuran capaian pada indikator kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan sifat indikator kinerjanya dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Uraianya dijabarkan pada **Gambar 3.1** sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Pengukuran Kinerja

Untuk menginterpretasi pencapaian indikator digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang diuraikan pada **Tabel 3.1** sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
≤ 50	Sangat Rendah	Merah

(Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)

3.2 Analisis Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja Tahun 2021 ditunjukkan pada **Tabel 3.2** sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kode Warna
1	Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase yang handal	Tingkat layanan infrastruktur sumber daya air dan drainase	Persentase	39,68	41,11	103,60	
2	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Jumlah Titik Genangan Banjir	Titik	5	3	140	
3	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Cakupan pelayanan air bersih.	Persentase	63,65	65,30	102,59	
		Cakupan pelayanan air limbah	Persentase	19,99	18,19	91	
4	Melambatnya penurunan permukaan tanah	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	Cm	3,985	4	99,62	
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91	77,05	84,67	
6	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	Persentase	100	100	100	
7	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih (nomor 21)	Persentase	100	98,35	98,35	
		Persentase penyelesaian rencana aksi	Persentase	100	97,95	97,95	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kode Warna
		Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)					
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu (nomor 51)	Persentase	100	100	100	
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu (nomor 52)	Persentase	100	100	100	
8	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	Persentase	100	97,09	97,09	
9	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	Persentase	100	80	80	
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (nomor 36)	Persentase	100	100	100	
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	Persentase	100	93,33	93,33	
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	Persentase	100	100	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kode Warna
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (nomor 41)	Persentase	100	90	90	
		Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	Persentase	100	74,38	74,38	
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	Persentase	100	100	100	
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	Persentase	100	100	100	
12	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Paket	1	1	100	
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	100	100	100	
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	WTP	3	100	100	
15	Terimplementasinya rencana Strategis Komunikasi publik untuk program- program umum dan unggulan perangkat daerah	Persentase implementasi rencana strategis komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase	100	100	100	
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	Predikat	A (81)	94,71	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kode Warna
17	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	Nilai	92	97,86	100	
18	Terselesaikannya penanganan genangan akibat Banjir akibat luapan sungai dan Banjir ROB kurang dari 6 Jam	Persentase penanganan genangan akibat Banjir akibat luapan sungai dan Banjir ROB kurang dari 6 Jam	Persentase	100	100	100	
19	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 atau Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase capaian penyerapan anggaran PEN atau persentase penyelesaian output program PEN	Persentase	100	100	100	
20	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100	91,67	91,67	
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	100	98,96	98,96	
22	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	91,5	91,5	

(Sumber: e-tpg Tahun 2021)

Berdasarkan **Tabel 3.2** diatas, besarnya capaian kinerja yang diperoleh oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 jika mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berada pada rentang $74,38\% \leq \text{Capaian} \leq 100\%$ dengan intepretasi Sedang hingga Sangat Tinggi. Secara garis besar, berdasarkan angka capaian tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa Dinas Sumber Daya Air telah sukses dalam menjalankan program kerjanya.

Capaian terendah sebesar 74,38% terdapat pada pelaksanaan kinerja terkait pemenuhan target Kegiatan Strategis Daerah (KSD) pada KSD 58 “Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik”. Pelaksanaannya terkendala adanya perubahan prioritas lokasi pembangunan fisik rumah susun sehingga Dinas Sumber Daya Air memerlukan waktu tambahan untuk proses administrasi pembebasan lahannya.

Uraian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan dokumen capaian perjanjian kinerja pada **Tabel 3.2** diatas dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kode Warna
1	Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase yang handal	Tingkat layanan infrastruktur sumber daya air dan drainase	Rata-rata capaian gabungan indikator: (1) Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam; (2) Persentase luas kawasan banjir yang tertangani; (3) Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi; (4) Persentase tanggul kritis di muara kali dan pantai kawasan pesisir Jakarta yang telah terbangun; (5) Persentase waduk yang memenuhi baku mutu untuk air baku, (6) Cakupan pelayanan air bersih, dan (7) Cakupan pelayanan air limbah	Persentase	39,68	41,11	103,60	
2	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Jumlah Titik Genangan Banjir	Genangan adalah peristiwa terhentinya air atau air tidak mengalir, tidak termasuk genangan yang diakibatkan oleh luapan kali. Lokasi titik genangan banjir yang berulang yaitu: (1) Perempatan ITC Fatmawati, (2) Komplek Paspampres Kramat Jati, (3) Jl. Taman Mini 1 (Simpang Garuda) (4) Jl. D.I. Pandjaitan (5) Jl. Patra Raya (6) Jl. Letjen. S. Parman (7) Jl. Industri/Industri 1 (8) Jl. Mangga Dua Raya (9) Jl. Boulevard Barat (10) Jl. Pahlawan Kalibata depan Kalibata City (11) Kel.Petogogan, (12) Jl. Mayjen. Sutoyo depan UKI, (13) Jl. Balai Pustaka (14) Jl. Arjuna Selatan	Titik	5	3	140	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kode Warna
			(15) Jl. Plumpang Semper Target dihitung dari banyaknya lokasi titik genangan selama 1 tahun yang terjadi kurang dari 2 jam					
3	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Cakupan pelayanan air bersih.	Cakupan pelayanan air bersih dihitung berdasarkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan PDAM dan penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan perpipaan PDAM. Perhitungan jumlah penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan PDAM yaitu: Volume produksi IPA selama 1 tahun x 60 liter/hari (kebutuhan air bersih per orang per hari pada perkotaan) x 365 hari Penggunaan air untuk keperluan domestik diperhitungkan dari jumlah penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan yang terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS). - penduduk perkotaan = 120L/hari/kapita - penduduk pedesaan = 60L/hari/kapita (SNI 19-6728.1-2002). Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data Bappenas.	Persentase	63,65	65,30	102,59	
		Cakupan pelayanan air limbah	Cakupan layanan pengelolaan air limbah adalah cakupan layanan pengolahan air limbah dengan sistem perpipaan ditambah cakupan layanan pengolahan air limbah dengan sistem non perpipaan. Cakupan layanan pengolahan air limbah dihitung berdasarkan jumlah orang yang dilayani dibagi dengan jumlah penduduk DKI Jakarta. Asumsi cakupan pelayanan air limbah perpipaan adalah 1 Ruang Tangga terdiri dari 5 orang. Asumsi cakupan pelayanan air limbah dengan non perpipaan adalah, 1 orang = 10 m2 dan 1 kali sedot/KK = 1,5 m3. Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data Bappenas 2010-2035	Persentase	19,99	18,19	91	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kode Warna
4	Melambatnya penurunan permukaan tanah	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	Rata-Rata penurunan tanah berdasarkan titik pengukuran tanah yang telah ditetapkan dengan menggunakan pengukuran GPS Geodetik	Cm	3,985	4	99,62	
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:</p>	Persentase	91	77,05	84,67	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kode Warna
			1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\%efisiensi \times 10\%)/20\%) + (50\%)$ 2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan ouput $< 100\%$ Realisasi = $(Penyerapan Anggaran \times 40\%) + (pencapaian output \times 50\%)$ 3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (pencapaian output \times 50\%)$					

(Sumber: e-tpg Tahun 2021)

Berdasarkan **Tabel 3.3** diatas, besarnya capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 jika mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berada pada rentang $84,67\% \leq \text{Capaian} \leq 100\%$ dengan intepretasi “Tinggi hingga Sangat Tinggi”. Detail dari masing-masing IKU diuraikan sebagai berikut:

IKU 1: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase yang Handal dengan indikator “Tingkat Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase”

1. Berdasarkan definisi operasionalnya, realisasi dari IKU 1 ini dihitung dengan menggabungkan Rata-Rata Capaian Gabungan Indikator: (1) Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam; (2) Persentase luas kawasan banjir yang tertangani; (3) Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi; (4) Persentase tanggul kritis di muara kali dan pantai kawasan pesisir Jakarta yang telah terbangun; (5) Persentase waduk yang memenuhi baku mutu untuk air baku; (6) Cakupan pelayanan air bersih; dan (7) Cakupan pelayanan air limbah. Perhitungannya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Rata-Rata Program untuk Pehitungan IKU 1

No.	Indikator	Capaian (%)
1	Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	83,18
2	Persentase luas kawasan banjir yang tertangani	51,73
3	Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	50,8
4	Persentase tanggul kritis di muara kali dan pantai kawasan pesisir Jakarta yang telah terbangun	11,19
5	Persentase waduk yang memenuhi baku mutu untuk air baku	7,41
6	Cakupan pelayanan air bersih	65,3
7	Cakupan pelayanan air limbah	18,19
Rata-Rata		41,11

2. Berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022, target pada tahun 2021 sebesar 39,68%.
3. Capaian dihitung dengan menggunakan formula maximize sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU 3} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKU 3} = \frac{41,11\%}{39,68\%} \times 100\% = 103,60\%$$

Sesuai ketentuan, digunakan capaian maksimum yakni 100%.

Angka capaian sebesar 103,60% tersebut, jika mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, memiliki interpretasi “Sangat Tinggi”.

IKU 2: Meningkatnya Fungsi dan Pengelolaan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Abrasi dengan indikator Jumlah Titik Genangan Banjir

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan terhadap target IKU ini adalah melalui pengurangan titik genangan banjir pada 15 titik jalan yang dilaporkan sering terjadi genangan berulang yang sumbernya bukan dari luapan kali/sungai. Target dari sasaran strategis ini disusun menggunakan formulasi *minimize* dimana indikator keberhasilan dilihat dari penurunan titik genangan banjir tiap tahunnya. Jika titik genangan banjir tiap tahunnya menurun, dapat dikatakan capaian kinerja semakin baik.

Kronologi penanganan genangan yang dilakukan Tahun 2018-2020 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kronologi Penanganan Genangan

Target RPJMD 2017-2022	Rincian Target					Rincian Realisasi					Sisa Genangan yang belum Tertangani
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Perempatan ITC Fatmawati		X					X				1. Jl. Mayjend Sutoyo depan UKI 2. Jl. Petogogan 3. Jl. Mangga dua Raya
2. Komplek Paspampres Kramat Jati					X		X				
3. Jl. Taman Mini 1 (Simpang Garuda)					X		X				
4. Jl. DI Panjaitan					X				X		
5. Jl. Patra Raya	X					X					
6. Jl. Letjend. S. Parman	X					X					
7. Jl. Industri/Industri 1		X					X				
8. Jl. Mangga dua Raya		X									
9. Jl. Boulevart Barat			X					X			

Target RPJMD 2017-2022	Rincian Target					Rincian Realisasi					Sisa Genangan yang belum Tertangani
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
10. Jl. Pahlawan Kalibata		X				X					
11. Jl. Petogogan					X						
12. Jl. Jl. Mayjend Sutoyo depan UKI					X						
13. Jl. Balai Pustaka				X			X				
14. Jl. Arjuna selatan	X					X					
15. Jl. Plumpang Semper		X					X				

Penanganan Titik Genangan Banjir Tahun 2018

1. Jalan Pahlawan Kalibata depan Kalibata City:

Melaksanakan kegiatan pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan, pada Jl. Pahlawan Kalibata depan Kalibata City, Kecamatan Pancoran dan pengurusan saluran di tepi jalan kalibata, saluran jalan TMP, saluran phb kalibata, dan saluran phb kalibata segmen STEKPI.

2. Jalan Patra Raya:

- Melaksanakan pembangunan *crossing* saluran menuju pompa patra pada Jl. Patra Raya Kota Administrasi Jakarta Barat sepanjang 14 meter.
- Melaksanakan pelebaran kolom olakan pompa patra (pengadaan langsung) pada Jl. Patra Raya Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Melaksanakan penambahan dua unit pompa mobile dengan kapasitas 500 liter/detik.

3. Jalan Letjend S. Parman:

Melaksanakan pembangunan saluran lokasi Jalan S. Parman (depan Apartemen Slipi) Kota Administrasi Jakarta Barat, sepanjang 260 meter mulai dari Apartemen Slipi sampai dengan Grand Shoho menuju PHB Palmerah Utara.

4. Jalan Arjuna Selatan:

Melaksanakan pemeliharaan dengan kegiatan pengurusan saluran pada lokasi Jalan Arjuna Selatan menuju Kali Sekretaris.

Penanganan Titik Genangan Banjir Tahun 2019

1. Perempatan ITC Fatmawati:

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan penanganan genangan banjir

di Perempatan ITC Fatmawati dengan pembersihan tali-tali air dan melakukan pembersihan saluran menggunakan alat berat *combi jetting*.

2. Komplek Paspampres Kramat Jati:

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan penanganan genangan banjir di Komplek Paspampres Kramat Jati melalui penanganan banjir oleh satgas pada lokasi terjadinya banjir.

3. Jl. Taman Mini 1 (Simpang Garuda):

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan penanganan genangan banjir di Jl. Taman Mini 1 (Simpang Garuda) melalui rehabilitasi dan pengurasan saluran Phb. Garuda.

4. Jl. Industri/Industri 1:

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan penanganan genangan banjir dengan melakukan pengurasan saluran di Jl. Industri dan normalisasi saluran sepanjang 98 meter pada Jl. Industri XI Jakarta Pusat.

5. Jl. Balai Pustaka:

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Timur melakukan normalisasi saluran dan pemasangan *U Ditch* sepanjang 600 meter.

6. Jl. Plumpang Semper:

Dinas Sumber Daya Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara menangani genangan banjir pada Jl. Plumpang Semper dengan melakukan pembersihan secara rutin tali-tali air pada lokasi titik genangan.

Penanganan Genangan Tahun 2020

1. Jl. Boulevard Barat:

Pada Tahun 2020, Dinas Sumber Daya Air telah telah menangani titik genangan banjir pada lokasi Jalan Boulevard Barat, Jakarta Utara yang dilakukan melalui kegiatan pembangunan saluran precast yang menghubungkan titik/lokasi yang sering dilaporkan terjadinya genangan sampai pada Saluran Penghubung (PHB) BGR sepanjang 230 Meter dengan bekerja sama antara pasukan biru Dinas Sumber Daya Air dengan pihak kontraktor jalan tol Kelapa Gading-Pulogebang.

Penanganan genangan Tahun 2021


1. Jl. D.I. Panjaitan (Penyelesaian) dan Perencanaan penanganan genangan banjir pada Lokasi Kel. Petogogan dan Jl. Mangga Dua Raya







Penanganan titik genangan banjir dilakukan melalui pembangunan sistem drainase (saluran crossing) dan sumur resapan di kawasan Jl. D.I. Panjaitan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Penanganan Titik genangan Banjir Tahun 2021 (Pembangunan *Crossing* Saluran)

No	Kegiatan	Progress	Gambar
1	Pekerjaan Pembuatan Kolam Olak Sebrang Apartemen Patria Park Kec. Makasar seluas 118,99 m ²	100%	
2	Pekerjaan Saluran Crossing Jl DI Panjaitan Segmen I (di depan kantor Unit P4 Dinas Sumber Daya Air) sepanjang 39 meter	100%	
3	Pekerjaan Saluran Crossing Jl D.I. Panjaitan Segmen II (depan IBN s.d Cimory) sepanjang 68 meter	100%	

Tabel 3.7 Penanganan Titik genangan Banjir Tahun 2021 (Pembangunan Sumur Resapan)

No	Lokasi	Jumlah Titik	Diameter (m)	Kedalaman (m)	Progress (%)	Gambar
1	JL. DI. Panjaitan Sisi Barat	2	1	17	100%	

No	Lokasi	Jumlah Titik	Diameter (m)	Kedalaman (m)	Progress (%)	Gambar
			1	20	100%	
2	JL. DI. Panjaitan Sisi Barat Kel. Cipinang Cempedak	10	1	20	100%	
			1	20	100%	
			1	20	100%	
			1	20	100%	
			1	20	100%	

No	Lokasi	Jumlah Titik	Diameter (m)	Kedalaman (m)	Progress (%)	Gambar
			1	20	100%	
			1	20	100%	
			1	20	100%	
			1	20	100%	
			1	20	100%	

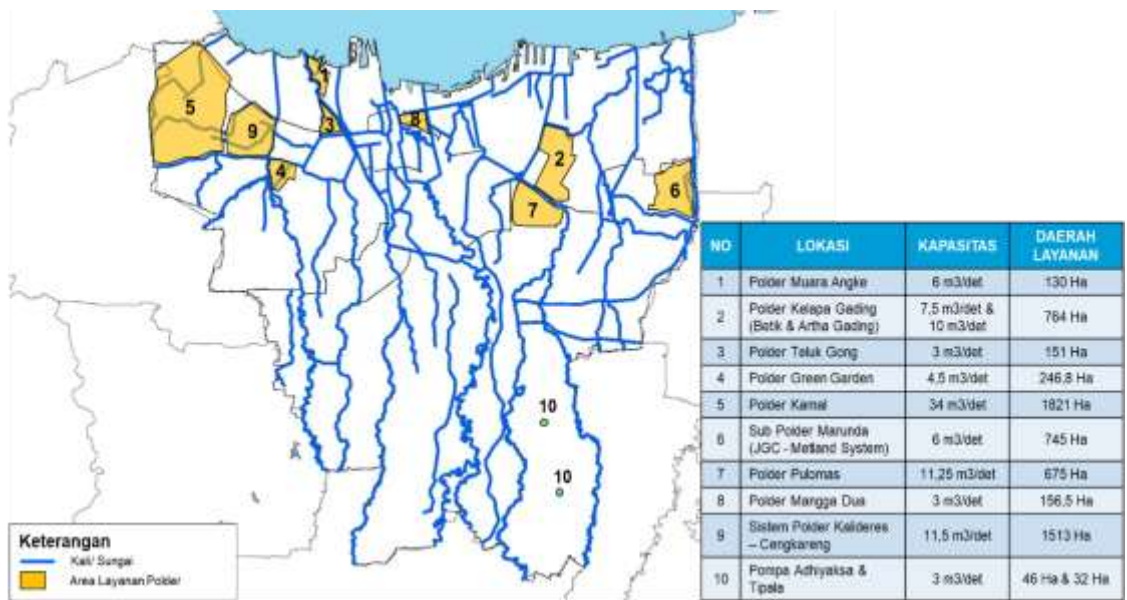
Dinas Sumber Daya Air pada Tahun 2021 juga memulai perencanaan penanganan 2 titik genangan banjir yang targetnya ditetapkan pada Tahun 2022 berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022, yakni pada lokasi Kel. Petogogan (akan ditangani melalui pembangunan Waduk Brigif), dan lokasi Jl. Mangga Dua Raya (akan ditangani melalui pembangunan Polder Manga Dua). Pembangunan Waduk Brigif dan Polder Manga Dua dilakukan dengan menggunakan skema *multiyears (design & build,*

Progresnya per tanggal 31 Desember 2021 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design & build*) pada tanggal 3 November 2021.

Gambaran perencanaan Waduk Brigif dan Polder Mangga Dua ditunjukkan pada **Gambar 3.2** sebagai berikut:



(a)



(b)

Gambar 3.2 Perencanaan Penanganan Titik Genangan pada Lokasi (a) Kel. Petogogan melalui Pembangunan Waduk Brigif dan (b) Jl. Mangga Dua Raya melalui Pembangunan Polder Mangga Dua

Berdasarkan uraian kronologi penanganan titik genangan banjir diatas, penanganan titik genangan banjir yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air selama Tahun 2018 s.d. 2021 tercatat sebanyak 12 Titik. Jika dibandingkan dengan target RPJMD yakni 15 Titik,

maka sisa titik genangan yang belum tertangani ada sebanyak 3 titik. Angka realisasi tersebut lebih rendah dari target yang tercantum pada Rancangan Awal Perubahan RPJMD yakni jumlah titik yang tersisa pada Tahun 2021 ada sebanyak 5 titik.

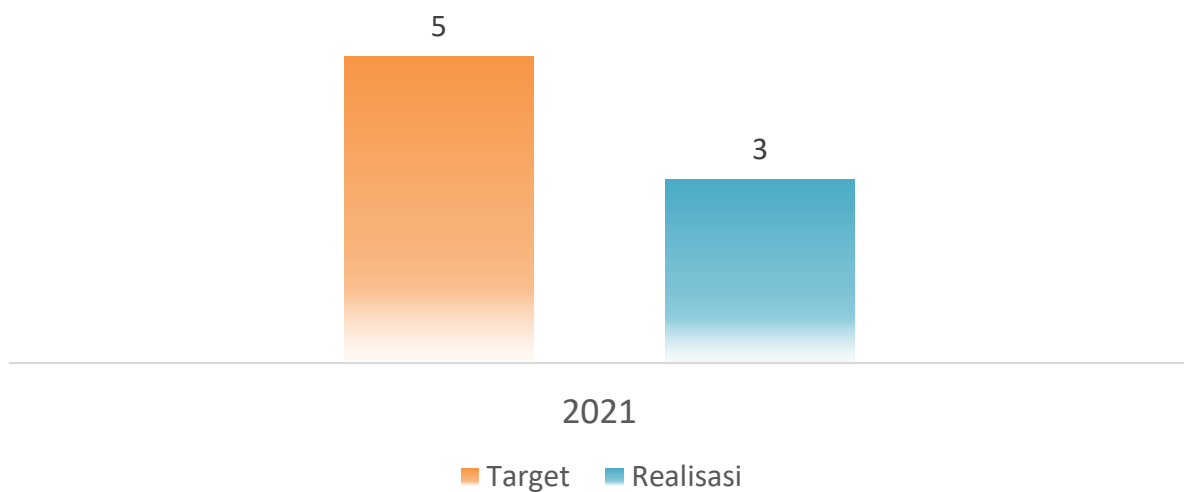
Selanjutnya capaian dihitung dengan menggunakan formulasi *minimize* yang dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU 2} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKU 2} = \left[1 + \left(1 - \frac{3}{5} \right) \right] \times 100\%$$

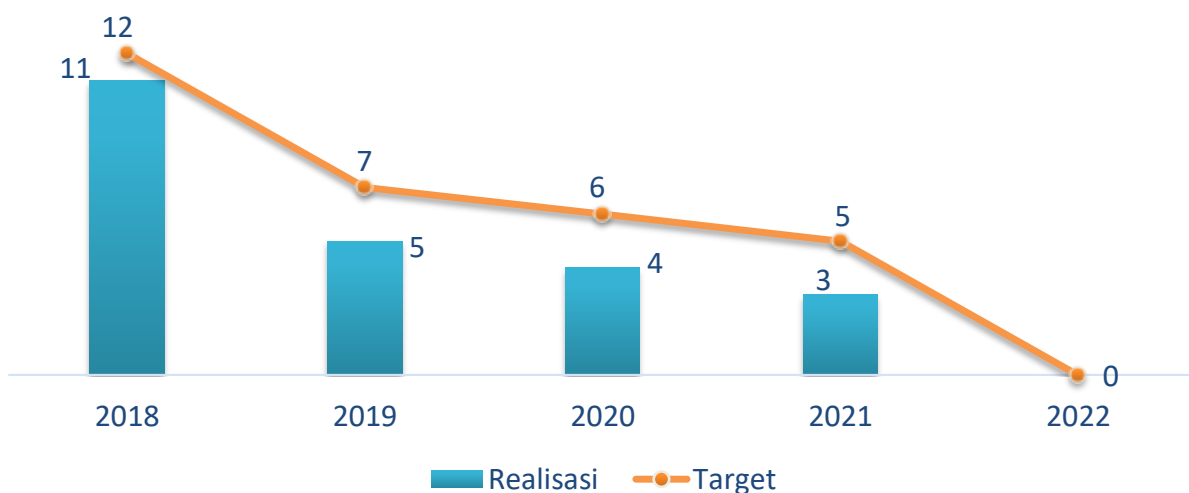
$$\text{Capaian IKU 2} = [1,4] \times 100\% = 140\%$$

Sesuai ketentuan, digunakan capaian maksimum yakni 100%.



Gambar 3.3 Realisasi dan Target IKU 2 Tahun 2021

Perbandingan capaian IKU 2 dengan tahun sebelumnya dengan target bersasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022 adalah sebagai berikut:



Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian (%)	108,33%	128,57%	133,33%	140,00%	-

Gambar 3.4 Perbandingan capaian IKU 2 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan **Gambar 3.4** diatas, terlihat bahwa capaian IKU 2 Meningkatnya Fungsi dan Pengelolaan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Abrasi dengan indikator Jumlah Titik Genangan Banjir tersebut meningkat setiap tahunnya dengan nilai capaian $108,33\% \leq \text{Capaian} \leq 140\%$. Jika mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, capaian IKU 2 pertahun memiliki interpretasi “*Sangat Tinggi*”.

Secara spesifik, Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung IKU 2 ditunjukkan pada **Tabel 3.9** sebagai berikut:

Tabel 3.8 Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung IKU 2

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Lokasi Jl. D.I. Panjaitan				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	121.577.816.238	116.050.819.245	95,45%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	121.577.816.238	116.050.819.245	95,45%
1	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	47.966.253.848	47.113.799.748	98,22%
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	73.611.562.390	68.937.019.497	93,65%
Lokasi Kel. Petogogan dan Jl. Mangga Dua (Target Tahun 2022 yang sudah dimulai pekerjaannya pada Tahun 2021)				
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	107.845.415.743	24.129.676.277	22,37%
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	107.845.415.743	24.129.676.277	22,37%

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	58.257.765.408	22.540.000.277	38,69%
2	Pembangunan Sistem Pompa dan Kelengkapannya	49.587.650.335	1.589.676.000	3,21%

Berdasarkan **Tabel 3.8** diatas, terdapat efisiensi anggaran dalam pelaksanaan penanganan titik genangan banjir Tahun 2021 (pada lokasi Jl. D.I. Panjaitan) yaitu sebesar Rp. 5.526.996.993 (4,55%) dikarenakan optimalnya anggaran yang telah digunakan sehingga capaian sudah melebihi target yang ditetapkan.

Faktor-faktor yang mendorong penuntasan target penanganan titik genangan banjir Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Untuk penanganan titik genangan banjir pada lokasi Jl. D.I Panjaitan, didukung oleh satgas dengan jumlah yang memadai.
2. Untuk penanganan titik genangan banjir pada kawasan Kel. Petogogan dan Jl. Mangga Dua Raya melalui pembangunan Waduk Brigif dan Polder Mangga Dua, melalui skema *multiyears*, pelaksanaannya menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kegiatan ini juga menjadi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang tercantum pada KSD 23, dengan nama rencana aksi Pembangunan Waduk Brigif dan Waduk Lebak Bulus Beserta Kelengkapannya dan Pembangunan/ Revitalisasi Polder Muara Angke, Teluk Gong dan Mangga Dua.

IKU 3: Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan dengan indikator Cakupan Pelayanan Air Bersih

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan terhadap target IKU 3 ini dilakukan dengan menggabungkan data capaian jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan perpipaan PD PAM Jaya dengan jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan perpipaan SWRO dan IPA RO Dinas Sumber Daya Air dibagi dengan total jumlah penduduk DKI Jakarta Tahun 2021.

Rincian perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan PDAM: 7.001.915 jiwa (Sumber data PD. PAM JAYA)

2. Jumlah penduduk yang terlayani oleh IPA RO (bukan perpipaan) di Kepulauan Seribu: 4.721 jiwa, dengan rincian:

Tabel 3.9 Jumlah penduduk yang Terlayani oleh IPA RO (bukan perpipaan) di Kepulauan Seribu

No.	Lokasi	Total Volume (l)	Penduduk Terlayani (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Pramuka	1.658.344	250
2	Pulau Panggang	1.220.160	320
3	Pulau Kelapa	690.000	364
4	Pulau Kelapa Dua	214.000	120
5	Pulau Harapan	905.000	539
6	Pulau Pari	1.240.900	300
7	Pulau Lancang	531.300	710
8	Pulau Tidung	417.000	565
9	Pulau Untung Jawa	1.658.344	332
10	Pulau Karya	501.731	530
11	Pulau Sabira	445.800	341
12	Rt. 09 Rw. 01 Kel. Kamal Muara	0	0
13	Rt. 01 Rw. 02 Kel. Marunda	27.000	200
14	Rt. 01 Rw. 04 Kel. Kalibaru	398.000	150
15	Rawa Kompeni	0	0
16	Rawa Melati	0	0
Jumlah		9.907.579	4.721

3. Berdasarkan uraian di atas, jumlah total penduduk di Provinsi DKI Jakarta yang terlayani air bersih sebesar $7.001.915 + 4.721 = 7.006.636$ jiwa penduduk dan target proyeksi jumlah penduduk tahun 2021 menggunakan data proyeksi sensus BPS Tahun 2010 yakni sebesar 10.729.100 jiwa.
4. Target Cakupan Pelayanan Air Bersih sesuai Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022 adalah sebesar 63,65%.
5. Realisasi diperoleh dengan cara membandingkan jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terlayani layanan air bersih melalui perpipaan Tahun 2021 dengan proyeksi jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 menggunakan data proyeksi sensus BPS Tahun 2010. Perhitungannya ditunjukkan sebagai berikut:

Realisasi IKU 3

$$= \frac{\text{jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terlayani air bersih}}{\text{proyeksi penduduk DKI Jakarta Tahun 2021}} \times 100\%$$

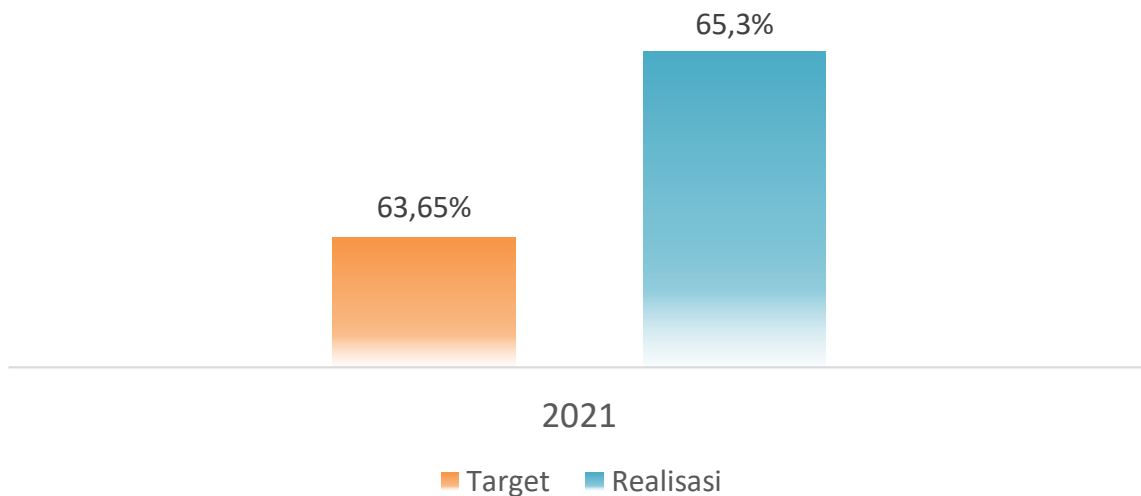
$$\text{Realisasi IKU 3} = \frac{7.001.915}{10.729.100} \times 100\% = 65,30\%$$

6. Capaian dihitung dengan menggunakan formulas *maximize* yang diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU 3} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

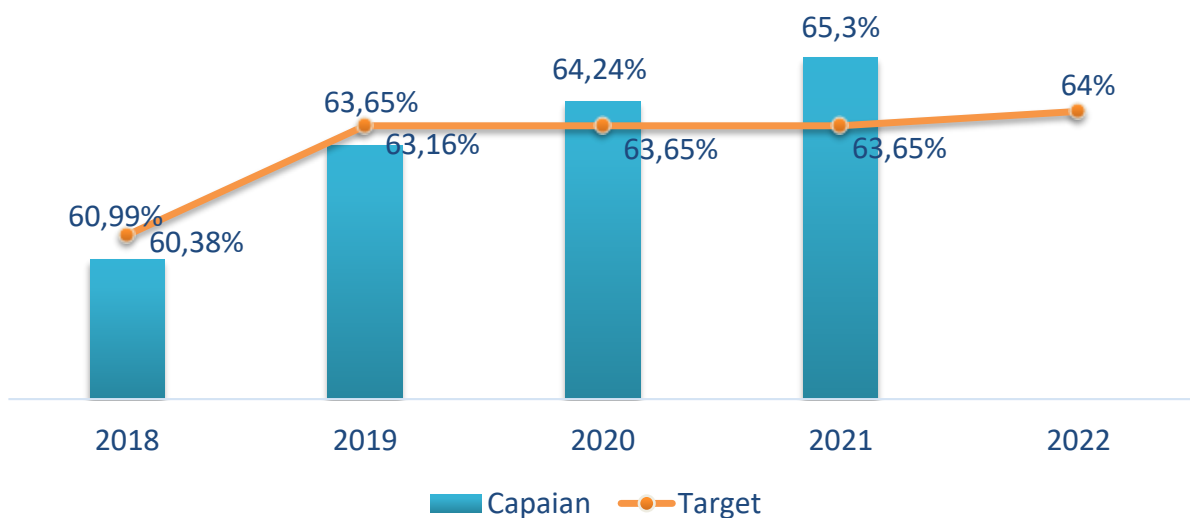
$$\text{Capaian IKU 3} = \frac{65,30\%}{63,65\%} \times 100\% = 102,59\%$$

Sesuai ketentuan, digunakan capaian maksimum yakni 100%.



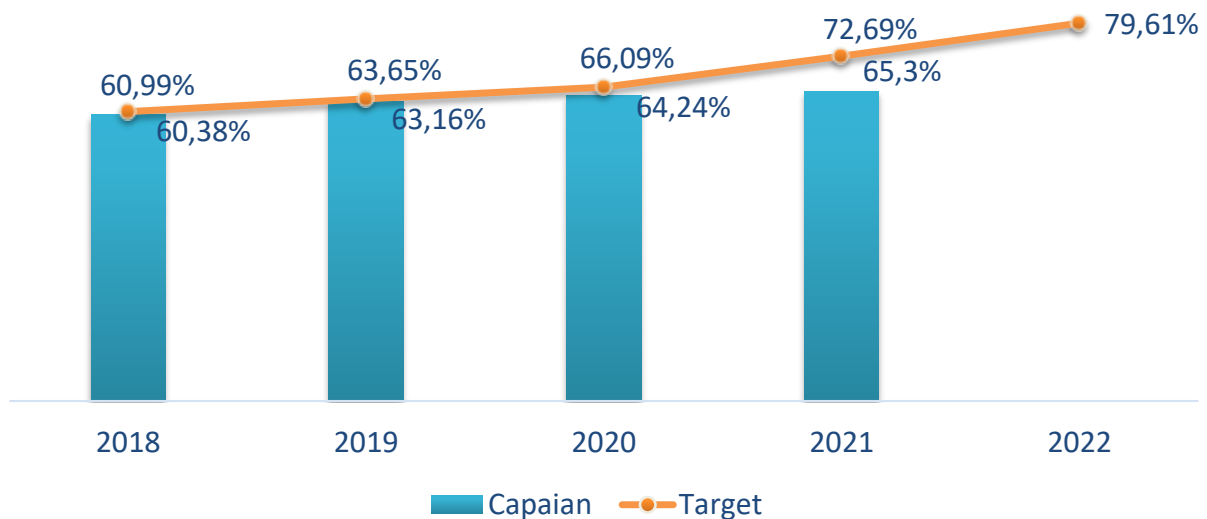
Gambar 3.5 Realisasi dan Target IKU 3 Tahun 2021 Sesuai Target Berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022

Perbandingan capaian IKU 3 dengan tahun sebelumnya dengan target bersasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022 dan RPJMD 2017-2022 adalah sebagai berikut:



Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian	99,00%	99,23%	100,93%	102,59%	-

Gambar 3.6 Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya dengan Target berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022



Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian	99,00%	99,23%	97,20%	89,83%	-




Gambar 3.7 Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya dengan Target berdasarkan RPJMD 2017-2022

Berdasarkan **Gambar 3.6** dan **Gambar 3.7** diatas, terlihat bahwa capaian IKU 3 jika dibandingkan dengan target Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022 meningkat setiap tahunnya dengan intepretasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ada pada kategori Sangat Tinggi dan terjadi setiap tahunnya.

Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD 2017-2022, terjadi *trend* penurunan capaian yang dimulai pada Tahun 2020, meskipun ada kenaikan realisasi per tahunnya. Capaian pada Tahun 2021 sebesar 89,83% memiliki katogori “Tinggi” menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dalam rangka penuntasan dengan IKU 3 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dalam rangka penuntasan dengan IKU 3

No	Pembangunan yang dilaksanakan	Jumlah	Gambar	Keterangan
1	Pembangunan IPA Sebira	1 Unit		- Kapasitas 1,5 liter/detik.
2	Pembangunan IPA Sunter Selatan	1 Unit		- Kapasitas 5 liter/detik.
3	Pembangunan IPA Setu Babakan	1 Unit		- Kapasitas 30 liter/detik.

No	Pembangunan yang dilaksanakan	Jumlah	Gambar	Keterangan
4	Pembangunan Kios Air	10 Unit		<ul style="list-style-type: none"> - Kel. Pademangan Barat (Kapasitas 10 m³) - Kel. Rawa Buaya (Kapasitas 10 m³) - Kel. Kembangan Utara (Kapasitas 10 m³) - Kel. Meruya Utara (Kapasitas 10 m³) - Kel. Meruya Selatan (Kapasitas 10 m³) - Kel. Srengseng (Kapasitas 10 m³) - Kel. Pademangan Timur (Kapasitas 5 m³) - Kel. Joglo (Kapasitas 5 m³) - Kel. Kembangan Selatan (Kapasitas 5 m³) - Kel. Kedaung Kaliangke (Kapasitas 2 m³)
5	Penyediaan IPA Mobile	5 Unit		Kapasitas 0,5 liter/detik
6	Penyediaan Mobil Tangki	12 Unit		Kapasitas 4000 liter

Percepatan dari pelaksanaan IKU ini ditetapkan dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 21 (Rencana aksi: Pembangunan IPA Stasioner/Jaringan Perpipaan di Kawasan Krisis Air Bersih dan Penyediaan IPA Mobile di Lokasi Titik-Titik Krisis Air) dan KSD 52 (Rencana Aksi: Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Sebira). Secara spesifik, Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung IKU 3 ditunjukkan pada **Tabel 3.11** sebagai berikut:

Tabel 3.11 Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung IKU 3

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	85.538.000.698	37.756.304.382	44,14%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	85.538.000.698	37.756.304.382	44,14%
1	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	85.538.000.698	37.756.304.382	44,14%

Berdasarkan **Tabel 3.11** diatas, capaian penyerapan anggaran pada Program/Kegiatan/Subkegiatan penunjang IKU 3 terbilang rendah yang disebabkan karena:

1. Awalnya anggaran yang tersedia direncanakan untuk melaksanakan pembangunan IPA Stasioner pada 5 lokasi yaitu pada lokasi IPA Pulau Sebira, dan IPA pada daerah krisis air (IPA Waduk Sunter Selatan, IPA Waduk Setu Babakan, IPA Rusunawa Lokbin Rawa Buaya dan Flamboyan), serta penyediaan 10 Unit IPA *mobile*.
2. Terkait pembangunan IPA Stasioner hanya dapat terealisasi pada 3 lokasi yakni:
 - IPA Sunter Selatan: progress saat ini telah terselesaikan 100%;
 - IPA Sebira: Progress 76,64%, Pekerjaan dilanjutkan pada sampai dengan 3 Februari 2022, terkendala pengiriman pompa dari luar negeri karena pandemi COVID-19.
 - IPA Waduk Situ Babakan: Progress 42,99%, Pekerjaan dilanjutkan pada sampai 3 Februari 2022. Terkendala adanya pemindahan lokasi sehingga diperlukan reviu terhadap lokasi pembangunan baru.
1. Untuk pembangunan IPA pada Rusunawa Lokbin Rawa Buaya dan Flamboyan tidak jadi dilakukan pembangunan pada 2 lokasi tersebut dikarenakan sudah adanya pelayanan air oleh PD PAM Jaya pada lokasi tersebut.
2. Terkait dengan penyediaan 10 Unit IPA *mobile*, hanya dapat tersedia 5 Unit IPA *mobile* dikarenakan terkendala proses pembukaan akses e-katalog yang memakan waktu yang cukup lama.

IKU 4: Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan dengan indikator Cakupan Pelayanan Air Limbah

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan terhadap target IKU 4 ini dilakukan dengan menggabungkan data capaian jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan limbah perpipaan dan non-perpipaan PD PAM Jaya dan Dinas Sumber Daya dibagi dengan total jumlah penduduk DKI Jakarta Tahun 2021. Rincian perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data PD PAL Jaya, jumlah penduduk yang terlayani oleh pelayanan PD. PAL Jaya Tahun 2021 adalah sebesar 1.779.565 orang yang terdiri atas PE Zona 0 (perpipaan) sebanyak 1.450.934 orang dan PE Layanan Desludging (PE/3) (non-perpipaan) sebanyak 328,631 orang. (Untuk layanan PE Layanan Desludging (PE/3) (non-perpipaan), PD PAL Jaya melaporkan sebanyak 985.893 jiwa. Dinas Sumber Daya Air mengkonversi data tersebut menjadi 328.631 jiwa dengan membagi angka PD PAL Jaya dengan 3 dengan alasan pelaksanaan *desludging* 1 rumah tangga dilaksanakan 3 tahun sekali)
2. Realisasi IPAL yang dibangun pemerintah s.d. tahun 2021 tercatat sebanyak 171.895 penduduk dengan rincian:

Tabel 3.12 Rincian Realisasi IPAL Pemerintah Tahun 2021

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)
1	Total Capaian TA 2020	144.773
2	Kegiatan TA 2021	27.122
	Pembangunan dan Peningkatan SPALD-T Skala Permukiman	12.628
	Peningkatan SR SPALD-T Skala Permukiman	480
	Pembangunan SPALD-S DSDA	454
	Pembangunan SPALD-S PD PAL Jaya (Subsidi RTS)	7.160
	Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman Sudin DSDA P.1000	2.915
	Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman KemenPUPR	3.485
Total Capaian IPAL yang dibangun oleh pemerintah (1) + (2)		171.895

3. Realisasi jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan limbah perpipaan dan non-perpipaan PD PAM Jaya dan Dinas Sumber Daya Air diperoleh dengan menjumlah

data jumlah penduduk yang terlayani jaringan perpipaan PD. PAL Jaya dan Capaian IPAL pemerintah Tahun 2021 dan menghasilkan angka sebesar 1.951.460 orang.

4. Target proyeksi jumlah penduduk tahun 2021 menggunakan data proyeksi sensus BPS Tahun 2010 yakni sebesar 10.729.100 jiwa.
5. Persentase Realisasi diperoleh dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan limbah perpipaan dan non-perpipaan PD PAM Jaya dan Dinas Sumber Daya Air dengan proyeksi jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 menggunakan data proyeksi sensus BPS Tahun 2010. Perhitungannya ditunjukkan sebagai berikut:

Realisasi IKU 4

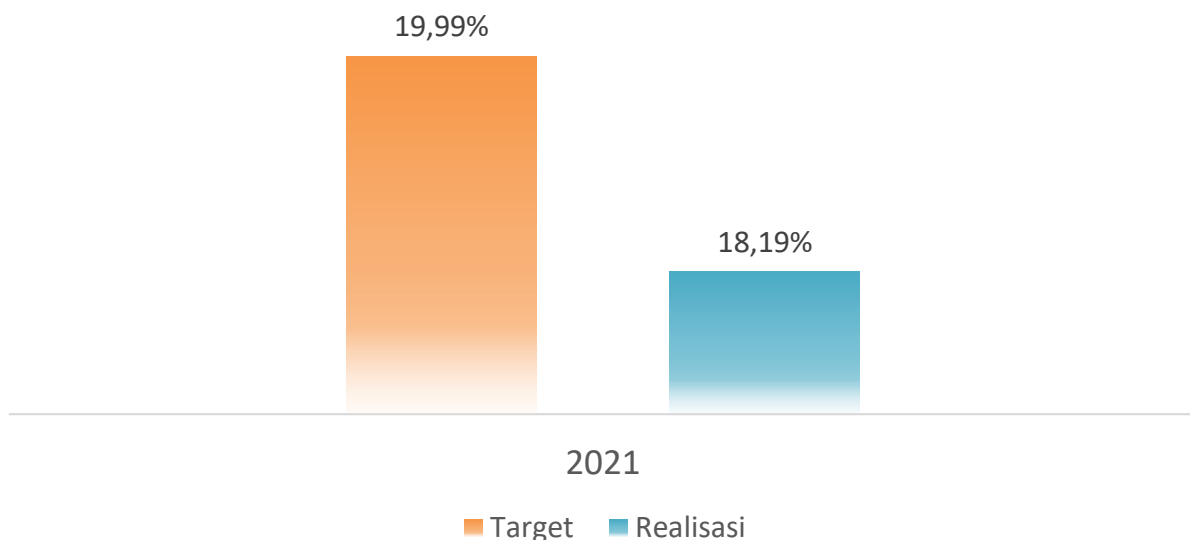
$$= \frac{\text{jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terlayani limbah}}{\text{proyeksi penduduk DKI Jakarta Tahun 2021}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi IKU 4} = \frac{1.951.460}{10.729.100} \times 100\% = 18,19\%$$

6. Target cakupan pelayanan air limbah sesuai Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022 adalah sebesar 19,99%.
7. Capaian dihitung dengan menggunakan formulas *maximize* yang diuraikan sebagai berikut:

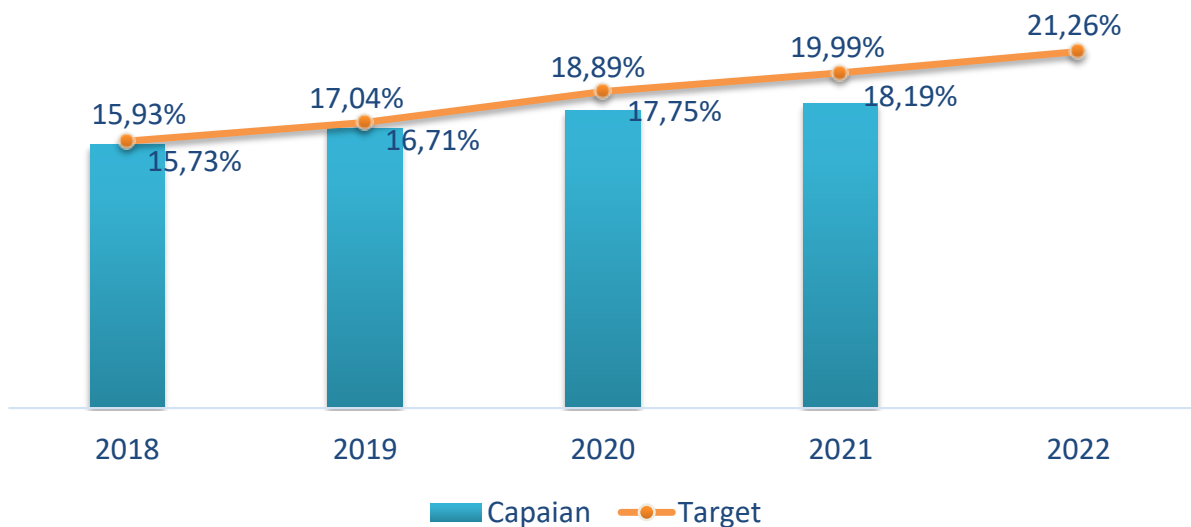
$$\text{Capaian IKU 4} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKU 4} = \frac{18,19\%}{19,99\%} \times 100\% = 91\%$$



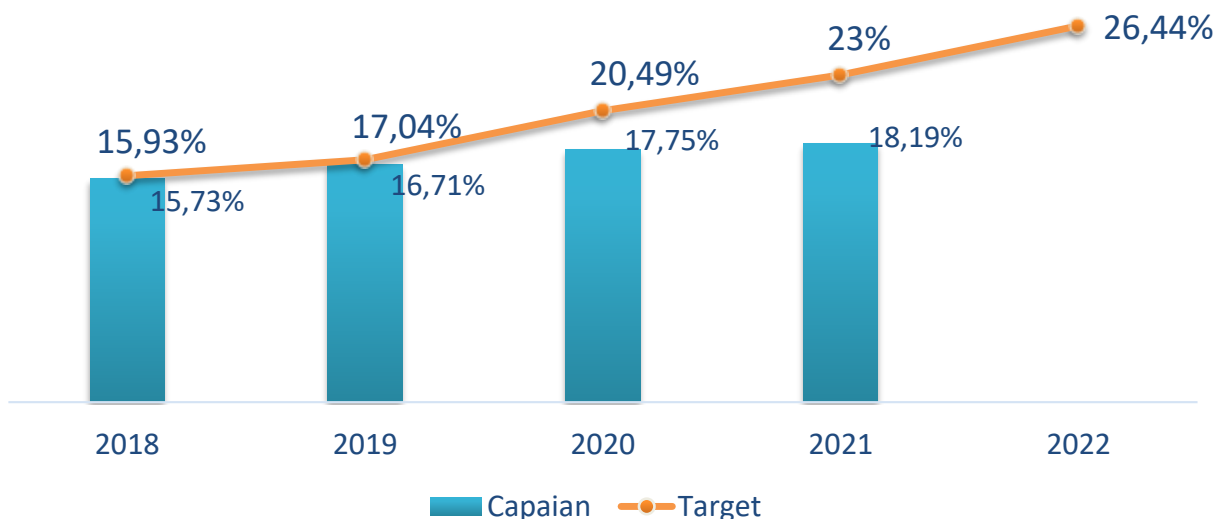
Gambar 3.8 Realisasi dan Target IKU 4 Tahun 2021 Sesuai Target Berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022

Perbandingan capaian IKU 4 dengan tahun sebelumnya dengan target bersasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022 dan RPJMD 2017-2022 adalah sebagai berikut:



Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian	98,74%	98,06%	93,97%	91,00%	-

Gambar 3.9 Perbandingan Capaian IKU 4 Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya dengan Target berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022



Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian	98,74%	98,06%	86,63%	79,09%	-

Gambar 3.10 Perbandingan Capaian IKU 4 Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya dengan Target berdasarkan RPJMD 2017-2022





Berdasarkan **Gambar 3.9** dan **Gambar 3.10** diatas, terlihat bahwa capaian IKU 4 jika dibandingkan dengan target Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022 meningkat setiap tahunnya dengan intepretasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ada pada kategori Sangat Tinggi dan terjadi setiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD 2017-2022, terjadi *trend* penurunan capaian, meskipun ada kenaikan realisasi per tahunnya. Capaian pada Tahun 2021

dengan nilai sebesar 91% memiliki katogori “Tinggi” menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dalam rangka penuntasan dengan IKU 4 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dalam rangka penuntasan dengan IKU 4

No	Kegiatan	Kapasitas	Jumlah Sambungan Rumah	Keterangan/Gambar
Kegiatan Pembangunan SPALD				
1	SPALDT Lahan Sekitar RPTRA Kembangan, Jakarta Barat	100 m ³ /hari	46 SR	
2	SPALDT Lahan Sekitar RPTRA Waru Timbul, Jakarta Selatan	100 m ³ /hari	58	
3	SPALDT Sasana Krida Karang Taruna Lenteng Agung, Jakarta Selatan	100 m ³ /hari	97	
4	SPALDT Belakang RPTRA Kampung Indah Lestari, Jakarta Utara	100 m ³ /hari	30	
5	SPALDT Rumah Pompa Sunter Timur 3 Rawa Badak, Jakarta Utara	100 m ³ /hari	30	

No	Kegiatan	Kapasitas	Jumlah Sambungan Rumah	Keterangan/Gambar
6	SPALDT Lahan Sekitar RPTRA Rawa Badak, Jakarta Utara	100 m ³ /hari	65	
7	SPALDT RTH Pedaangan, Jakarta Timur	100 m ³ /hari	33	
8	SPALD <i>Interceptor</i> Waduk Kampung Rambutan, Jakarta Timur	500 m ³ /hari	- (<i>Interceptor</i>)	
9	SPALD <i>Interceptor</i> Sentra Primer Barat, Jakarta Barat	3.000 m ³ /hari	- (<i>Interceptor</i>)	Pekerjaan akan direncanakan untuk dilanjutkan pada Tahun 2022, progress per 31 Desember 2021 sebesar 26,11%.
10	SPALDT Taman Jagakarsa, Jakarta Selatan	100 m ³ /hari	-	Pekerjaan akan direncanakan untuk dilanjutkan pada Tahun 2022, progress per 31 Desember 2021 sebesar 26,11%.
11	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pulau Kelapa Zona 1	350 m ³ /hari	Rencana 300 SR	

No	Kegiatan	Kapasitas	Jumlah Sambungan Rumah	Keterangan/Gambar
12	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pulau Kelapa Zona 2	350 m ³ /hari	Rencana 280 SR	
Kegiatan Revitalisasi Tangki Septik				
1	Revitalisasi tangki septik di Provinsi DKI Jakarta	1432 Titik	-	

Percepatan dari pelaksanaan IKU 4 ini ditetapkan dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 22 (Rencana Aksi: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Provinsi DKI Jakarta dan Revitalisasi Tangki Septik - Verifikasi Calon Penerima Subsidi Revitalisasi Tangki Septik) dan KSD 52 (Rencana Aksi: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pulau Kelapa Zona 1 dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pulau Kelapa Zona 2). Secara spesifik, Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung IKU 4 ditunjukkan pada **Tabel 3.14** sebagai berikut:

Tabel 3.14 Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung IKU 4

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	110.696.475.994	92.643.515.217	83,69%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.696.475.994	92.643.515.217	83,69%
1	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	18.000.000.000	13.561.763.609	75,34%
2	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah	25.164.683.845	18.169.903.208	72,20%

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Domestik Terpusat Skala Permukiman			
3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	36.439.221.949	30.074.260.700	82,53%
4	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	31.092.570.200	30.837.587.700	99,18%

Berdasarkan **Tabel 3.14** diatas. capaian penyerapan anggaran pada Program/Kegiatan/Subkegiatan penunjang IKU 4 terbilang tinggi. Faktor yang mendukung penuntasan terhadap target IKU 4 ini dikarenakan Mayoritas SPALD pada total 12 Lokasi terbangun tepat waktu, hanya 2 SPALD yang pelaksanaannya dilanjutkan pada Tahun 2022 yaitu SPALD di lokasi Taman Jagakarsa dikarenakan adanya penolakan masyarakat dan SPALD di lokasi Saluran PHB Sentra Primer Barat dikarenakan membutuhkan waktu tambahan untuk mengakomodasi pembangunan pintu air untuk rekayasa saluran.

IKU 5: Melambatnya penurunan permukaan tanah dengan Indikator Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (*Land Subsidence*)

Berdasarkan definisi operasionalnya, realisasi dari IKU 5 ini diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata penurunan tanah berdasarkan titik pengukuran tanah yang telah ditetapkan dengan menggunakan pengukuran GPS Geodetik.

Dalam perhitungan realisasinya, digunakan data yang diperoleh berdasarkan kerjasama antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan (FITB) Institut Teknologi Bandung pada 172 lokasi dengan hasil pengukuran menggunakan Metode GPS Geodetik menghasilkan angka penurunan permukaan tanah di Provinsi DKI Jakarta berkisar antara 0 s.d. 9 cm sebagai berikut:

Tabel 3.15 Data Perhitungan Penurunan Permukaan Tanah

No	Lokasi	EASTING (m)	NORTHING (m)	H Ellipsoid (m)	RATE/LAJU PER TAHUN 2021 (m)
1	Basuki Rahmat	707450.315	9312413.637	42.329	-0.025
2	Pluit-Waduk Pluit	698548.577	9323100.844	19.551	-0.045
3	Jalan Kelapa Hijau	710540.557	9297470.828	87.253	-0.005

No	Lokasi	EASTING (m)	NORTHING (m)	H Ellipsoid (m)	RATE/LAJU PER TAHUN 2021 (m)
4	Jalan Setu Cipayung	710337.418	9300148.007	61.917	0.000
5	Jalan Pluit Selatan Raya	698346.857	9322610.569	17.711	-0.040
6	TB Simatupang	703174.608	9303066.710	64.003	-0.010
7	Danau Sunter Barat	705281.702	9322039.058	21.805	-0.040
8	Rorotan Marunda	715661.925	9318941.896	29.980	-0.040
9	Perintis Kemerdekaan	708011.463	9318047.881	27.378	-0.035
10	TB Simatupang	705419.140	9302985.460	58.242	0.000
11	Meruya Barat	690888.170	9315266.047	32.055	-0.058
12	Ancol Baru	701906.430	9322898.654	18.986	-0.040
13	Aston Ancol	702443.950	9322019.489	23.068	-0.040
14	Sudirman Thamrin	701726.374	9314342.290	24.644	-0.030
15	Sudirman Thamrin	700557.653	9312089.070	36.888	-0.030
16	Tanjungan Kamal	691035.879	9324633.336	26.716	-0.060
17	Tanjung Priok	707375.369	9323906.053	24.568	-0.035
18	Pondok Ranggong	711749.363	9297955.815	77.813	-0.020
19	Taman Langsung	698401.136	9309313.219	32.824	-0.010
20	Situ Babakan	702031.174	9299010.270	70.255	0.000
21	Cengkareng Barat	689721.921	9325635.101	21.500	-0.080
22	Condet	704942.838	9302929.583	53.394	0.000
23	Cibubur	708061.369	9297572.127	76.906	0.000
24	Cinere	697052.874	9301893.503	67.645	-0.025
25	Cikini	702845.909	9315645.529	27.583	-0.038
26	Cempaka Mas	707342.621	9317980.835	26.996	-0.038
27	Rawa Buaya	690736.087	9318876.693	22.647	-0.068
28	Rorotan Marunda	716345.356	9321510.120	23.525	-0.030
29	Cilincing Raya	712399.180	9324438.311	23.737	-0.030
30	Jalan H Samanhudi	703123.592	9318773.381	24.367	-0.030
31	Meruya Utara	690886.679	9315267.031	24.826	-0.060
32	Tubagus Angke	696732.601	9320521.701	16.915	-0.045
33	Jalan Moh Saidi Ciledug	694422.323	9310189.462	44.604	-0.040
34	Jalan Wiryopranoto Pecenongan	701982.897	9318627.941	23.189	-0.033
35	Kramat Jaya Raya	712141.023	9322738.867	23.089	-0.030
36	Danau Sunter Utara	709188.827	9320703.077	18.825	-0.035
37	Pondok Indah	696927.740	9305495.777	47.752	-0.025
38	Daan Mogot	691561.693	9319360.971	16.951	-0.050
39	Jalan Raya Jogjlo	693075.459	9312327.828	34.669	-0.050
40	Daan Mogot	689718.013	9319329.300	27.419	-0.045
41	Jalan RC Veteran	695473.242	9307487.218	51.559	-0.040

No	Lokasi	EASTING (m)	NORTHING (m)	H Ellipsoid (m)	RATE/LAJU PER TAHUN 2021 (m)
42	Jalan HBR Motik	704088.859	9319368.831	24.992	-0.030
43	Pantai Mutiara	698780.216	9324348.584	19.145	-0.075
44	Ancol Barat VI	701651.445	9323097.417	23.621	-0.043
45	Daan Mogot	688151.730	9318998.856	28.153	-0.045
46	Kaliangke	693715.370	9320639.395	24.711	-0.030
47	Jalan Pluit Raya Barat	697428.876	9323058.430	22.097	-0.045
48	Jalan Taman Palem Lestari	691362.125	9321048.208	23.182	-0.043
49	Daan Mogot	693383.060	9319289.503	26.038	-0.043
50	Muara Angke	695892.294	9324644.219	19.155	-0.090
51	Arteri Kelapa Gading	711986.215	9317741.967	22.589	-0.033
52	Kawasan Wisata Ancol	705829.231	9323455.639	22.184	-0.040
53	Jalan Tentara Pelajar	699207.435	9313812.663	35.670	-0.033
54	Kawasan Wisata Ancol	702813.747	9322420.027	20.666	-0.030
55	Kawasan Wisata Ancol	705146.294	9323303.229	19.213	-0.040
56	Waduk Pluit Selatan	698631.955	9323380.482	20.768	-0.043
57	Pos Pengumben Kebayoran Lama	696611.235	9312579.740	36.863	-0.040
58	Jalan Satu Maret Kelapa Gading	688452.502	9322691.419	22.885	-0.040
59	Danau Sunter Selatan	707574.728	9320322.622	26.980	-0.030
60	Pantai Indah Timur	694030.317	9321619.947	21.243	-0.040
61	Jalan Satria Latumenten	697829.926	9318051.370	24.926	-0.035
62	Jalan Bulak Sereh	687630.119	9321599.668	23.395	-0.045
63	City Resort Buloevard Cengkareng	692417.473	9321338.571	20.802	-0.045
64	Jalan Akses Marunda	715114.627	9324211.732	22.857	-0.043
65	Jalan Raya Jogjlo	694500.565	9312377.211	23.984	-0.040
66	Jalan Bekasi Timur Raya	712496.494	9316198.139	25.209	-0.018
67	Jalan Pantai Indah Barat	693728.124	9324941.955	23.889	-0.040
68	Jalan Pelabuhan Raya Tg Priok	709472.697	9324513.206	22.745	-0.038
69	Jalan raya pegangsaan dua	711845.836	9321237.763	23.583	-0.045
70	Jalan Ir H. Juanda	701975.031	9317968.733	20.946	-0.030
71	Kamal Muara	690537.743	9326076.967	22.536	-0.090
72	Jalan Veteran	702681.567	9317870.073	22.974	-0.030
73	Jalan Radin Inten II	712830.959	9312213.945	23.849	-0.038
74	Jalan Pejagalan Raya Bandengan	699942.272	9321479.868	21.544	-0.038
75	Jalan Suryo Wolter Monginsidi	700788.250	9310058.882	40.003	-0.030
76	Jalan Bugis Kebon Bawang	709004.442	9323630.454	22.177	-0.038
77	Meruya	693377.334	9314564.651	29.878	-0.053
78	Jalan Matraman	704804.918	9314065.575	29.403	-0.030

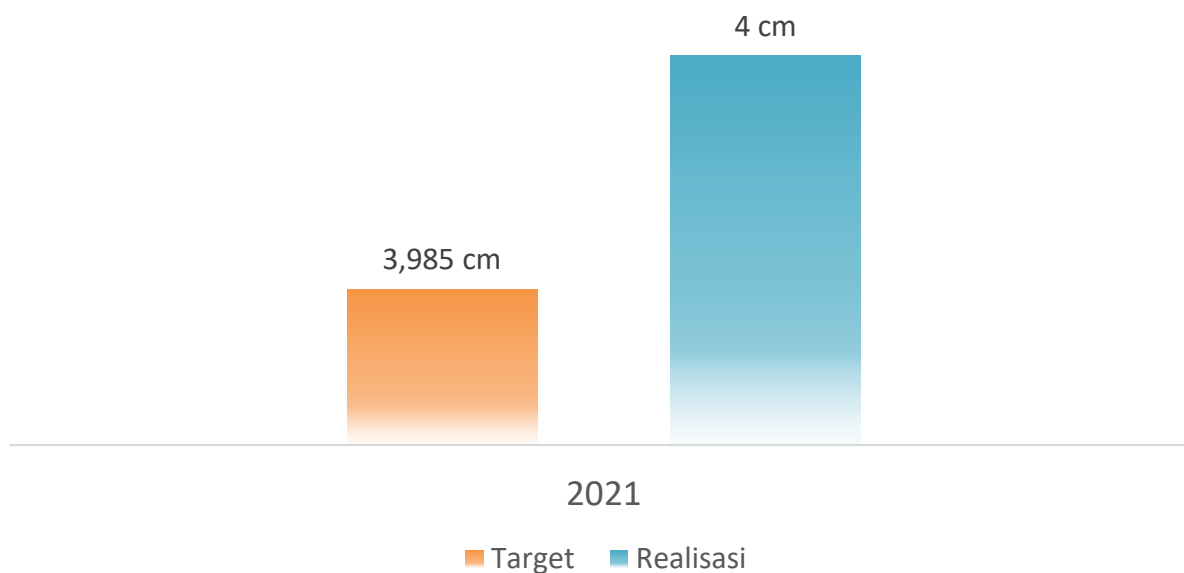
No	Lokasi	EASTING (m)	NORTHING (m)	H Ellipsoid (m)	RATE/LAJU PER TAHUN 2021 (m)
79	Jalan Benyamin Sueb	704451.067	9321251.077	22.421	-0.038
80	Jalan kembangan baru	693495.552	9318041.091	22.195	-0.055
81	Jalan waduk Pluit Selatan	699259.641	9322810.709	19.790	-0.045
82	Kawasan Wisata Ancol	704240.870	9323072.511	19.637	-0.033
83	Jalan Pemuda	710232.204	9315026.052	29.734	-0.030
84	Jalan mangga dua raya	702593.589	9321506.657	25.130	-0.025
85	Jalan Pantai Indah Utara 1	694283.381	9323092.368	20.162	-0.040
86	Jalan Raya Bogor	706940.217	9303332.734	67.173	0.000
87	Muara Baru	699793.319	9324823.814	21.519	-0.075
88	Jalan Kamal Raya	689529.399	9324384.972	20.861	-0.070
89	Pantai Indah Kapuk	692271.083	9324076.079	22.710	-0.063
90	Jalan Pulo Mas Selatan	707585.793	9316173.745	21.034	-0.033
91	Jalan Hayam Wuruk	701159.002	9319406.028	24.960	-0.030
92	Tanah Abang	701342.425	9317749.272	24.220	-0.033
93	Jalan Pantai Indah Timur	695185.331	9324393.936	19.823	-0.070
94	Jalan Cideng Timur	700379.140	9317565.757	21.953	-0.033
95	Gambir	702756.629	9316779.650	45.465	-0.035
96	Jalan Jembatan Tiga	698303.146	9321849.061	24.055	-0.040
97	Muara Baru Raya	699986.470	9323679.395	20.034	-0.055
98	Tanjungan Kamal	691379.744	9324931.695	21.782	-0.060
99	Jalan Kemanggisan Raya	697692.326	9315584.718	29.467	-0.040
100	Taman Stasiun Tanjung Priok	708301.076	9324257.515	23.262	-0.033
101	Jalan Tipar Cakung	713958.816	9318318.673	25.886	-0.035
102	Kamal Muara	689683.938	9325673.957	18.723	-0.080
103	Jalan Latuharhari	703466.938	9313726.115	34.290	-0.020
104	Taman Kota Yos Sudarso	709598.660	9322328.555	22.860	-0.035
105	Jl Inspeksi Saluran Kalimalang	707857.077	9309905.596	31.867	-0.040
106	Jalan Kemuning Raya	690111.440	9320250.716	21.820	-0.045
107	Pantai Indah Kapuk	692653.352	9324981.633	23.668	-0.050
108	Jalan Perwira Gambir	702671.069	9317435.753	24.142	-0.030
109	Salemba	704847.666	9315039.514	27.161	-0.030
110	Tugu tani	703218.350	9316372.606	26.277	-0.035
111	Jalan Pluit Raya Barat	697522.165	9323818.442	20.027	-0.045
112	Pantai Mutiara	698309.261	9324391.621	17.725	-0.060
113	Jalan Utan Jati Daan Mogot	688903.580	9320414.056	22.817	-0.055
114	Jalan Kamal Raya	688158.716	9324600.336	24.433	-0.075
115	Jalan Pantai Indah Selatan	696279.478	9322861.439	20.310	-0.040
116	Sudirman Thamrin	700991.342	9312601.946	27.966	-0.030

No	Lokasi	EASTING (m)	NORTHING (m)	H Ellipsoid (m)	RATE/LAJU PER TAHUN 2021 (m)
117	Jalan Aquarium	703674.307	9322416.796	20.878	-0.033
118	Pasar Ikan Sunda Kelapa	700264.576	9322455.668	22.667	-0.040
119	Kedoya Raya	695683.140	9315659.613	16.666	-0.040
120	RE Martadinata Ancol	701641.875	9321859.448	21.001	-0.038
121	Kawasan Wisata Ancol	702964.187	9322989.651	18.603	-0.038
122	Pluit Karang Utara	696490.291	9324250.392	17.193	-0.058
123	Pluit selatan raya	697388.104	9322631.140	15.449	-0.050
124	Jalan Panjang	695298.401	9317717.093	24.043	-0.038
125	Jalan Kapuk Kamal Raya	691981.731	9322781.061	19.602	-0.055
126	Jalan Kedoya Raya	695471.517	9318562.447	16.696	-0.043
127	Lingkar Luar Barat	691281.067	9317080.257	20.374	-0.060
128	Akses Timur Pantai Mutiara	698629.977	9324061.831	19.914	-0.060
129	Pantai Mutiara	698141.607	9325352.068	21.735	-0.075
130	Dadap	690199.809	9326959.261	19.551	-0.088
131	Gempol	705038.327	9318358.901	29.994	-0.038
132	Tanjung Priok	709312.169	9323745.657	24.588	-0.040
133	RE Martadinata Ancol	705248.238	9322377.301	21.560	-0.035
134	Pantai Mutiara	699215.323	9325056.460	19.899	-0.075
135	Pantai Mutiara	699165.046	9325367.698	18.500	-0.075
136	Istana Negara	701657.203	9317535.370	23.662	-0.033
137	Tanjung Priok	711776.565	9324935.155	24.156	-0.040
138	Kebayoran Baru	698245.064	9310435.978	34.109	-0.033
139	Kali Baru Cilincing	713193.712	9325636.750	25.136	-0.035
140	Kalideres	686892.926	9318842.697	31.821	-0.068
141	Kelapa Gading	711206.524	9319260.308	27.481	-0.040
142	Kemayoran	704502.883	9319961.518	22.003	-0.038
143	Kuningan	702951.015	9310357.670	35.824	-0.020
144	Lentenan	698542.317	9320006.399	28.173	-0.038
145	Monas	701756.196	9316540.991	22.125	-0.033
146	Marunda	716236.369	9325368.324	26.315	-0.043
147	Muara Baru	699221.507	9324922.250	23.060	-0.090
148	Pantai Mutiara	698196.667	9324679.649	20.274	-0.053
149	Pantai Mutiara	698269.784	9325090.802	21.886	-0.078
150	Nizam Muara Baru	699635.273	9325834.351	20.223	-0.065
151	Tanjung Priok	706365.925	9323355.442	21.587	-0.040
152	Dewi Sartika	706384.654	9307319.496	54.725	0.000
153	Bambu Apus	711376.670	9302606.365	62.136	-0.015
154	Green Bay Pluit	696907.995	9324243.618	18.709	-0.053

No	Lokasi	EASTING (m)	NORTHING (m)	H Ellipsoid (m)	RATE/LAJU PER TAHUN 2021 (m)
155	Pantai Indah Kapuk	693784.061	9324044.018	25.611	-0.045
156	Danau Sunter Utara	708414.254	9320950.531	27.861	-0.033
157	Jalan Matraman Raya	705668.067	9313510.935	34.212	-0.010
158	Pulo Mas Timur	709023.199	9317371.826	25.923	-0.035
159	Jalan Haji Sabaa	691418.890	9312706.387	30.439	-0.055
160	Jalan KH Hasyim Ansyari	700346.869	9318127.784	22.663	-0.030
161	Jalan Kelapa Hijau	702042.906	9300337.695	78.626	0.000
162	Jalan Kebayoran Baru	697468.927	9310013.223	37.109	-0.040
163	Sarinah	701715.152	9315613.299	29.134	-0.040
164	Jalan Pangeran Jayakarta	701303.223	9321020.712	20.672	-0.030
165	Jalan Pangeran Jayakarta	702903.031	9320369.341	22.255	-0.030
166	Jalan Minang kabau timur	704088.082	9313014.894	28.977	-0.020
167	Tubagus Angke	698084.941	9320631.994	29.559	-0.040
168	Sunter Utara	705261.836	9322337.371	21.521	-0.030
169	Cengkareng Barat	690094.261	9322261.325	25.790	-0.045
170	Tomang	699770.207	9317138.521	36.491	-0.030
171	Kantor PU Jakarta Timur	707593.227	9311357.113	27.122	-0.035
172	Sunter	708791.977	9319852.196	20.604	-0.033
Rata-Rata					-0.040

(Sumber): Bidang Pengembangan ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta)

Berdasarkan **Tabel 3.15** Diatas diperoleh angka realisasi rata-rata dari pengukuran menggunakan Metode GPS Geodetik pada 172 lokasi yaitu sebesar 4 cm.



Gambar 3.11 Realisasi dan Target IKU 5 Tahun 2021

Berikutnya dilakukan perhitungan capaian dengan menggunakan formulasi *minimize* dengan hasil sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU 5} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKU 5} = \left[1 + \left(1 - \frac{4}{3,985} \right) \right] \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKU 5} = [1 + (-0,003764)] \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKU 5} = [0,9962] \times 100\% = 99,62\%$$

Berdasarkan **Gambar 3.16** diatas, terlihat bahwa realisasi IKU 5 Tahun 2021 berada dibawah dibawah target yang telah ditetapkan. Namun capainnya dengan nilai sebesar 99,62% masih berada pada ketegori “Sangat Tinggi” menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Adapun Program/Kegiatan/Subkegiatan pendukung penuntasan target IKU 5 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Program/Kegiatan/Subkegiatan pendukung IKU 5

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	9,999,987,849	8,394,181,698	83,94%
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	9,999,987,849	8,394,181,698	83,94%
1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	9,999,987,849	8,394,181,698	83,94%

IKU 5 merupakan IKU yang dilimpahkan pelaksanaannya ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat adanya perubahan SOTK pada Tahun 2021, yang mana indikator, definisi operasional, dan targetnya seluruhnya dirancang oleh Dinas Perindustrian dan Energi pada RPJMD 2017-2022.

Setelah perubahan SOTK tersebut dan IKU dilimpahkan ke Dinas Sumber Daya Air, dalam pelaksanaan penuntasan IKU 5 ini, Dinas Sumber Daya Air mendapatkan beberapa kendala yang diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksinkronan antara hasil perhitungan penurunan permukaan tanah menggunakan metode GPS Geodetik dengan definisi operasional yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Energi dalam RPJMD 2017-2022. Dalam perhitungannya, secara teknis sebenarnya tidak dapat disebutkan angka yang spesifik terkait besaran penurunan permukaan tanah di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga terkait dengan targetnya seharusnya disebutkan dalam bentuk *range* atau kisaran yakni 0 cm s.d. 9 cm sesuai hasil perhitungan Dinas Sumber Daya Air.
2. Atas dasar tersebut, **Tabel 3.16** diatas sebenarnya tidak dapat dihitung angka rata-ratanya. Namun dikarenakan indikator ini merupakan IKU dalam Perubahan RPJMD 2017-2022 yang harus dilaporkan capaiannya berdasarkan indikator dan target yang telah disusun pada RPJMD 2017-2022 oleh Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Sumber Daya Air merata-rata angka realisasi pada **Tabel 3.16** diatas untuk mengikuti indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Adanya ketidaklengkapan histori data yang membuat tidak dapat diperolehnya perbandingan capaian IKU ini dengan tahun-tahun sebelumnya. IKU 5 ini dilimpahkan pelaksanaannya pada Tahun 2020 ke Dinas Sumber Daya Air yang mana pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 direncanakan pembangunan stasiun penurunan permukaan tanah. Kegiatan ini tidak dapat teralisasi akibat adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19 dan baru dapat teralisasi pada Tahun 2021. Dinas Sumber Daya Air juga tidak dapat menggunakan stasiun pemanataan penurunan permukaan tanah yang dibangun oleh Dinas Perindustrian dan Energi dikarenakan aset tersebut dalam keadaan rusak. Untuk capaian tahun 2018 dan 2019 yang dilaporkan oleh Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Sumber Daya Air juga tidak dapat menemukan histori capaiannya.

IKU 6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel dengan indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Definisi Operasionalnya, IKU 6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel dengan indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mengukur 3 komponen yaitu:

1. Penyerapan anggaran

Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan perangkat daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila

serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (persentase serapan anggaran x 40%). anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.

2. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
3. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (*Output*). realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev anggaran hasil inputan PD/UKPD.
4. Perhitungannya menggunakan formula:
 - a. Realisasi = $(40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$; jika Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%;
 - b. Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$; jika Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$;
 - c. Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$; jika Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$.
5. Realisasi dan capaian Dinas Sumber Daya Air diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.17 Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas beserta Suku Dinas Sumber Daya Air Kota dan Kabupaten Administrasi Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
DINAS SUMBER DAYA AIR						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	149.833.256.678	146.797.151.566	97,97%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.420.000	16.150.000	83,16%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	265.208.100	256.601.750	96,75%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124.784.000	124.784.000	100,00%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	38.926.999.898	38.341.446.399	98,50%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.130.000	26.285.000	93,44%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	331.161.570.302	108.922.069.237	32,89%
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.038.500.000	63.515.365.284	97,66%
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.000.000	264.000.000	100,00%
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.403.433.014	20.052.883.088	98,28%
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	960.835.016	779.125.631	81,09%
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	34.187.289.753	31.397.107.386	91,84%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	443.877.500	443.877.500	100,00%
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.148.768	30.635.000	76,30%
15	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	15.400.000	4.200.000	27,27%
16	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	11.526.885.905	8.292.794.434	71,94%
17	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	219.978.810.415	106.065.765.773	48,22%
18	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	411.433.231.055	372.648.178.041	90,57%
19	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	401.780.498.887	157.357.625.091	39,17%
20	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	60.341.368.352	55.510.161.352	91,99%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
21	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.335.337.141.810	848.668.425.393	63,55%
22	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	45.605.491.969	44.119.588.983	96,74%
23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.853.904.898	2.022.205.800	70,86%
24	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	85.538.000.698	37.756.304.382	44,14%
25	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2.734.891.503	2.723.646.500	99,59%
26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1.891.787.480	1.459.672.500	77,16%
27	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	458.329.465	404.882.500	88,34%
28	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	272.825.000	272.100.000	99,73%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
29	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/Perbaikan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	18.000.000.000	13.561.763.609	75,34%
30	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/Perbaikan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	25.164.683.845	18.169.903.208	72,20%
31	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	36.439.221.949	30.074.260.700	82,53%
32	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	39.999.999.856	21.825.923.791	54,56%
33	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	130.500.000	129.000.000	98,85%
34	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10.156.784.188	8.836.526.890	87,00%
35	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	399.999.567	391.873.900	97,97%
36	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	9.999.987.849	8.394.181.698	83,94%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
37	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	14.000.000	11.200.000	80,00%
38	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	99.994.092	0	0,00%
39	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	193.024.909	193.024.909	100,00%
SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	19.535.000	97,68%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	297.951.743	274.368.080	92,08%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.572.000	24.572.000	100,00%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	4.011.976.771	3.990.082.760	99,45%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	11.644.800	2.533.300	21,75%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.500.000.000	18.475.516.258	75,41%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.040.000	29.040.000	100,00%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.389.253.683	3.340.676.610	98,57%
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.112.573.813	882.037.706	79,28%
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2.691.903.520	1.961.017.306	72,85%
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.941.319	180.290.000	90,17%
12	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	4.999.999.976	4.210.421.900	84,21%
13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	322.425.538	320.708.476	99,47%
14	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	35.690.313.399	33.488.722.815	93,83%
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.150.933.764	990.220.671	86,04%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	28.910.728.357	28.456.447.290	98,43%
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	87.916.515.918	85.748.281.205	97,53%
SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.456.900	33.580.000	97,46%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178.031.378	175.835.250	98,77%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.228.400	31.353.000	91,60%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	7.271.827.948	7.021.960.000	96,56%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.583.600	1.956.999	35,05%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.343.371.812	7.398.249.512	79,18%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.008.700	21.008.700	100,00%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	388.660.239	312.847.930	80,49%
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	3.143.313.989	2.524.481.421	80,31%
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.211.776	46.860.000	75,32%
11	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	88.172.593.912	87.367.700.916	99,09%
12	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	94.218.111.265	93.592.691.938	99,34%
13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	447.554.800	395.377.000	88,34%
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	202.889.447	183.411.000	90,40%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	862.759.027	527.764.000	61,17%
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	21.549.107.313	20.479.167.320	95,03%
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	14.557.303.523	13.098.154.795	89,98%

SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.095.800	20.531.600	97,33%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.967.632	140.388.800	98,20%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.943.303	37.408.690	98,59%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	4.734.350.200	4.295.210.348	90,72%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.925.200	10.852.000	99,33%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.064.305.838	19.726.750.765	98,32%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.300.000	25.300.000	100,00%
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.660.714.215	2.641.382.690	99,27%
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.335.309.971	2.140.274.987	91,65%
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.659.893	50.426.321	95,76%
11	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	244.674.630	244.595.662	99,97%
12	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	54.078.602.485	53.334.274.663	98,62%
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2.484.270.049	2.438.342.039	98,15%
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	174.200.000	174.200.000	100,00%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	32.073.651.802	30.906.986.955	96,36%
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	78.840.299.951	77.497.406.679	98,30%
SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.460.000	24.880.000	90,60%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.413.206.214	2.648.371.663	77,59%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.884.410	45.884.410	100,00%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	7.696.637.550	7.696.637.550	100,00%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.198.400	18.160.800	99,79%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.768.000.000	27.768.000.000	100,00%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.516.885.995	66.292.872.669	92,70%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.045.758.065	1.594.490.799	77,94%
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.593.061	33.904.000	90,19%
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	816.560.448	694.919.800	85,10%
11	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.000.097.579	632.963.181	63,29%
12	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	12.859.810.596	11.824.791.721	91,95%
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.085.609.580	467.779.601	43,09%
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	15.414.011.617	15.397.383.565	99,89%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	26.261.614.045	23.419.243.605	89,18%
SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.100.000	31.100.000	100,00%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.507.606	195.741.986	98,61%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.235.875	42.235.875	100,00%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	1.123.428.961	1.100.000.000	97,91%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.805.880	25.322.503	54,10%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.960.000	36.960.000	100,00%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.684.867.973	4.297.332.808	75,59%
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	538.424.660	265.021.128	49,22%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	159.245.690	157.287.745	98,77%
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.611.425	71.242.500	81,32%
11	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	819.389.993	753.940.000	92,01%
12	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	3.448.428.127	2.793.698.981	81,01%
13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	489.349.260	405.456.086	82,86%
14	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	31.247.998.023	29.505.386.194	94,42%
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.590.217.436	2.895.663.530	80,65%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	47.966.253.848	47.113.799.748	98,22%
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	73.611.562.390	68.937.019.497	93,65%
SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.582.420	179.533.100	96,22%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.623.016	21.058.200	85,52%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	233.510.476	113.995.000	48,82%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.492.800	17.815.501	58,43%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	454.144.914	402.883.480	88,71%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.464.115	194.975.000	99,75%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	81.832.000	81,83%

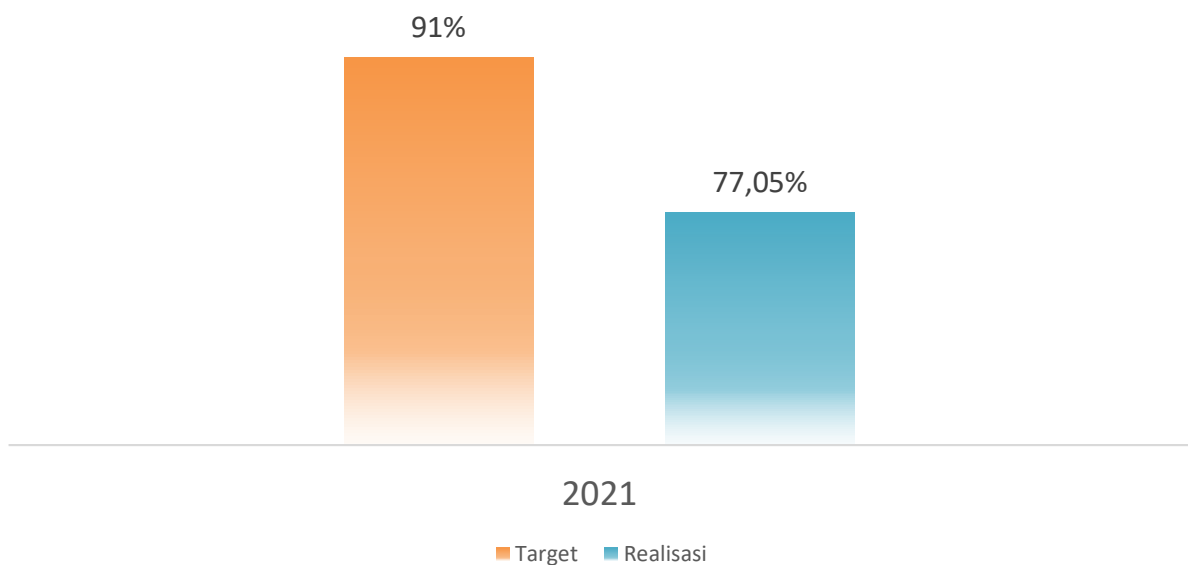
No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.036.791.360	893.337.687	86,16%
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.380.000	28.380.000	100,00%
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.115.890.076	2.043.496.334	96,58%
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	117.791.847	73.569.242	62,46%
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.141.196	8.670.000	77,82%
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.644.922	43.848.000	83,29%
14	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	198.132.000	190.619.000	96,21%
15	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	18.321.852.753	18.130.570.393	98,96%

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	8.138.615.073	7.845.633.131	96,40%
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	297.483.909	198.132.000	66,60%
18	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	8.161.436.236	7.952.720.561	97,44%
19	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Pe nyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	31.092.570.200	30.837.587.700	99,18%
20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	6.401.365.859	6.342.516.900	99,08%
JUMLAH				4.412.146.904.199	3.151.940.559.826	71,44%

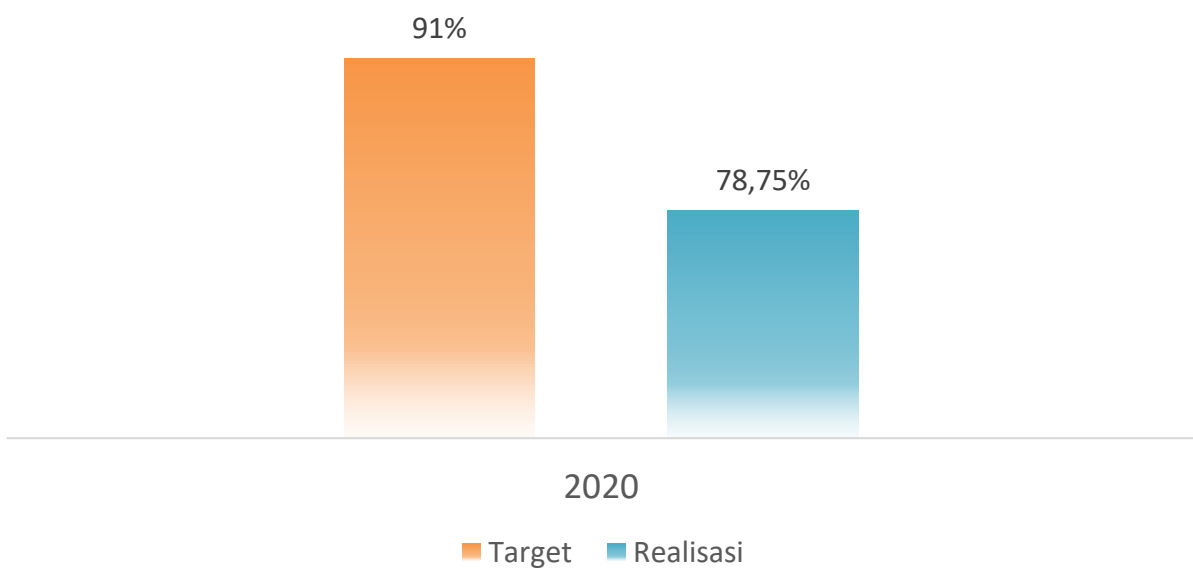
(Sumber: e-Monev, (<https://monev2021.bapedadki.net/>))

6. Berdasarkan **Tabel 3.17** diatas, realisasi penyerapan anggaran Dinas beserta Suku Dinas Sumber Daya Air Kota dan Kabupaten Administrasi tercatat sebesar Rp. 3.151.940.559.826 dari pagu anggaran berdasarkan DPA Perubahan sebesar Rp. 4.412.146.904.199 atau sebesar 71,44%. Berdasarkan angka tersebut maka untuk perhitungan realisasinya menggunakan formula c; $Realisasi = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$; jika Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun $output < 100\%$.
7. Realisasi *output* sub kegiatan diambil berdasarkan tarikan data pada e-SAKIP (<https://sakip.jakarta.go.id/>) dengan rata-rata 96,95%
8. Dengan demikian, realisasi dapat dihitung sebagai berikut:
 - $Realisasi = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$

- Realisasi = $(0,4 \times 71,44\%) + (0,5 \times 96,95\%)$
 - Realisasi = $28,576\% + 48,475\% = 77,051\%$
9. Selanjutnya capaian dihitung dengan menggunakan formula *maximize* yakni dengan membandingkan angka realisasi tersebut dengan target yang ditetapkan pada Rancangan Perubahan RPJMD 2017-2022 sebesar 91%, yang menghasilkan capaian sebesar 84,67%. Kategori capaian IKU 6 ini bila mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berada pada level “Tinggi”.



Gambar 3.12 Realisasi dan Target IKU 6 Tahun 2021 Sesuai Target Berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022



Gambar 3.13 Realisasi dan Target IKU 6 Tahun 2020 Sesuai Target Berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022

Berdasarkan **Gambar 3.12** dan **3.13** diatas, adanya penurunan realisasi IKU 6 antara Tahun 2021 dan 2020. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya serapan anggaran antara Tahun 2020 dan 2021. Penyerapan anggaran pada tahun 2020 lebih banyak dengan porsi anggaran yang lebih sedikit dikarenakan adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi COVID-19.

3.3 Capaian Output PEN

Capaian Output kegiatan yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) s.d. 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18 Realisasi Output Kegiatan yang Menggunakan Dana PEN Tahun 2021

No.	Judul Kerangka Acuan Kegiatan	Indikator Keluaran pada KAK	Target Output	Realiasi Pencapaian
1.	Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Polder Pengendali Banjir	Terbangunnya sistem polder untuk mengurangi banjir/genangan kawasan di Provinsi DKI Jakarta melalui perencanaan, konstruksi polder, pengadaan pompa mobile, dan pemasangan rotary untuk pompa stasioner dan pembangunan pintu air.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia: 15 dokumen. 2. Jumlah polder pengendali banjir yang dimulai pembangunannya: 9 Polder. 3. Jumlah pompa mobile yang tersedia: 41 unit. 4. Jumlah pompa apung tersedia: 60 unit. 5. Jumlah rotary screen untuk pompa stasioner yang tersedia: 3 unit. 6. Jumlah pintu air pengendali banjir yang terbangun: 14 unit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia: 15 dokumen. 2. Jumlah polder pengendali banjir yang dimulai pembangunannya: 9 Polder. 3. Jumlah pompa mobile yang tersedia: 38 unit. 4. Jumlah pompa apung yang tersedia: 60 unit. 5. Jumlah rotary screen untuk pompa stasioner yang tersedia: 3 unit. 6. Jumlah pintu air pengendali banjir yang terbangun: 14 unit.
2.	Pembangunan Waduk/Situ/ Embung Dan	Terbangunnya waduk pengendali	1. Jumlah lokasi waduk yang terlaksana	1. Jumlah lokasi waduk yang terlaksana

No.	Judul Kerangka Acuan Kegiatan	Indikator Keluaran pada KAK	Target Output	Realiasi Pencapaian
	Bangunan Kelengkapannya	banjir di DKI Jakarta.	<p>proses pengadaan lahannya: 11 lokasi.</p> <p>2. Jumlah waduk pengendali banjir yang terbangun: 3 waduk.</p> <p>3. Jumlah waduk pengendali banjir yang dimulai pelaksanaan konstruksi tahun jamak: 4 waduk.</p> <p>4. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia: 4 dokumen.</p>	<p>proses pengadaan lahannya: 5 lokasi.</p> <p>2. Jumlah waduk pengendali banjir yang terbangun: 3 waduk.</p> <p>3. Jumlah waduk pengendali banjir yang dimulai pelaksanaan konstruksi tahun jamak: 4 waduk.</p> <p>4. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia: 4 dokumen.</p>
3.	Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai	<p>1. Diperoleh dokumen perencanaan tanggul pengaman pantai NCICD Fase A yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.</p> <p>2. Diperolehya dokumen perencanaan untuk penataan dan pengembangan kawasan pesisir DKI Jakarta.</p>	<p>1. Jumlah dokumen perencanaan tanggul pengaman pantai NCICD dan penataan/ pengembangan pesisir yang tersedia: 7 dokumen.</p> <p>2. Panjang tanggul pengaman pantai yang terbangun: 290 meter.</p>	<p>1. Jumlah dokumen perencanaan tanggul pengaman pantai NCICD dan penataan/ pengembangan pesisir yang tersedia: 7 dokumen.</p> <p>2. Panjang tanggul pengaman pantai yang terbangun: 291 meter.</p>

No.	Judul Kerangka Acuan Kegiatan	Indikator Keluaran pada KAK	Target Output	Realiasi Pencapaian
		3. Terlindunginya kawasan pantai Provinsi DKI Jakarta khususnya yang berada di wilayah Kamal Muara dan Sunda Kelapa dari ancaman rob, penurunan muka tanah dan peningkatan muka air laut.		
4.	Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Kapasitas Sungai	1. Tersedianya lahan untuk peningkatan kapasitas sungai di DKI Jakarta.	1. Terlaksananya pengadaan tanah untuk peningkatan kapasitas sungai di 4 Kali/Sungai.	1. Terlaksananya pengadaan tanah untuk peningkatan kapasitas sungai di 4 Kali/Sungai.
5.	Peningkatan Kapasitas Sungai Dan Drainase	1. Meningkatnya kapasitas sungai dan drainase di Provinsi DKI Jakarta.	1. Jumlah lokasi peningkatan kapasitas sungai dan drainase yang terlaksana: 3 lokasi. 2. Jumlah alat berat yang tersedia: 10 unit. 3. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia: 7 dokumen.	1. Jumlah lokasi peningkatan kapasitas sungai dan drainase yang terlaksana: 3 lokasi. 2. Jumlah alat berat yang tersedia: 13 unit. 3. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia: 7 dokumen.

No.	Judul Kerangka Acuan Kegiatan	Indikator Keluaran pada KAK	Target Output	Realiasi Pencapaian
6.	Pembangunan Vertikal Drainase	1. Terbangunnya sumur resapan dangkal, sumur dalam, kolam resapan dan sarana detensi dalam upaya konservasi air dan mengurangi dampak genangan.	1. Volume sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, kolam resapan dan sarana detensi yang terbangun: 70.000 m ³ (d disesuaikan dengan kondisi lapangan)	1. Volume sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, kolam resapan dan sarana detensi yang terbangun: 47.851 m ³ .
7.	Penataan Kawasan Kota Tua (Kali Besar)	1. Perbaikan sistem aliran kali, pembangunan pintu air dan pelimpah serta penataan kawasan kota tua (kali besar).	1. Jumlah paket konstruksi tahun jamak penataan kawasan Kota Tua yang dimulai pelaksanaannya: 1 paket.	1. Jumlah paket konstruksi tahun jamak penataan kawasan Kota Tua yang dimulai pelaksanaannya: 1 paket.
8.	Penataan Kawasan Pasar Baru (Kali Ciliwung Pasar Baru)	1. Terlaksananya penataan kali pembuatan tanggul, dan landscape untuk penataan kali.	1. Jumlah paket konstruksi tahun jamak penataan kawasan Pasar Baru (Kali Ciliwung Pasar Baru) yang dimulai pelaksanaannya: 1 paket.	1. Jumlah paket konstruksi tahun jamak penataan kawasan Pasar Baru (Kali Ciliwung Pasar Baru) yang dimulai pelaksanaannya: 1 paket.
9.	Perencanaan Dan Pengembangan Flood Supporting Information System	1. Tersedianya alat ukur curah hujan dan CCTV yang terintegrasi dengan	1. Jumlah alat ukur curah hujan yang tersedia: 35 unit.	1. Jumlah alat ukur curah hujan yang tersedia: 35 unit.

No.	Judul Kerangka Acuan Kegiatan	Indikator Keluaran pada KAK	Target Output	Realiasi Pencapaian
		sistem peringatan dini banjir Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.	2. Jumlah CCTV yang tersedia: 15 unit. 3. Jumlah monitor CCTV yang tersedia: 15 unit. 4. Jumlah lisensi milestone IP CCTV yang tersedia: 15 unit. 5. Jumlah IP CCTV dan switch hub yang tersedia: 17 6. Jumlah tiang monopole CCTV yang tersedia: 12 unit.	2. Jumlah CCTV yang tersedia: 15 unit. 3. Jumlah monitor CCTV yang tersedia: 15 unit. 4. Jumlah lisensi milestone IP CCTV yang tersedia: 15 unit. 5. Jumlah IP CCTV dan switch hub yang tersedia: 17 unit. 6. Jumlah tiang monopole CCTV yang tersedia: 13 unit.
10	Peningkatan Infrastruktur Layanan Air Minum	1. Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air (IPA) 2. Terbangunnya Kios Air 3. Tersedianya IPA Mobile 4. Tersusunnya dokumen lingkungan	1. Jumlah IPA yang terbangun: 4 lokasi. 2. Jumlah kios air yang terbangun : 10 lokasi. 3. Jumlah IPA Mobile yang tersedia: 10 unit. 4. Jumlah mobil tangki yang tersedia: 12 unit. 5. Jumlah dokumen lingkungan yang tersedia: 1 dokumen.	1. Jumlah IPA yang terbangun: 3 lokasi. 2. Jumlah kios air yang terbangun : 10 lokasi. 3. Jumlah IPA Mobile yang tersedia: 5 unit. 4. Jumlah mobil tangki yang tersedia: 12 unit. 5. Jumlah dokumen lingkungan yang tersedia: 1 dokumen.

3.4 Analisis terhadap Pemenuhan Target SDGs

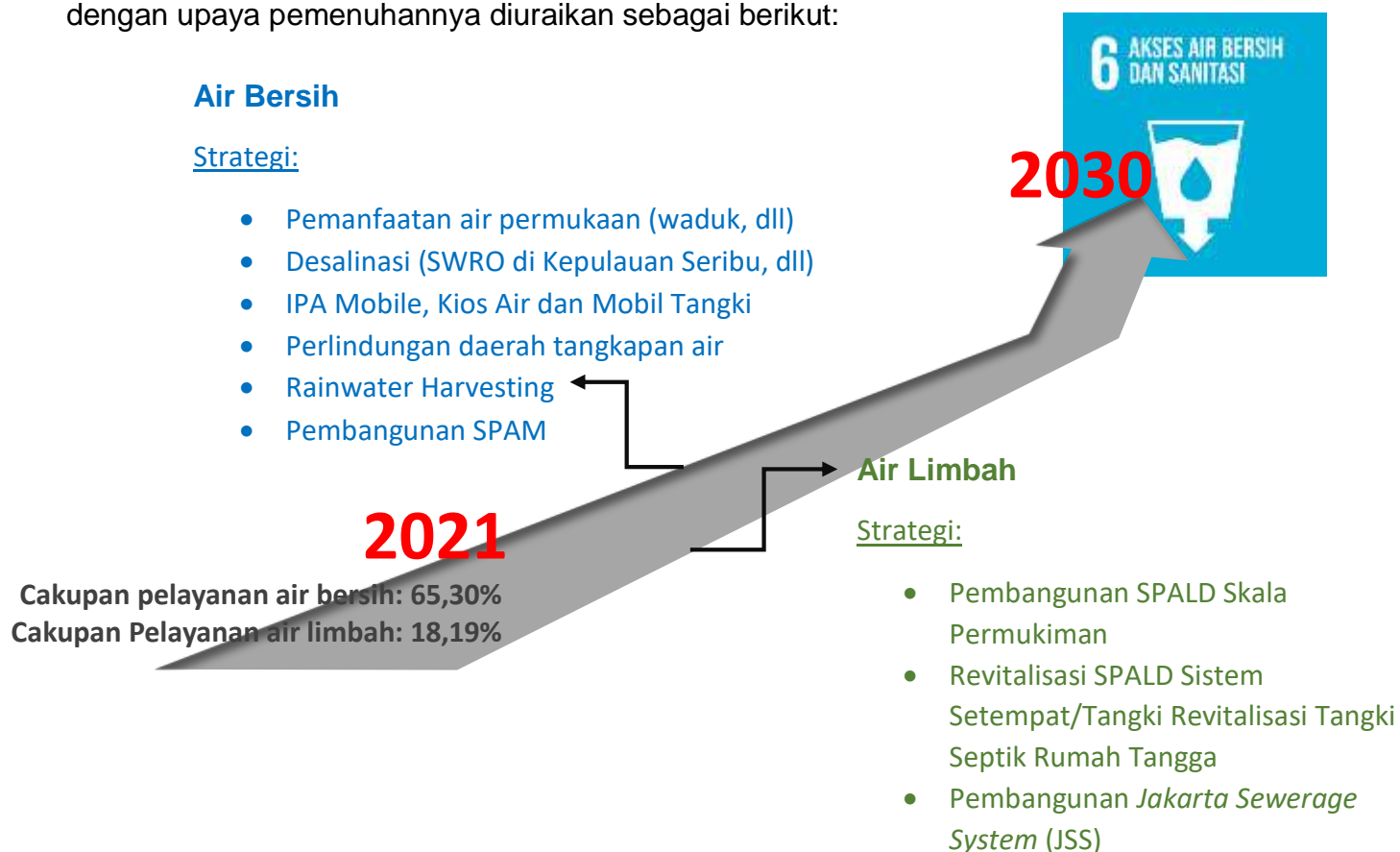
SDGs (*Sustainable Development Goals*) (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Adapun Tujuan SDGs yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta adalah Tujuan 6 SDGs. Memastikan Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih yang Berkelanjutan dan Sanitasi bagi Semua dengan target:

1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua.
2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua dan mengakhiri buang air di tempat terbuka, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan.
3. Pada tahun 2030, memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi, menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya, mengurangi separuh dari proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan ulang yang aman secara global.
4. Pada tahun 2030, secara substantif meningkatkan penggunaan air secara efisien di semua sektor dan memastikan pengambilan dan suplai air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air.
5. Pada tahun 2030, mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi pada setiap level, termasuk melalui kerjasama antarbatas selayaknya
6. Pada tahun 2020, melindungi dan memperbaiki ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, resapan air dan danau.
7. Pada tahun 2030, memperbanyak kerjasama internasional dan dukungan pengembangan kapasitas kepada negara-negara berkembang dalam aktivitas dan program terkait air dan sanitasi, termasuk water harvesting, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, teknologi daur ulang dan penggunaan ulang.
8. Mendukung dan menguatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi.

Tujuan 6. SDGs dan dengan target-targetnya tersebut selaras pelaksanaannya dengan IKU 4 dan IKU 5 yang dilaksanakan pelaksanaannya oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yaitu Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan dengan indikator Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Cakupan Pelayanan Air Limbah.

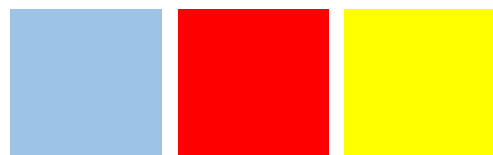
Gambaran skema, terkait capaian IKU 3 dan IKU 4 terhadap target SDGs yang disertai dengan upaya pemenuhannya diuraikan sebagai berikut:

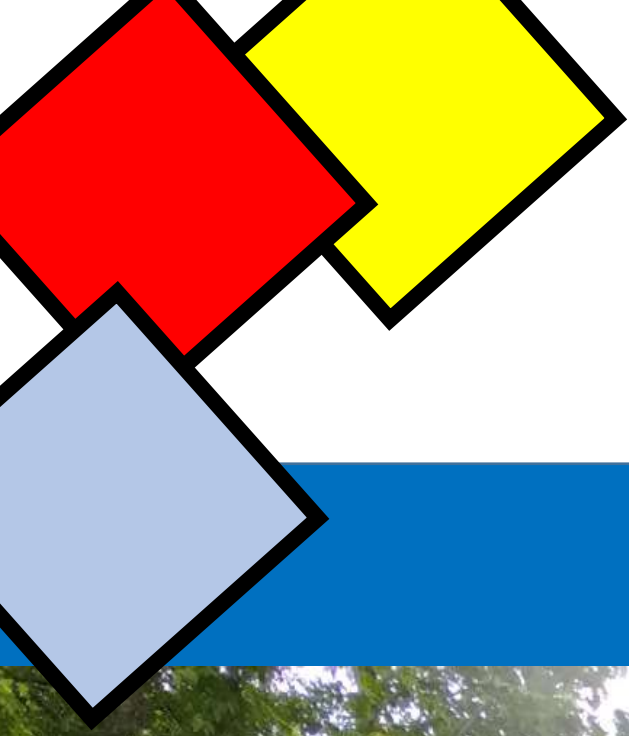


Gambar 3.14 Gambaran Skema, terkait Capaian IKU 3 dan IKU 4 Dinas Sumber Daya Air terhadap Pemenuhan Target SDGs

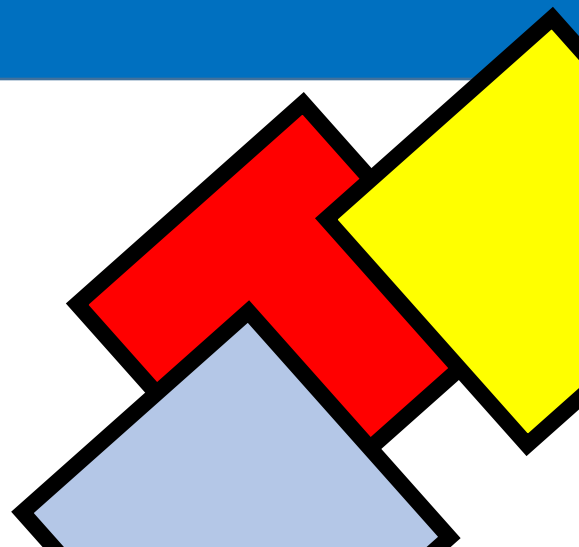
4

PENUTUP





IPA PULAU SEBIRA





4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air Tahun 2021, dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Nilai realisasi penyerapan anggaran Dinas beserta Suku Dinas Sumber Daya Air Kota dan Kabupaten Administrasi Tahun 2021 tercatat sebesar Rp. 3.151.940.559.826 dari pagu anggaran berdasarkan DPA Perubahan sebesar Rp. 4.412.146.904.199 atau sebesar 71,44%.
2. Analisis yang dilakukan terhadap keenam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 memberikan hasil capaian IKU berada pada *range* $84,67\% \leq \text{Capaian} \leq 140\%$. Jika mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori “*Tinggi hingga Sangat Tinggi*” dengan kode warna “*Hijau hingga Hijau Tua*”. Dengan demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa Dinas Sumber Daya Air berhasil dalam menuntaskan target yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
3. Beberapa kendala dalam penuntasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Beberapa kegiatan yang pendukung penuntasan IKU tidak dapat diselesaikan pembangunannya pada tahun ini dan membutuhkan waktu tambahan dikarenakan beberapa kendala seperti tidak dapat terkirimnya alat pendukung dari negara asal akibat pandemi COVID-19, penolakan masyarakat, dan adanya perbaikan/penyempurnaan terhadap desain.
 - b. Beberapa IKU yang diampu oleh Dinas Sumber Daya Air merupakan IKU baru yang ditetapkan pada Perubahan RPJMD 2017-2022 ataupun IKU yang sebelumnya diampu oleh SKPD lain dan dilimpahkan penuntasannya ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta akibat perubahan SOTK. Pada IKU ini capaian Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan tidak tersedianya data.
4. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan terhadap penuntasan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya dukungan personil lapangan (satgas/pasukan biru) dan alat berat dengan jumlah yang memadai.
 - b. Adanya dukungan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

4.2 Rencana Aksi Perbaikan Kinerja

Dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun kedepan, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut.

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal Dinas beserta Suku Dinas Sumber Daya Air Kota dan Kabupaten Administrasi secara lebih intensif.
3. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat terkait percepatan penyelesaian proyek-proyek yang penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.

DAFTAR

LAMPIRAN



LAMPIRAN I : DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSMADA FAIZAL
Jabatan : Kepala Dinas Sumber Daya Air
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,

Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

YUSMADA FAIZAL
NIP. 196406241989071002

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase yang handal	1	Tingkat layanan infrastruktur sumber daya air dan drainase	e-SAKIP	Rata-rata capaian gabungan indikator: (1) Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam; (2) Persentase luas kawasan banjir yang tertangani; (3) Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi; (4) Persentase tanggul kritis di muara kali dan pantai kawasan pesisir Jakarta yang telah terbangun; (5) Persentase waduk/situ/embung yang memenuhi baku mutu untuk air baku	N/A	N/A	N/A	39.68	39.68	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
2	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Jumlah Titik Genangan Banjir	e-SAKIP	Genangan adalah peristiwa terhentinya air atau air tidak mengalir, tidak termasuk genangan yang diakibatkan oleh luapan kali. Lokasi titik genangan banjir yang berulang yaitu: (1) Perempatan ITC Fatmawati,, (2) Komplek Paspampres Kramat Jati, (3) Jl.Taman Mini 1 (Simpang Garuda), (4) Jl.D.I.Pandjaitan, (5) Jl.Patra Raya, (6) Jl.Letjen. S. Parman, (7) Jl.Industri/Industri 1, (8) Jl.Mangga Dua Raya, (9) Jl.Boulevard Barat, (10) Jl.Pahlawan Kalibata depan Kalibata City, (11) Kel.Petogogan, (12) Jl.Mayjen. Sutoyo depan UKI, (13) Jl.Balai Pustaka, (14) Jl.Arjuna Selatan, (15) Jl.Plumpang Semper Target dihitung dari banyaknya titik genangan yang tersisa dari total target 15 titik.	N/A	N/A	N/A	5	5	Titik
3	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	1	Cakupan pelayanan air bersih.	e-SAKIP	Cakupan pelayanan air bersih dihitung berdasarkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan PDAM dan penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan perpipaan PDAM. Perhitungan jumlah penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan PDAM yaitu : Volume produksi IPA selama 1	N/A	N/A	N/A	63.65 (1,138,179 KK)	63.65 (1,138,179 KK)	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>tahun x 60 liter/hari (kebutuhan air bersih per orang per hari pada perkotaan) x 365 hari Pergunaan air untuk keperluan domestik diperhitungkan dari jumlah penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan yang terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS). - penduduk perkotaan = 120L/hari/kapita - penduduk pedesaan = 60L/hari/kapita (SNI 19-6728.1-2002). Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data bappenas.</p> <p>(Jumlah penduduk yang dilayani oleh PDAM dan IPA bukan jaringan perpipaan PDAM dibagi proyeksi jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta) dikali 100%.</p>						
		2	Cakupan pelayanan air limbah	e-SAKIP	<p>Cakupan layanan pengelolaan air limbah adalah cakupan layanan pengolahan air limbah dengan sistem perpipaan ditambah cakupan layanan pengolahan air limbah dengan sistem non perpipaan. Cakupan layanan pengolahan air limbah dihitung berdasarkan jumlah orang yang dilayani dibagi dengan jumlah penduduk DKI Jakarta. (Jumlah orang yang terlayani sarana pengelolaan air limbah Pemprov DKI Jakarta dibagi proyeksi jumlah penduduk DKI Jakarta) dikali 100%</p>	N/A	N/A	N/A	19.99 (428,895 KK)	19.99 (428,895 KK)	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
4	Melambatnya penurunan permukaan tanah	1	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	e-SAKIP	Rata-Rata penurunan tanah berdasarkan titik pengukuran tanah yang telah ditetapkan dengan menggunakan pengukuran GPS Geodetik.	N/A	N/A	N/A	3.985	3.985	Persentase
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran \geq 80%. Apabila serapan anggaran di bawah $<$ 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih</p>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: 1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$ 2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$ Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$ 3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$						
6	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (nomor 41)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (nomor 41)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
		4	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
SASARAN KHUSUS											
12	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	N/A	N/A	N/A	1	1	Paket

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0*25%))	NA	3	NA	NA	3	WTP

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan. d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).						

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta oleh Kementerian PAN dan RB (nilai 81)	N/A	N/A	N/A	A (81)	A (81)	Predikat
17	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	e-Kinerja	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Cara penghitungan : Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30	N/A	N/A	N/A	92	92	Nilai

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
18	Terselesaikannya penanganan genangan akibat Banjir akibat luapan sungai dan Banjir ROB kurang dari 6 Jam	1	Persentase penanganan genangan akibat Banjir akibat luapan sungai dan Banjir ROB kurang dari 6 Jam	e-Kinerja	(Jumlah Penanganan Banjir Kiriman dan Banjir ROB kurang dari 6 Jam / Jumlah total kejadian Banjir akibat luapan sungai dan Banjir ROB kurang dari 6 Jam) x 100%. Dihitung pada saat air berhenti meluap. Tidak berlaku untuk kombinasi genangan/banjir yang disebabkan oleh luapan sungai, banjir ROB, dan hujan lokal secara bersamaan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
19	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 atau Ketercapaian Output sesuai KAK	1	Persentase capaian penyerapan anggaran PEN atau persentase penyelesaian output program PEN	e-Kinerja	(Jumlah realisasi anggaran PEN/total anggaran PEN atau Jumlah output program PEN yang tercapai / target capaian) x 100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
SASARAN OPERASIONAL											
20	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	Persentase
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
22	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

LAMPIRAN 2 : DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DAERAH (KSD) YANG DIAMPU PELAKSANAANNYA OLEH DINAS SUMBER DAYA AIR

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target		Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
1	KSD-017	Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB)	Digitalisasi Rekomendasi Teknis Perangkat Daerah ke Jakevo dalam Pelayanan Perizinan	Digitalisasi rekomendasi teknis perangkat daerah ke Jakevo dalam pelayanan perizinan	Terlaksananya Digitalisasi rekomendasi teknis perangkat daerah ke Jakevo dalam pelayanan perizinan	B03	Registrasi akun perangkat daerah ke Jakevo	Sekretariat	Subbagian Umum
						B06	100% digitalisasi rekomendasi teknis	Sekretariat	
2	KSD-021	Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Pembangunan IPA Stasioner/Jaringan Perpipaan di Kawasan Krisis Air Bersih	1. Terbangunnya IPA dilokasi Setu babakan 2. Terbangunnya IPA di Lokasi Sunter Selatan 3. Terbangunnya IPA di lokasi Rusun Lokbin Rawa Buaya	Beroperasinya IPA dan Bak penampung air baku di setiap lokasi	B03	1. Adanya kejelasan ketersediaan lahan untuk pembangunan IPA di Setu Babakan (Januari) 2. Kejelasan titik-titik lokasi pembangunan IPA lainnya yang telah dialokasikan melalui APBD 2021 3. Konsolidasi antara DSDA dengan PD AM terkait cakupan layanan dan lokasi-lokasi IPA baru yang akan dikembangkan 4. Adanya kejelasan ketersediaan lahan untuk pembangunan IPA di Lokasi Rusun Lokbin Rawa Buaya (Januari) 5. Dimulainya proses tender (Maret) 6. Terbitnya SIPA untuk IPA di lokasi Rusun Lokbin Rawa Buaya dari BBWSCC	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	Seksi Pengendalian dan Penyediaan Air Bersih
						B06	Ditandatanganinya kontrak Penyedia Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan di		

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
						Kawasan Krisis Air Bersih (Juni)		
						B09 Progres Konstruksi Konstruksi Fisik 10%		
						B12 Konstruksi Fisik Selesai 100% yang ditunjukkan oleh Laporan Progres pekerjaan konstruksi yang telah disetujui oleh PPK (November)		
3	KSD-021	Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Penyediaan IPA Mobile di Lokasi Titik-Titik Krisis Air Bersih	Terlaksananya pengadaan 10 unit IPA Mobile	Tersedianya 10 unit IPA Mobile	B03 1. Tersampainya Dokumen Pengadaan (Maret) 2. Dimulainya Proses Tender	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	Seksi Pengendalian dan Penyediaan Air Bersih
					B06 Ditandatanganinya kontrak Penyedia IPA Mobile (Mei)			
					B12 Penyediaan IPA Mobile selesai 100% (Oktober)			
4	KSD-021	Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Penyusunan dokumen RISPAM	Tersusunnya dokumen RISPAM	Terselesaikannya penyusunan dokumen RISPAM	B03 1. Tersusunnya Dokumen Pengadaan 2. Dimulainya Proses Tender	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	Seksi Perencanaan
					B06 Ditandatanganinya kontrak Penyedia (Mei)			
					B09 Laporan Pendahuluan (Juli)			
					B12 Laporan Akhir (Desember)			
5	KSD-021	Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah oleh Warga yang daerahnya telah terlayani air bersih perpipaan	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah oleh Warga yang daerahnya telah terlayani air bersih perpipaan dengan baik	Tersedianya laporan pengendalian pemanfaatan di area hunian	B03 1. Pembahasan bersama strategi komunikasi publik pengelolaan (termasuk pemanfaatan) sumber daya air 2. Laporan Triwulan I	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	Seksi Geologi dan Konservasi Air Baku
					B06 Laporan Triwulan II			
					B09 Laporan Triwulan III			
					B12 Laporan Triwulan IV			

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV	
6	KSD-021	Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah dalam pada Bangunan/Gedung Tinggi di Jakarta	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan air tanah pada Bangunan/Gedung Tinggi di Jakarta	Tersedianya laporan Pengendalian Pemanfaatan pada Bangunan/Gedung Tinggi di Jakarta	B03	1. Aksi Edukasi dan Himbauan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah Pada Bangunan/Gedung Tinggi di Jakarta 2. Upaya Pengawasan/Penertiban Pemanfaatan Air Tanah 3. Laporan Triwulan I	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	Seksi Geologi dan Konservasi Air Baku
						B06	1. Upaya Pengawasan/Penertiban Pemanfaatan Air Tanah 2. Laporan Triwulan II		
						B09	1. Upaya Pengawasan/Penertiban Pemanfaatan Air Tanah 2. Laporan Triwulan III		
						B12	1. Upaya Pengawasan/Penertiban Pemanfaatan Air Tanah 2. Laporan Triwulan IV		
7	KSD-021	Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Verifikasi Usulan Proposal dan Pencairan PSO	tersusunnya dokumen verifikasi PSO	Tersedianya dokumen verifikasi Sebagai acuan dalam pembayaran PSO	B06	1. Kepala DSDA melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan proposal usulan subsidi untuk APBDP 2021 2. Kepala DSDA melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan proposal usulan subsidi untuk APBD 2022	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	Seksi Pengendalian dan Penyediaan Air Bersih

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
						B12 1. Kepala DSDA melakukan verifikasi atas dokumen pencairan subsidi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi untuk APBDP 2021 (November) 2. Kepala DSDA memproses pencairan belanja subsidi sesuai ketentuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah untuk APBDP 2021 (Desember) 3. Kepala DSDA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Bersih secara periodik setiap bulan (Desember)		
8	KSD-021	Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Kejelasan Skema Pembangunan SPAM Regional	Kejelasan Skema Pembangunan SPAM Regional	Disepakatinya Skema Pembangunan SPAM Regional	B03 Koordinasi Opsi Skema Pembangunan SPAM Regional B06 Pemaparan dan Tindak lanjut Skema Pembangunan SPAM Regional Dalam Rapat Pimpinan	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	Seksi Pengendalian dan Penyediaan Air Bersih
9	KSD-021	Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Pengembangan Strategi Komunikasi Publik	Tersusunnya Materi Publikasi	Tersampainya Materi Publikasi Kepada Diskominfo sebanyak 4 kali per tahun	B03 Penyampaian Materi Publikasi (Februari) B06 Penyampaian Materi Publikasi (Mei) B09 Penyampaian Materi Publikasi (Agustus) B12 Penyampaian Materi Publikasi (November)	Pusat Data dan Informasi SDA	Subbagian Tata Usaha

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV	
10	KSD-021	Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Implementasi Peraturan Gubernur tentang Zona Bebas Air Tanah	Terlaksananya implementasi Peraturan Gubernur tentang Zona Bebas Air Tanah	Tersedianya laporan implementasi Peraturan Gubernur tentang Zona Bebas Air Tanah	B03	1. Penerbitan Pergub Zona Bebas Air Tanah (Januari 2021)2. Tersosialisakannya Pergub Zona Bebas Air Tanah kepada Pemilik Bangunan3. Tersusunnya Aturan Teknis Pelaksanaan Kalibrasi Sistem sebagai turunan Pergub Zona Bebas Air Tanah	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	Seksi Geologi dan Konservasi Air Baku
						B06	1. Tersedianya Sistem Informasi Air Tanah 2. Terlaksananya Sosialisasi teknis kalibrasi kepada pemilik bangunan		
						B09	Terkalibrasinya alat ukur air tanah pada bangunan gedung		
						B12	Tersampainya laporan hasil pengukuran air tanah melalui sistem secara realtime		
11	KSD-021	Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Integrasi sistem informasi air tanah dengan sistem perizinan, sistem penerimaan daerah dan jakarta satu	Terlaksananya Integrasi sistem informasi air tanah dengan sistem perizinan, sistem penerimaan daerah dan jakarta satu	Terlaksananya Integrasi sistem informasi air tanah dengan sistem perizinan, sistem penerimaan daerah dan jakarta satu	B12	Integrasi sistem informasi air tanah dengan sistem perizinan, sistem penerimaan daerah dan jakarta satu	Pusat Data dan Informasi SDA	Subbagian Tata Usaha
12	KSD-022	Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal	Pembangunan, Pendampingan, dan Sosialisasi JSS Zona 1 Paket 5 dan 6	Tersedianya penyedia jasa sebagai pelaksana pembangunan JSS Zona 1	Tersedianya calon penyedia jasa untuk Proyek JSS Zona 1	B03	1. Persiapan proses pengadaan kegiatan sosialisasi 2. Persiapan proses pengadaan kegiatan fisik 3. Surat ke Asisten Pembangunan LH tembusan Sekda, Inspektorat, Bappeda terkait Usulan Revisi SK	Bidang Pengelolaan Air Limbah	Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
						<p>Multiyears</p> <p>4. Surat usulan untuk SK Penggunaan BMD ke BPAD</p> <p>B06 1. Usulan proses pengadaan kegiatan sosialisasi 2. Usulan proses pengadaan kegiatan fisik</p> <p>B09 1. Tersedianya penyedia jasa kegiatan sosialisasi (Agustus) 2. Pengumuman Pra Kualifikasi kegiatan fisik 3. Evaluasi Pra Kualifikasi kegiatan fisik</p> <p>B12 1. terselesaikannya pelaksanaan kegiatan sosialisasi 2. Tersedianya calon penyedia jasa kegiatan fisik (Desember)</p>		
13	KSD-022	Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal	Kajian Jakarta Sewerage System Zona 5	Terbahasnya kajian FS JSS Zona 5 (KIAT)	Draft kajian FS JSS Zona 5 (KIAT)	<p>B03 Koordinasi dengan Kementerian PUPR / KIAT/Instansi Terkait</p> <p>B06 1. Diterimanya kajian FS JSS Zona 5 dari KIAT melalui KemenPUPR 2. Koordinasi dengan Kementerian PUPR /KIAT/Instansi Terkait</p>	Bidang Pengelolaan Air Limbah	Seksi Perencanaan
14	KSD-022	Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan	Persiapan dan Sosialisasi Pembangunan JSS Zona 6	Koordinasi / Sosialisasi JSS Zona 6	Laporan Hasil Koordinasi / Sosialisasi JSS Zona 6	B03 1. Persiapan proses pengadaan sosialisasi 2. Koordinasi dengan Kemen PUPR	Bidang Pengelolaan Air Limbah	Seksi Perencanaan

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
		Air Limbah Komunal				B06 1. Dimulainya proses persiapan pengadaan kegiatan sosialisasi2. Koordinasi dengan Kemen PUPR B09 1. Dimulainya Kegiatan sosialisasi 2. Koordinasi dengan Kemen PUPR B12 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi		
15	KSD-022	Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Provinsi DKI Jakarta	Terbangunnya SPALD di 10 lokasi	Beroperasinya SPALD di Lokasi dimaksud dengan hasil outlet yang memenuhi standar baku mutu	B03 1. Penetapan Lokasi dan Sosialisasi 2. Persiapan Dokumen Lelang B06 1. Pengumuman Lelang 2. Penandatanganan Kontrak B09 Kegiatan pembangunan Progres 10% B12 Pembangunan selesai dilaksanakan dan SPALD mulai beroperasi	Bidang Pengelolaan Air Limbah	Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah
16	KSD-022	Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal	Revitalisasi Tangki Septik - Verifikasi Calon Penerima Subsidi Revitalisasi Tangki Septik	Terverifikasinya Calon Penerima Subsidi Rehabilitasi Tangki Septik Provinsi DKI Jakarta	1. Ditetapkannya Daftar Usulan Calon Penerima Subsidi Revitalisasi Tangki Septik Provinsi DKI Jakarta 2. Tersalurkannya Subsidi Revitalisasi Tangki Septik	B03 Terverifikasinya Daftar Usulan Calon Penerima Subsidi Revitalisasi Tangki Septik Provinsi DKI Jakarta Tahap 1 sebanyak 800 titik B06 Terverifikasinya Daftar Usulan Calon Penerima Subsidi Revitalisasi Tangki Septik Provinsi DKI Jakarta Tahap 2 sebanyak 800 titik	Bidang Pengelolaan Air Limbah	Seksi Peningkatan dan Pengendalian Air Limbah

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
						B09 1 Terverifikasinya Daftar Usulan Calon Penerima Subsidi Revitalisasi Tangki Septik Provinsi DKI Jakarta Tahap 3 sebanyak 400 titik 2 Tersalurkannya subsidi Revitalisasi Tangki Septik Tahap 1		
						B12 Tersalurkannya subsidi Revitalisasi Tangki Septik Tahap 2 dan Tahap 3		
17	KSD-022	Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal	Strategi Komunikasi	Terkirimnya Bahan tayang siap tampil ke Diskominfo	Tersampainya Bahan tayang siap tampil kepada Diskominfo sebanyak 4 (empat) kali per tahun	B03 Terkirimnya bahan tayang siap tampil ke Dinas Kominfo (Februari) B06 Terkirimnya bahan tayang siap tampil ke Dinas Kominfo (Mei) B09 Terkirimnya bahan tayang siap tampil ke Dinas Kominfo (Agustus) B12 Terkirimnya bahan tayang siap tampil ke Dinas Kominfo (November)	Pusat Data dan Informasi SDA	Subbagian Tata Usaha
18	KSD-022	Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal	Pemindahan dan Pembangunan Gardu Listrik Sesuai Dengan Design JSS Zona 1 Paket 5 dan 6	Terlaksananya Pemindahan Gardu Listrik pada Lahan JSS Zona 1 Paket 5 dan 6	Terlaksananya Pemindahan Gardu Listrik pada Lahan JSS Zona 1 Paket 5 dan 6	B06 Terlaksananya Pemindahan dan Pembangunan Gardu Listrik pada Lahan JSS Zona 1 Paket 5 dan 6 oleh PLN	Bidang Pengelolaan Air Limbah	Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV	
19	KSD-022	Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal	Persiapan Pembangunan JSS Zona 8 melalui Skema KPDBU	Tersusunnya dokumen OBC sesuai kebutuhan DKI Jakarta	Dokumen OBC yang berkualitas Catatan: DSDA sebagai Penanggung Jawab Tim KPDBU berkoordinasi dengan Simpul KPDBU	B03	Penyempurnaan Dokumen Studi Pendahuluan Persiapan Penyusunan Revisi Dokumen OBC Persiapan Pelaksanaan Real Demand Survey (RDS) (Sesuai masukan dan saran dari hasil review Bappenas, Bappeda dan BPKD)	Bidang Pengelolaan Air Limbah	Seksi Perencanaan
						B06	1. Penyusunan Dokumen Revisi OBC 2. Pelaksanaan Real Demand Survey (RDS) 3. Persiapan Konsultasi Publik	Bidang Pengelolaan Air Limbah	
						B09	1. Penyelesaian Dokumen Revisi OBC 2. Laporan hasil Real Demand Survey (RDS) 3. Pelaksanaan Konsultasi Publik 4. Persiapan Pelaksanaan Market Sounding atas dokumen OBC	Bidang Pengelolaan Air Limbah	
						B12	1. Laporan Hasil Konsultasi Publik 2. Pelaksanaan Market Sounding atas dokumen OBC	Bidang Pengelolaan Air Limbah	

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV	
20	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Saringan Sampah di Perbatasan	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Saringan Sampah di Perbatasan (clean and clear)	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Saringan Sampah di Perbatasan (clean and clear)	B03	1. Terbitnya Penetapan Lokasi Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Normalisasi Kali Ciliwung Dari Jalan TB. Simatupang Kota Administrasi Jakarta Selatan Sampai Dengan Kampung Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur (Januari) 2. Penerbitan Peta Bidang Lahan Untuk Pembangunan Saringan Sampah di Perbatasan Oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan 3. Pelepasan Hak Atas tanah Pada Lokasi Pembangunan Saringan Sampah di Perbatasan	Unit Pengadaan Tanah SDA	Subbagian Tata Usaha
						B06	Pencatatan dan penyelesaian administrasi Pemanfaatan Lahan/aset		
21	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pembangunan Waduk Cimanggis (Lanjutan)	Terlaksananya Pembangunan Waduk Cimanggis melalui Naturalisasi Waduk	Terbangunnya Waduk Cimanggis melalui Naturalisasi Waduk Catatan: ada 7 Bidang (4 Bidang untuk Outlet) belum bebas	B03	Pengumuman Lelang	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Pengendalian Banjir
						B06	Penandatanganan Kontrak Fisik (Mei)		
						B09	Progres kegiatan 30%		
						B12	Progres kegiatan 100%		
22	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui		Terlaksananya Pembangunan		B03	Pengumuman Lelang		1. Seksi Perencanaan

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target		Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
		Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pembangunan Waduk Kampung Rambutan (Lanjutan)	Waduk Kampung Rambutan melalui Naturalisasi Waduk	Terbangunnya Waduk Kampung Rambutan melalui Naturalisasi Waduk	B06	Penandatanganan Kontrak Fisik (Mei)	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	2. Seksi Pengendalian Banjir
						B09	Progres kegiatan 30%		
						B12	Progres kegiatan 100%		
23	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pembangunan Waduk Sunter Selatan sisi Timur (Lanjutan)	Terlaksananya Pembangunan Waduk Sunter Selatan sisi Timur melalui Naturalisasi Waduk	Terbangunnya Waduk Sunter Selatan sisi Timur melalui Naturalisasi Waduk	B03	Pengumuman Lelang	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Pengendalian Banjir
						B06	Penandatanganan Kontrak Fisik		
						B09	Progres kegiatan 30%		
						B12	Progres kegiatan 100%		
24	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pembangunan Waduk Brigif dan Waduk Lebak Bulus Beserta Kelengkapannya	Terlaksananya Pembangunan Waduk Brigif dan Waduk Lebak Bulus Beserta Kelengkapannya	Terbangunnya Waduk Brigif dan Waduk Lebak Bulus Catatan: Total Anggaran MY yaitu Rp. 155M; TA 2021 sebesar Rp. 60M (Bobot : 38,7%)	B03	1. Penyampaian Kelengkapan Pengajuan Sebagai Kegiatan Rancang dan Bangun (Januari) 2. Pengumuman Pemenang Lelang Konsultan MK	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Pengendalian Banjir
						B06	Dokumen Lelang Rancang dan Bangun (April)		
						B09	1. Penandatanganan Kontrak Fisik (September) 2. Penyampaian Permohonan Rekomendasi Penataan Landscape untuk Pembangunan Waduk dan Sungai		

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV	
						B12	Progres kegiatan 38% (proporsional sesuai anggaran yang disediakan)		
25	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pembangunan Waduk Pondok Ranggon dan Embung Wirajasa Cipinang Melayu Beserta Kelengkapannya	Terlaksananya Pembangunan Waduk Pondok Ranggon dan Embung Wirajasa Cipinang Melayu Beserta Kelengkapannya	Terbangunnya Waduk Pondok Ranggon dan Embung Wirajasa Cipinang Melayu Beserta Kelengkapannya Catatan: Total Anggaran MY yaitu Rp. 140M; TA 2021 sebesar Rp. 55M (Bobot : 39,2%)	B03	1. Penyampaian Kelengkapan Pengajuan Sebagai Kegiatan Rancang dan Bangun (Januari) 2. Pengumuman Pemenang Lelang Konsultan MK	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Pengendalian Banjir
						B06	Dokumen Lelang Rancang dan Bangun (April)		
						B09	1. Penandatanganan Kontrak Fisik (September) 2. Penyampaian Permohonan Rekomendasi Penataan Landscape untuk Pembangunan Waduk dan Sungai		
						B12	Progres kegiatan 39 % (proporsional sesuai anggaran yang disediakan)		
26	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pembangunan/ Revitalisasi Polder Muara Angke, Teluk Gong dan Mangga Dua	Terlaksananya Pembangunan/ Revitalisasi Polder Muara Angke, Teluk Gong dan Mangga Dua	Beroperasinya pompa dan kelengkapannya di polder Muara Angke, Teluk Gong dan Mangga Dua Catatan: Total Anggaran MY sebesar Rp. 149M; TA 2021 Rp. 70M (Bobot : 47%)	B03	1. Penyampaian Kelengkapan Pengajuan Sebagai Kegiatan Rancang dan Bangun (Januari) 2. Pengumuman Pemenang Lelang Konsultan MK	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Pengendalian Banjir
						B06	Penyiapan Dokumen Lelang Konstruksi (April)		
						B09	Penandatanganan Kontrak Fisik		
						B12	Progres kegiatan 47% (proporsional sesuai anggaran yang disediakan)		

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV	
27	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pembangunan/Revitalisasi Polder Kali Betik, Artha Gading dan Pulomas	Terlaksananya Pembangunan/ Revitalisasi Polder Kali Betik, Artha Gading dan Pulomas	Beroperasinya pompa dan kelengkapannya di Polder Kali Betik, Artha Gading dan Pulomas Catatan: Total Anggaran MY sebesar Rp. 185M; TA 2021 Rp. 80M (Bobot : 43,2%)	B03	1. Kejelasan Penggunaan Aset Lahan Pulomas dan Lippo Untuk Posisi Polder Pulomas 2. Penyampaian Kelengkapan Pengajuan Sebagai Kegiatan Rancang dan Bangun (Januari) 3. Pengumuman Pemenang Lelang Konsultan MK	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Pengendalian Banjir
						B06	Dokumen Lelang Rancang dan Bangun (April)		
						B09	Penandatanganan Kontrak Fisik		
						B12	Progres kegiatan 43% (proporsional sesuai anggaran yang disediakan)		
28	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pembangunan/ Revitalisasi Sub Polder Marunda (JGCMetland), Pompa Tipala dan Adhiyaksa Beserta Kelengkapannya	Terlaksananya Pembangunan/ Revitalisasi Sub Polder Marunda (JGCMetland), Pompa Tipala dan Adhiyaksa Beserta Kelengkapannya	Beroperasinya pompa dan kelengkapannya di Sub Polder Marunda (JGCMetland), Pompa Tipala dan Adhiyaksa Beserta Kelengkapannya Catatan: Total Anggaran MY sebesar 166M; TA 2021 Rp. 75M (Bobot : 45,2%)	B03	1. Penyampaian Kelengkapan Pengajuan Sebagai Kegiatan Rancang dan Bangun (Januari) 2. Pengumuman Pemenang Lelang Konsultan MK	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Pengendalian Banjir
						B06	Penyiapan Dokumen Lelang Konstruksi (April)		
						B09	Penandatanganan Kontrak Fisik		
						B12	Progres kegiatan 45% (proporsional sesuai anggaran yang disediakan)		
29	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai,	Pembangunan Polder Green Garden dan Peningkatan Kapasitas Pompa Mobile Kalideres-Cengkareng	Terlaksananya Pembangunan Polder Green Garden dan	Beroperasinya pompa dan kelengkapannya di Polder Green Garden dan Kalideres-Cengkareng	B03	1. Penyampaian Kelengkapan Pengajuan Sebagai Kegiatan Rancang dan Bangun (Januari)	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
		Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai		Peningkatan Kapasitas Pompa Mobile Kalideres-Cengkareng	Catatan: Total Anggaran MY sebesar Rp. 68M; TA 2021 Rp. 60M (Bobot : 88,2%)	2. Pengumuman Pemenang Lelang Konsultan MK B06 Penyiapan Dokumen Lelang Konstruksi (April) B09 Penandatanganan Kontrak Fisik B12 Progres kegiatan 88% (proporsional sesuai anggaran yang disediakan)		Pengendalian Banjir
30	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pembangunan Sodetan Kali Ancol Jl. Lodan Kampung Walang Jakarta Utara	Terlaksananya Pembangunan Sodetan dari Kali Ancol ke Kali Ciliwung Lama	Berfungsinya sodetan dari Kali Ancol Ke Kali Ciliwung Lama	B03 Pengumuman Lelang Pembangunan Sodetan Kali Ancol Jl. Lodan Kampung Walang Jakarta Utara (sisi selatan) B06 1. Penandatanganan Kontrak Pembangunan Sodetan Kali Ancol Jl. Lodan Kampung Walang Jakarta Utara (sisi selatan) - (Mei) 2. Sodetan Kali Ancol dan Kali Ciliwung Lama (sisi utara) terkoneksi B09 Progres kegiatan 30% B12 Progres kegiatan 100%	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Drainase
31	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/	Pembangunan Sistem Drainase Balai Kartini dan Atmajaya	Terlaksananya penanganan genangan pada lokasi kawasan Balai Kartini dan Atmajaya	Tertanganinya genangan di kawasan Balai Kartini dan Atmajaya	B03 1. Koordinasi Jaringan Utilitas dan Kelengkapan Kota Yang Berpotensi Terdampak Pembangunan Drainase Balai Kartini dan Atmajaya 2. Pengumuman Lelang	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Drainase

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target		Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
		Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai				B06	1. Perizinan Utilitas 2. Penandatanganan Kontrak		
						B09	Progres kegiatan 30%		
						B12	Progres kegiatan 100%		
32	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung Depan Museum Bahari dan Penataan Kali Besar	Terlaksananya Penataan Kali Besar dan Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung Depan Museum Bahari Kota Administrasi Jakarta Utara	Terbangunnya Kali Besar dan Sodetan Kali Ciliwung Depan Museum Bahari Kota Administrasi Jakarta Utara Catatan: Total Anggaran MY sebesar Rp. 178M; TA 2021 Rp. 86,5M (Bobot : 48,6%)	B03	1. Penyampaian Kelengkapan Pengajuan Sebagai Kegiatan Rancang dan Bangun (Januari) 2. Pengumuman Pemenang Lelang Konsultan MK	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Drainase
						B06	Penyiapan Dokumen Lelang Konstruksi (April)		
						B09	1. Penandatanganan Kontrak Fisik 2. Penyampaian Permohonan Rekomendasi Penataan Landscape untuk Pembangunan Waduk dan Sungai		
						B12	Progres kegiatan 48% (proporsional sesuai anggaran yang disediakan)		
33	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Peningkatan Kapasitas Sungai/ Kali Ciliwung Hilir di Kawasan Pasar Baru	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kapasitas Sungai/Kali Ciliwung Hilir di kawasan Pasar Baru	Terbangunnya Kali Ciliwung Hilir di kawasan Pasar Baru Catatan: Total Anggaran MY sebesar Rp. 139,8M; TA 2021 Rp. 50M (Bobot : 35,8%)	B03	1. Penyampaian Kelengkapan Pengajuan Sebagai Kegiatan Rancang dan Bangun (Januari) 2. Pengumuman Pemenang Lelang Konsultan MK	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Drainase
						B06	Penyiapan Dokumen Lelang Konstruksi (April)		
						B09	Penandatanganan Kontrak Fisik		
						B12	Progres kegiatan 35% (proporsional sesuai anggaran yang disediakan)		

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target		Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
34	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Perencanaan Pengendalian Banjir melalui Penataan dan Naturalisasi Kali/Sungai	Terlaksananya Perencanaan Pengendalian Banjir melalui Penataan dan Naturalisasi Kali/Sungai	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir melalui Penataan dan Naturalisasi Kali/Sungai	B03	Pengumuman Lelang	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	Seksi Perencanaan
						B06	Penandatanganan Kontrak		
						B09	Laporan Pendahuluan		
						B12	Laporan Akhir		
35	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Penyampaian Daftar Lokasi Lahan Yang Telah Dibebaskan Di Sungai/Kali Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Tersusunnya Surat Penyampaian Daftar Lokasi Lahan Yang Telah Dibebaskan Di Sungai/Kali Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Ditanda tanganinya dan Tersampainya Surat Daftar Lokasi Lahan Yang Telah Dibebaskan Di Sungai/Kali Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	B03	Tersampainya Surat Daftar Lokasi Lahan Yang Telah Dibebaskan Di Sungai/Kali Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat (Januari)	Unit Pengadaan Tanah SDA	Subbagian Tata Usaha
36	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Koordinasi Lokasi Prioritas Pengadaan Lahan di Sungai/Kali Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat tahun 2021	Terlaksananya Koordinasi Lokasi Prioritas Pengadaan Lahan di Sungai/Kali Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat tahun 2021	Adanya surat penyampaian Lokasi Prioritas Pengadaan Lahan di Sungai/Kali Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat tahun 2021 ke Pemprov DKI Jakarta	B03	Tersampainya surat penyampaian Lokasi Prioritas Pengadaan Lahan di Sungai/Kali Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat tahun 2021 ke Pemprov DKI Jakarta	Unit Pengadaan Tanah SDA	Subbagian Tata Usaha

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV	
37	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Kali Kamal dan Sunda Kelapa	Terlaksananya Pembangunan tanggul pengaman pantai di Kali Kamal, Kali Blencong dan penanganan sementara tanggul Sunda Kelapa (Lodan/Pelra)	Terbangunnya prasarana pelengkap (spun pile) air untuk menahan Rob di Kali Kamal sepanjang 190 m, Kali Blencong sepanjang 90 m dan pintu air (Polair) serta penanganan sementara tanggul di Sunda Kelapa (Lodan/Pelra)	B03	1. Sosialisasi dan Penyelesaian isu Sosial Dalam Pembangunan Tanggul Pantai 2. Pengumuman Lelang	Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai	Seksi Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai
						B06	Penandatanganan Kontrak		
						B09	Progres kegiatan 20%		
						B12	Progres kegiatan 100%		
38	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pembangunan Sistem Polder Kamal	Terlaksananya Pembangunan Pompa dan Pintu Air serta Kelengkapannya pada Sistem Polder Kamal	Terbangunnya Pompa dan Pintu Air serta Kelengkapannya pada Sistem Polder Kamal Catatan: Total Anggaran MY Rp. 300M; TA 2021 Rp. 100M (Bobot : 30%)	B03	1. Penyampaian Kelengkapan Pengajuan Sebagai Kegiatan Rancang dan Bangun (Januari) 2. Pengumuman Lelang Manajemen Konstruksi	Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai	Seksi Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai
						B06	Penyiapan Dokumen Lelang Fisik (April)		
						B09	Penandatanganan kontrak		
						B12	Progres kegiatan 30%		
39	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Perencanaan tanggul pengaman pantai	Terlaksananya perencanaan tanggul pengaman pantai	Tersedianya dokumen perencanaan (reviu desain) tanggul pengaman pantai untuk lokasi : 1. Muara Angke – Kali Adem 2. Pantai Mutiara 3. Sunda Kelapa 4. Tanjung Priok 5. Kali Blencong 6. Kamal Muara	B03	laporan survey kondisi eksisting lapangan	Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai	Seksi Perencanaan
						B06	1. Proses Pengadaan (April) 2. Kontrak dengan penyedia/tenaga ahli		
						B09	Laporan pendahuluan		
						B12	Dokumen perencanaan (reviu desain) tanggul pengaman pantai		

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
40	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pembangunan Sumur Resapan, PAH & Konservasi air tanah	Terlaksananya pembangunan sarana pengelolaan air hujan (sumur resapan, kolam resapan dan bak/tandon/kolam detensi) dengan total volume tampungan ± 90.000 m ³	Terbangunnya sarana pengelolaan air hujan (sumur resapan, kolam resapan dan bak/tandon/kolam detensi) dengan total volume tampungan ± 90.000 m ³	B03 1. Tersampainya peta arahan pembangunan kepada instansi terkait (Januari) 2. Konsolidasi titik/lokasi pembangunan sumur resapan, PAH dengan SKPD terkait seperti DCKTRP, BPAD, dan SKPD Pemilik Aset 3. Tersedianya database lokasi/titik rencana pembangunan sumur resapan, PAH 4. Dimulainya kontrak/pembelian untuk item katalog sumur resapan dangkal tahap 1 (type buis beton berlubang kedalaman 2 m, type buis beton berlubang kedalaman 3 m) 5. Mengajukan permohonan dan kelengkapan dokumen persiapan pengadaan untuk pengadaan sumur resapan, kolam resapan dan bak/tandon/kolam detensi melalui tender/tender cepat (minggu pertama Februari) 6. Berkontraknya untuk item sumur resapan, kolam resapan dan bak/tandon/kolam detensi melalui tender/tender cepat (Maret)	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	Seksi Geologi dan Konservasi Air Baku

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
						B06 1. Dimulainya proses e-purchasing dan penandatanganan kontrak untuk Katalog Lokal Sumur Resapan Tahap 1 (April) 2. Progress pembangunan 5 %		
						B09 Proses pembangunan 40%		
						B12 Progress kegiatan pembangunan 100%		
41	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pergub tentang Penampungan Air Hujan	Terbitnya Pergub tentang Penampungan Air Hujan	Terimplementasikannya Pergub tentang Penampungan Air Hujan	B03 Terbitnya Pergub tentang Penampungan Air Hujan B06 Sosialisasi Pergub tentang Penampungan Air Hujan B09 Uji coba implementasi Pergub tentang Penampungan Air Hujan B12 Perluasan implementasi Pergub tentang Penampungan Air Hujan	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Geologi dan Konservasi Air Baku
42	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder	Pengadaan Lahan untuk penataan sungai/kali/waduk	Terlaksananya Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sumber Daya Air (Pelepasan Hak Kepada Masyarakat yang berhak)	Terbayarkannya lahan sungai dan waduk yang sudah SPH di tahun 2020 dan 2021 Catatan: Waduk/Sungai yang terdapat pembangunan fisiknya akan dimulai, agar	B03 1. Selesaiannya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Sumber Daya Air (Semua Lokasi) 2. Terinventarisasinya lahan sungai dan waduk yang sudah SPH tahun 2020 sebagai bahan untuk addendum PKS/Carry over (Januari)	Unit Pengadaan Tanah SDA	Subbagian Tata Usaha

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
		dan Tanggul Pantai			diselesaikan pengadaan tanahnya di tahun 2021	B06 Terbayarkannya lahan sungai dan waduk dengan progress 25% (semua lokasi yang pembangunan fisiknya dibangun di 2021, harus selesai di TW II untuk pembebasan lahannya)		
						B09 Terbayarkannya lahan sungai dan waduk dengan progress 55%		
						B12 1. Terbayarkannya lahan sungai dan waduk dengan progress 90% (November)2. Terbayarkannya lahan sungai dan waduk dengan progress 100% (Desember)		
43	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Peningkatan dan pemeliharaan Sistem Pompa Banjir di 5 wilayah kota Jakarta untuk memastikan kehandalan dan kecukupan kebutuhan pompa dalam pengendalian/ penanganan banjir Jakarta	Terpeliharanya Sistem Pompa Banjir	1. Tersampainya Laporan Secara Berkala2. Berfungsinya Sistem Pompa Banjir Secara Optimal	B03 1. Laporan Berkala Pemeliharaan dan Pengoperasian Sistem Pompa Banjir (Stasioner dan Mobile)2. Berfungsinya Sistem Pompa Banjir (Stasioner dan Mobile) secara Optimal B06 1. Laporan Berkala Pemeliharaan dan Pengoperasian Sistem Pompa Banjir (Stasioner dan Mobile) 2. Berfungsinya Sistem Pompa Banjir (Stasioner dan Mobile) secara Optimal	1. Suku Dinas SDA Jakarta Pusat2. Suku Dinas SDA Jakarta Utara3. Suku Dinas SDA Jakarta Barat4. Suku Dinas SDA Jakarta Selatan5. Suku Dinas SDA Jakarta Timur	1. Seksi Pengelolaan Sarana Pengendalian Banjir, Air Bersih Dan Air Limbah - Suku Dinas SDA Jakarta Pusat 2. Seksi Pengelolaan Sarana Pengendalian Banjir, Air Bersih Dan Air Limbah

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
						B09 1. Laporan Berkala Pemeliharaan dan Pengoperasian Sistem Pompa Banjir (Stasioner dan Mobile) 2. Berfungsinya Sistem Pompa Banjir (Stasioner dan Mobile) secara Optimal		- Suku Dinas SDA Jakarta Utara 3. Seksi Pengelolaan Sarana Pengendalian Banjir, Air Bersih Dan Air Limbah
						B12 1. Laporan Berkala Pemeliharaan dan Pengoperasian Sistem Pompa Banjir (Stasioner dan Mobile) 2. Berfungsinya Sistem Pompa Banjir (Stasioner dan Mobile) secara Optimal		- Suku Dinas SDA Jakarta Barat 4. Seksi Pengelolaan Sarana Pengendalian Banjir, Air Bersih Dan Air Limbah - Suku Dinas SDA Jakarta Selatan 5. Seksi Pengelolaan Sarana Pengendalian Banjir, Air Bersih Dan Air Limbah - Suku Dinas SDA Jakarta Timur

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
44	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Banjir	Tersedianya Sistem Informasi Pengendalian Banjir yang dapat bekerja secara berkala menginformasikan ketinggian muka air sungai	Tersusunnya Standar Operasional Procedur/Prosedur Kerja tentang Operasional Sistem Informasi Pengendalian Banjir	B03 1. Penyampaian Tim Counterpart SDA dalam Pengembangan flood information system (Januari) 2. Ditetapkannya Standar Operasional Procedur/Prosedur Kerja tentang Operasional Sistem Informasi Pengendalian Banjir 3. Penyusunan Bisnis Proses Mobilisasi Pompa Portable (Februari) 4. Pengembangan Aplikasi/Dashboard Mobilisasi Pompa Portable (Februari)	Pusat Data dan Informasi SDA	Subbagian Tata Usaha
45	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pengembangan strategi komunikasi publik dalam pengelolaan termasuk pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan	Tersedianya materi publikasi Pengelolaan Termasuk Pemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan ke Diskominfo	Tersampainya materi publikasi Pengelolaan Termasuk Pemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan ke Diskominfo	B03 Tersampainya materi publikasi Pengelolaan Termasuk Pemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan ke Diskominfo (Februari) B06 Tersampainya materi publikasi Pengelolaan Termasuk Pemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan ke Diskominfo (Mei) B09 Tersampainya materi publikasi Pengelolaan Termasuk Pemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan ke Diskominfo (Agustus)	Pusat Data dan Informasi SDA	Subbagian Tata Usaha

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
						B12 Tersampainya materi publikasi Pengelolaan Termasuk Pemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan ke Diskominfo (November)		
46	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Dokumen Lingkungan Infrastruktur Pengendali Banjir Yang Di Biayai Oleh Pinjaman PEN	Tersedianya Dokumen Lingkungan Infrastruktur Pengendali Banjir Yang Di Biayai Oleh Pinjaman PEN	Penerbitan Dokumen Lingkungan Infrastruktur Pengendali Banjir Yang Di Biayai Oleh Pinjaman PEN pada:1. Waduk : Brigif, Pondok Ranggon, Lebak Bulus, Embung Wirajasa, Sunter Selatan Sisi Timur, Kampung Rambutan, Waduk Cimanggis2. Polder : Muara Angke, Betik-Artha Gading, Sunter Timur 1B, Teluk Gong, Polder Green Garden, Polder Kamal, Sub Polder Marunda (JGC – Metland System), Polder Pulomas, Polder Mangga Dua, Sistem Polder Kalideres – Cengkareng, Pompa Adhyaksa dan Tipala3. Saluran : Sodetan Kali Ancol Jl. Lodan Kampung Walang, Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Semanggi dan Atmajaya, Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Balai Kartini,	B03 Penyampaian Dokumen Lingkungan Infrastruktur Pengendali Banjir Yang Di Biayai Oleh Pinjaman PEN untuk Pembangunan Polder ke DPMPTSP	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	Seksi Perencanaan

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV	
					Penataan Kali Ciliwung Pasar Baru, Penataan Kali Besar	B09 Penyampaian Dokumen Lingkungan Infrastruktur Pengendali Banjir Yang Di Biayai Oleh Pinjaman PEN untuk Pembangunan Waduk ke DLH dan Saluran ke DPMPTSP (September)			
47	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pengadaan Dredger dengan sistem Geopool dan Dredger kapasitas daya hisap maksimal 900 m3	Terlaksananya Pengadaan Dredger dengan sistem Geopool dan Dredger kapasitas daya hisap maksimal 900 m3	Tersedianya 2 Unit Dredger dengan sistem Geopool dan 2 Unit Dredger kapasitas daya hisap maksimal 900 m3	B03	1. Penyampaian dokumen lelang (Februari minggu ke-2) 2. Dimulainya proses lelang	Unit Peralatan dan Perbekalan SDA	Subbagian Tata Usaha
						B06	Penandatanganan Kontrak (Mei)		
						B12	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (November)		
48	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pemeliharaan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir termasuk Pengerukan waduk/situ/embung untuk meningkatkan kapasitas aliran dan tampungan air	Terlaksananya pengerukan waduk/situ/embung	Peningkatan kapasitas waduk/situ/embung dengan total 109 waduk/situ/embung	B03	Proses Pengukuran MC 0 (Februari) Dimulainya pelaksanaan pengerukan	1. Suku Dinas SDA Jakarta Pusat 2. Suku Dinas SDA Jakarta Utara 3. Suku Dinas SDA Jakarta Barat 4. Suku Dinas SDA Jakarta Selatan 5. Suku Dinas SDA Jakarta Timur	1. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Pusat 2. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Utara 3. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Barat 4. Seksi Pemeliharaan
						B06	Progres kegiatan 20%		
						B09	Progres kegiatan 40%		
						B12	Progres kegiatan 60%		

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target		Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
									Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Selatan 5. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Timur
49	KSD-023	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Pemeliharaan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir termasuk Pengerukan Kali dan Sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran dan tampungan air	Terlaksananya pengerukan kali dan sungai	Peningkatan kapasitas pada 146 kali dan sungai	B03	Proses Pengukuran MC 0 (Februari) Dimulainya pelaksanaan pengerukan	1. Suku Dinas SDA Jakarta Pusat 2. Suku Dinas SDA Jakarta Utara 3. Suku Dinas SDA Jakarta Barat 4. Suku Dinas SDA Jakarta Selatan 5. Suku Dinas SDA Jakarta Timur	1. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Pusat 2. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Utara 3. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Barat 4. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Selatan 5. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Timur
						B06	Progres kegiatan 20%		
						B09	Progres kegiatan 40%		
						B12	Progres kegiatan 60%		

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target		Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
50	KSD-29	Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko	Rekomendasi Teknis Penataan Kawasan Stasiun Tahap 2	Tersedianya Rekomendasi Teknis Penataan Kawasan Stasiun Tahap 2	Tersedianya Rekomendasi Teknis Penataan Kawasan Stasiun Tahap 2	B03	Rekomendasi Teknis Penataan Kawasan Stasiun Tahap 2	Sekretariat	Subbagian Umum
51	KSD-036	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda	Rekomendasi Pemanfaatan Aset dan Rekomendasi Teknis Penyediaan Bike Lounge di BKB	Tersedianya Rekomendasi Pemanfaatan Aset dan Rekomendasi Teknis Penyediaan Bike Lounge di BKB	Tersedianya Rekomendasi Pemanfaatan Aset dan Rekomendasi Teknis Penyediaan Bike Lounge di BKB	B03	1. Rekomendasi Pemanfaatan Aset Penyediaan Bike Lounge di BKB diserahkan kepada BPAD (Minggu Kedua Februari) 2. Rekomendasi Teknis Penyediaan Bike Lounge di BKB (Februari akhir)	Sekretariat	Subbagian Umum
52	KSD-039	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	Meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Dinas Sumber Daya Air	Tersusunnya dokumen kinerja tepat waktu (Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja dan Sasaran Kinerja dan Pegawai/SKP)	Persentase penyelesaian penyusunan Dokumen Kinerja tepat waktu	B03	Ditetapkannya Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021 Data Dukung: Laporan Rekapitulasi Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021	Sekretariat	Subbagian Program dan Pelaporan
						B09	Disusunnya Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022 Data Dukung: Soft Copy Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4,		

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
						Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022		
53	KSD-039	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	Meningkatkan nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP pada Dinas Sumber Daya Air	Tersusunnya hasil evaluasi kinerja tepat waktu	Persentase penyelesaian penyusunan hasil evaluasi kinerja tepat waktu	B03 1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2020 (selesai di akhir Januari 2021)Data Dukung : Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 20202. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW IV Tahun 2020 (selesai di akhir Januari 2021)Data Dukung : Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3,4 dan Fungsional TW IV Tahun 2020	Sekretariat	Subbagian Program dan Pelaporan

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
54						<p>B06</p> <p>1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2021 (selesai di April 2021)</p> <p>Data Dukung : Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2021</p> <p>2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW I Tahun 2021 (selesai di akhir April 2021)</p> <p>Data Dukung : Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3,4 dan Fungsional TW I Tahun 2021</p>		

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
						B09 1. Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Data Dukung : Dokumen hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah 2017-2022. 2. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2021 (selesai di Juli 2021) Data Dukung : Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2021 3. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW II Tahun 2021 (selesai di akhir Juli 2021) Data Dukung : Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3,4 dan Fungsional TW II Tahun 2021		

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
						<p>B12</p> <p>1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2021 (selesai di Oktober 2021)</p> <p>Data Dukung :Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2021</p> <p>2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW III Tahun 2021 (selesai di akhir Oktober 2021)</p> <p>Data Dukung : Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW III Tahun 2021</p>		
55	KSD-039	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	Meningkatkan nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Dinas Sumber Daya Air	Tersusunnya laporan kinerja Pemerintah Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Persentase penyelesaian penyusunan laporan kinerja tepat waktu	<p>B03</p> <p>1. Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020</p> <p>Data Dukung: Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020</p> <p>2. Terinputnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 pada aplikasi esr.menpan.go.id (akhir Januari 2021)</p>	Sekretariat	Subbagian Program dan Pelaporan

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV	
						Data Dukung : Screenshot LKIP telah terupload			
56	KSD-041	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Revisi Pergub No.86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah	Penyusunan revisi Pergub No 86 Tahun 2012	Tersusunnya revisi Pergub No 82 Tahun 2012	B03 Revisi Pergub No 86 Tahun 2012	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	Seksi Geologi dan Konservasi Air Baku	
57	KSD-051	Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Sebira	Terbangunnya IPA (SWRO) di Pulau Sebira	Beroperasinya IPA sampai dengan sambungan rumah di Pulau Sebira	B03	1. Tersusunnya Dokumen Pengadaan 2. Dimulainya Proses Tender	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	Seksi Pengendalian dan Penyediaan Air Bersih
						B06	Ditandatanganinya kontrak Penyedia Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Sebira (Juni)		
						B09	Progres Konstruksi Konstruksi Fisik 10%		
						B12	Konstruksi Fisik Selesai 100% yang ditunjukkan oleh Laporan Progres pekerjaan konstruksi yang telah disetujui oleh PPK		

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV	
58	KSD-051	Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu	Monitoring Kesesuaian Produksi dan Kebutuhan Air Bersih di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan	Terlaksananya Monitoring Kesesuaian Produksi dan Kebutuhan Air Bersih di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan	Rekomendasi Penanganan GAP antara Produksi dengan kebutuhan air bersih berdasarkan hasil Monitoring Kesesuaian Produksi dan Kebutuhan Air Bersih di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan	B03	1. Monitoring bersama Kesesuaian Produksi dan Kebutuhan Air Bersih di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan 2. Rekomendasi Penanganan GAP antara produksi dengan kebutuhan air bersih	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	Seksi Pengendalian dan Penyediaan Air Bersih
						B06	Penanganan atas GAP antara produksi dengan kebutuhan air bersih (apabila ada)		
59	KSD-052	Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pulau Kelapa Zona 1	Terbangunnya Sistem Pengolahan Air Limbah di Pulau Kelapa Zona 1	Terbangun dan terkelolanya SPALD di Pulau Kelapa Zona 1	B03	Tersedianya Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi (25 Maret 2021)	Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Air Bersih dan Air Limbah
						B06	Tersedianya kontrak Pembangunan SPALD hasil pengadaan jasa konstruksi (25 Juni 2021)		
						B09	1. Laporan progress kegiatan (25 September 2021) 2. Progres pembangunan 20%		
						B12	1. terselesaikannya pembangunan SPALD Pulau Kelapa Zona 1 2. Beroperasinya SPALD untuk melayani pengolahan air limbah dari kawasan permukiman melalui jaringan perpipaan (50%)		
60	KSD-052	Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pulau Kelapa Zona 2	Terbangunnya Sistem Pengolahan Air Limbah di Pulau Kelapa Zona 2	Terbangunnya dan terkelolanya SPALD di Pulau Kelapa Zona 2	B03	Tersedianya Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi (25 Maret 2021)	Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu	1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Air Bersih dan Air Limbah
						B06	Tersedianya kontrak Pembangunan SPALD hasil pengadaan jasa konstruksi (25 Juni 2021)		

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target		Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
						B09	1. Laporan progress kegiatan (25 September 2021) 2. Progres pembangunan 20%		
						B12	1. Terelesaikannya pembangunan SPALD Pulau Kelapa Zona 2 2. Beroperasinya SPALD untuk melayani pengolahan air limbah dari kawasan permukiman melalui jaringan perpipaan (50%)		
61	KSD-058	Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik	Pengadaan Tanah oleh Dinas Sumber Daya Air untuk kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen di Kelurahan Pegadegan	Terlaksananya tahapan pengadaan tanah oleh Dinas Sumber Daya Air untuk kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen di Kelurahan Pegadegan	Tersedianya data WTP yang akan direlokasi ke rusunawa Pegadegan	B06	1. Pengumuman oleh Panitia Pengadaan Tanah di Kelurahan Pegadegan (Mei 2021) 2. Tersedianya data nominasi warga terprogram oleh Walikota Jakarta Selatan (Juni 2021) 3. DPRKP proses penghunian warga terprogram (Juni 2021)	Unit Pengadaan Tanah SDA	Subbagian Tata Usaha
62	KSD-058	Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik	Pendataan Warga Terprogram yang Terkena Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen di Kelurahan Pegadegan	Tersedianya data warga terprogram yang terkena Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen di Kelurahan Pegadegan	Tersedianya data warga terprogram yang terkena Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen di Kelurahan Pegadegan	B06	1. Pengumuman oleh Panitia Pengadaan Tanah di Kelurahan Pegadegan (Mei 2021) 2. Pendataan warga terprogram yang terkena Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen di Kelurahan Pegadegan	Unit Pengadaan Tanah SDA	Subbagian Tata Usaha
63	KSD-058	Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa	Konsolidasi dengan BBWSCC terkait rencana pelaksanaan normalisasi Ciliwung yang terindikasi tanah negara	Terlaksananya Konsolidasi dengan BBWSCC terkait rencana pelaksanaan	Terlaksananya Konsolidasi dengan BBWSCC terkait rencana pelaksanaan normalisasi Ciliwung yang terindikasi tanah negara	B03	Laporan hasil Konsolidasi dengan BBWSCC terkait rencana pelaksanaan normalisasi Ciliwung yang	Unit Pengadaan Tanah SDA	Subbagian Tata Usaha

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
		dan Rumah Susun Milik		normalisasi Ciliwung yang terindikasi tanah negara		terindikasi tanah negara (Januari 2021)		
64	KSD-058	Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik	Pengadaan Tanah oleh Dinas Sumber Daya Air untuk kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen dari Pintu Air Manggarai sampai jalan MT. Haryono	Terlaksananya pengadaan tanah oleh Dinas Sumber Daya Air untuk kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen dari Pintu Air Manggarai sampai jalan MT. Haryono	Terisinya rumah susun Pasar Rumput akibat pelaksanaan kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen dari Pintu Air Manggarai sampai jalan MT. Haryono	B06 1. Terlaksananya pengadaan tanah oleh Dinas Sumber Daya Air untuk kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen dari Pintu Air Manggarai sampai jalan MT. Haryono 2. Tersedianya data nominasi warga terprogram oleh Walikota Jakarta Selatan dan Jakarta Timur	Unit Pengadaan Tanah SDA	Subbagian Tata Usaha
65	KSD-058	Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik	Pendataan warga terprogram yang terkena Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen dari Pintu Air Manggarai sampai jalan MT. Haryono	Tersedianya data warga terprogram yang terkena Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen dari Pintu Air Manggarai sampai jalan MT. Haryono	Tersedianya data warga terprogram yang terkena Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen dari Pintu Air Manggarai sampai jalan MT. Haryono	B06 1. Pengumuman oleh Panitia Pengadaan Tanah di Kelurahan (Mei 2021) 2. Pendataan warga terprogram yang terkena Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Ciliwung untuk segmen dari Pintu Air Manggarai sampai jalan MT. Haryono	Unit Pengadaan Tanah SDA	Subbagian Tata Usaha
66	KSD-061	Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada Dinas Sumber Daya Air atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2021	Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021	Progres penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021	B06 TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021. Target Capaian : 80% Catatan: Untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%	Sekretariat	Subbagian Keuangan

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
						<p>Data Dukung : Berita acara hasil verifikasi Inspektorat.</p> <p>B12 TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021. Target Capaian : 85%</p> <p>Catatan: Untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%</p> <p>Data Dukung : Berita acara hasil verifikasi Inspektorat.</p>		
67	KSD-063	Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Asesmen Transformasi Digital dan Evaluasi SPBE pada Dinas Sumber Daya Air	Terlaksananya pengumpulan data isian form asesmen transformasi digital dan data pengelolaan SPBE Perangkat Daerah	Tersedianya data isian form asesmen transformasi digital dan data pengelolaan SPBE Perangkat Daerah	<p>B03 Tersampainya data hasil isian form asesmen transformasi digital Perangkat Daerah sesuai format pada Instruksi Sekda No 122 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan asesmen transformasi digital</p> <p>B09 Tersampainya data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB dan DKI Jakarta</p>	Pusat Data dan Informasi SDA	Subbagian Tata Usaha

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
68	KSD-073	Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian	Penerbitan rekomendasi teknis pembangunan saluran dari Dinas Sumber Daya Air	disusunnya rekomendasi teknis pembangunan saluran dari Dinas Sumber Daya Air	terbitnya surat rekomendasi teknis pembangunan saluran dari Dinas Sumber Daya Air di lokasi: - Kawasan Kebayoran Baru (Jl. Senopati - Jl. Suryo, Jl. Woltermonginsidi - Jl. Trunojoyo, Jl. Cikajang, Jl. Gunawarman (lanjutan) - (Jaksel) - jl. Tebet cs (Jaksel) - Jl. Raden Saleh/Jl. Kesehatan (Jakpus) - Kawasan Puri (Jl. Puri Wangi) - (Jakbar) - Jl. Layur (Jaktim) - Area sekitar JIS (Jakut)	<p>B03</p> <p>1. Terkirimnya surat pengajuan rekomendasi DSDA yang disampaikan oleh DBM untuk perencanaan pembangunan trotoar tahap 1 (Februari) 2. terbitnya surat rekomendasi teknis DSDA</p> <p>B06</p> <p>1. Terkirimnya surat pengajuan rekomendasi DSDA yang disampaikan oleh DBM untuk perencanaan pembangunan trotoar tahap 2 (April) 2. Terkirimnya surat pengajuan rekomendasi DSDA yang disampaikan oleh DBM untuk perencanaan pembangunan trotoar tahap 3 (Mei)</p>	Sekretariat	Subbagian Umum

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
						3. Terbitnya surat rekomendasi teknis DSDA		
69	KSD-073	Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian	Pengurusan dan perbaikan saluran eksisting atau pembangunan saluran yang terputus	Terlaksananya Pengurusan dan perbaikan saluran eksisting atau pembangunan saluran yang terputus	Tersedianya laporan Pengurusan dan perbaikan saluran eksisting atau pembangunan saluran yang terputus di lokasi:- Kawasan Kebayoran Baru (Jl. Senopati - Jl. Suryo, Jl. Woltermonginsidi - Jl. Trunojoyo, Jl. Cikajang, Jl. Gunawarman (lanjutan) - (Jaksel)- Jl. Tebet cs (Jaksel)- Jl. Raden Saleh/Jl. Kesehatan (Jakpus)- Kawasan Puri (Jl. Puri Wangi)(Jakbar)- Jl. Layur (Jaktim)- Area sekitar JIS (Jakut)	B06 1. 30% Saluran sudah dikuras dan/atau tersambung (April 2021) 2. 50% Saluran sudah dikuras dan/atau tersambung (Mei 2021) 3. 100% Saluran sudah dikuras dan/atau tersambung (Juni 2021)	1. Suku Dinas SDA Jakarta Pusat 2. Suku Dinas SDA Jakarta Utara 3. Suku Dinas SDA Jakarta Barat 4. Suku Dinas SDA Jakarta Selatan 5. Suku Dinas SDA Jakarta Timur	1. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Pusat 2. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Utara 3. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Barat 4. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Selatan 5. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Timur

No	Kode KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah	Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon III	Unit Kerja Penanggung Jawab Eselon IV
70	KSD-073	Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian	Grebek pengurasan saluran di area pembangunan trotoar	Terlaksananya pengurasan saluran	Tersedianya laporan progress grebek pengurasan saluran di lokasi:- Kawasan Kebayoran Baru (Jl. Senopati - Jl. Suryo, Jl. Woltermonginsidi - Jl. Trunojoyo, Jl. Cikajang, Jl. Gunawarman (lanjutan) - (Jaksel)- Jl. Tebet CS (Jaksel)- Jl. Raden Saleh / Jl. Kesehatan (Jakpus)- Kawasan Puri (Jl. Puri Wangi)(Jakbar)- Jl.Layur (Jaktim)- Area sekitar JIS (Jakut)	B12 1. 50% saluran sudah dikuras (November 2021) 2. 100% saluran sudah dikuras (Desember 2021)	1. Suku Dinas SDA Jakarta Pusat 2. Suku Dinas SDA Jakarta Utara 3. Suku Dinas SDA Jakarta Barat 4. Suku Dinas SDA Jakarta Selatan 5. Suku Dinas SDA Jakarta Timur	1. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Pusat 2. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Utara 3. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Barat 4. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Selatan 5. Seksi Pemeliharaan Drainase - Suku Dinas SDA Jakarta Timur

